Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 12 No 3 September 2013
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Optimalisasi Etos Kerja Petani *Sedulur Sikep* sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan 215 - 224
Optimization of Farmers Work Ethos Sedulur Sikep as Preventive Effort of Food Crisis
(Adhi Surya Perdana)

2. Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model 225 - 236
Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication
*(*Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi)

3. Kajian Fenomenologi: Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia 237 - 253
Phenomenological Insight: Violence as Communication Behavior toward Indonesian Migrant Workers Women
*(*Anggraeni Primawati dan Ellys Lestari Pambayun)

4. Hubungan antara Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas Anak-anak Tunanetra 254 - 262
Correlation of Self Concept and Self-regulation with Self-orientation and Mobility Skill of the Children with Visual Impairment
*(*Rull Rangingisan)

5. Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah 263 - 275
Going to Social Resilience Society through Local Social Institution Empowerment in Central Kalimantan Province
(Etty Padmiati)

6. Evaluasi Program Asistensi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODK Berat) 276 - 285
Evaluation on Social Assistance Program for Severe Disability
*(*Haryati Roebyantho dan Setyo Sumarno)

7. Peranan Harga Diri sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Depresi dan Keberfungsian Sosial Internal Remaja 286 - 293
The Role of Self-dignity as Moderating Variable in Relationship between Depression and Youths' Inner Social Functioning
Husmiati

8. Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Pascabencana 294 - 300
Social Policy Forecasting on Post-disaster Risk Reduction Management
*(*Gunanto Surjono)

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) edisi 12 volume 3 dibuka dengan kajian Adhi Surya Perdana tentang Optimalisasi Etos Kerja Petani *Sedulur Sikep* sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan di Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo sekitar Pegunungan Kendeng,Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Menyusul Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi dalam Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model, di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggraeni Primawati dan Ellys Lestari Pambayun mengungkap tentang Kajian Fenomenologi: Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia (mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi dan Malaysia), yang bermukim di Jakarta. Rull Rangingisan membahas tentang Hubungan antara Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas Anak-anak Tunanetra Sekolah Luar Biasa bagian A Bartemeus, Manado. Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah, dikemukakan oleh Etty Padmiati. Masalah penyandang cacat berat (ODK) juga mendapat perhatian dari Haryati Roebyantho dan Setyo Sumarno yang mengevaluasi Program Asistensi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODK Berat), di Kabupaten Kulonprogo. Husmiati membahas remaja dalam Peranan Harga Diri sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Depresi dan Keberfungsian Sosial Internal Remaja di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Cimahi, Jawa Barat. Menutup Edisi 12 volume 3 JPKS, Gunanto Suryono yang mengungkap tentang Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Pascabencana, sebagai alternatif dalam mengembangkan lingkungan alam, dunia usaha, dan masyarakat rawan korban menuju ke kehidupan berketahanan sosial pascabencana.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451 **Vol 12 No 3 September 2013**

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extacted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Adhi Surya Perdana (Kandidat Master of Science Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada)
Optimalisasi Etos Kerja Petani *Sedulur Sikep* sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan
Optimization of Farmers Work Ethos Sedulur Sikep as Preventive Effort of Food Crisis
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 215 - 224

Research on work ethos, Sedulur Sikep Communities, done because is seen there is a tendency in the community that working as a farmer can pose a perception that someone has dignity value, spirit, resilience, and work skill away from lie and hold honesty highly through a sense of sincerity on farming, and a support to preserve farming sustainability, so that can be a dignity job to fulfill family and community food needs. The research result shows that work ethos is a drive and an effort to control and evaluate work through a hope and will on farming-activities selves sustain, so that the product gained can be done with responsibility as a real conduct application with an orientation and a goal, give positive value on farmers to prevent family and community food need crisis, and achieve family welfare.

Keywords: Work Ethos-Sedulur Sikep Famers-Crisis Prevention-Family Food Needs

Penelitian etos kerja masyarakat *Sedulur Sikep* dilakukan karena melihat adanya kecenderungan seseorang melakukan aktivitas kerja sebagai petani dapat memposisikan suatu pandangan yang memiliki nilai luhur, niat, keuletan, dan keterampilan pekerjaan yang jauh dari kebohongan, dan menjunjung tinggi kejujuran melalui rasa setulus hati dalam bercocok tanam dan adanya dukungan melestarikan lingkungan pertanian untuk keberlanjutan masa mendatang, sehingga dapat menjadikan suatu pekerjaan mulia yang dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan khalayak. Hasil penelitian menunjukan bahwa etos kerja merupakan suatu dorongan atau usaha untuk melakukan kontrol kerja dan evaluasi melalui harapan dan keinginan untuk mandiri dalam bertani, sehingga hasil yang diperoleh dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sebagai bentuk aplikasi perbuatan nyata yang memiliki arah dan tujuan dan dapat memberikan nilai positif bagi petani untuk menanggulangi krisis kebutuhan pangan keluarga serta dapat mewujudkan keluarga sejahtera.

Kata Kunci: Etos Kerja Petani-*Sedulur Sikep*-Krisis-Kebutuhan Pangan Keluarga

Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi (Peneliti Madya dan Staf B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial)
Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model
Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 225 - 236

As the expansion area, Serakapi Village needs to get facilities to support the development as its main area, Saneo Village. Strengthening human resources needed to run the village development programs by local social institutions in an attempt to embody social resilience. Through the Development of Village Social Resilience Model, that has been implemented by the Ministry of Social Affairs, social resilience in Serakapi Village was studied of its supporting and handicap factors. The results showed that the formed forum, namely Sabua Ade, had clear organized and planned in the division of social protection, community participation, social conflict prevention, and local wisdom development. This forum has been running well according to the plan despite one issue, funding problem. It's recommended that community social resilience model should be aplicated in other regions by respecting the typology and character of the villages.

Keywords: Human Resources Strengthening–Rural Development–Social Community Resilience

Sebagai daerah pemekaran, Desa Serakapi perlu mendapatkan fasilitas untuk mendukung pembangunan seperti daerah induknya, Desa Saneo. Diperlukan penguatan SDM lokal untuk menjalankan program pembangunan desa melalui kelembagaan sosial lokal sebagai wujud pembangunan ketahanan sosial. Melalui implementasi *action research* replikasi model pengembangan desa berketahanan sosial yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, Desa Serakapi dikaji faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum Tansosmas yang terbentuk, yaitu Sabua Ade, telah diorganisasikan dan direncanakan dengan baik dalam divisi perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian konflik sosial, dan pengembangan kearifan lokal. Forum ini telah berjalan baik sesuai rencana walaupun terdapat kendala pendanaan. Direkomendasikan untuk melakukan replikasi model ini di wilayah lain dengan mempertimbangkan tipologi dan karakter desa.

Kata Kunci: Penguatan SDM–Pembangunan Desa–Ketahanan Sosial Masyarakat

Anggraeni Primawati dan Ellys Lestari Pambayun (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tunas Nusantara Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Sosiologi Universitas Nasional (UNAS) Jakarta)

Kajian Fenomenologi:Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia

Phenomenological Insight: Violence as Communication Behavior toward Indonesian Migrant Workers Women

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 237 - 253

The research on violence as women migrant workers communication behavior in Jakarta was based on the observation of the reality of the violennce that endlessly (even flourishing) experienced by Indonesian women migrant workers in Jakarta. Physical, verbal, psychological, and even economic violence often experienced by women migrant workers. From the observations the problem then was found that violence, as inappropriate behavior experienced by women migrant workers, was closely related to the communication ability, language skill, and cultural understanding of women migrant workers at their work sites, Saudi Arabia and Malaysia. The theoretical basis used to analyze the research finding was phenomenological approach that especially explore the experience of actors or subjects (Indonesian women migrant workers) on the violence as inappropriate communication behavior, tends hiding, to be a fact that can be revealed. In addition, the perspective of intercultural communication included in this study, also used to see the context of communications and actions of women migrant workers in countries of different cultures, values, and ideologies, particularly stereotypes and prejudices involved in the violence on women migrant workers. Similarly, muted-group theory associated with this study, was used also to look at gender relations that occur among violent offenders, namely employers and migrant women (as victims of violence or inappropriate behavior) so they became a silent human being or powerless against the cultural and ideological domination of their employers.The research method used was a qualitative approach, exploring through phenomenological method that required in-depth investigation of the violence. The conclusion of the research was that the reality of violence behavior, as an inappropriate communication to Indonesian women migrant workers, was more physical, verbal, psychological, and economic expression in their private areas by the employers who still held the value, culture and patriarchal ideology, feudalism, and their lack understanding on the real Indonesian character and culture.

Keywords: Phenomenological Insight-Violence Behavior Communication- Migrant Workers Women

Penelitian tentang fenomenologi kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta ini didasarkan atas pengamatan terhadap realitas kekerasan yang terjadi atau dialami para buruh migran perempuan di Indonesia yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin marak. Kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan ekonomi kerap dialami buruh migran perempuan. Dari hasil pengamatan ditemukan masalah, bahwa kasus kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang tidak pantas ini sangat terkait dengan kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa, dan pemahaman budaya buruh migran perempuan di lokasi bekerja mereka, yaitu di Arab Saudi dan

Malaysia. Dasar teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang secara khusus memiliki tujuan mengeksplorasi pengalaman aktor atau subjek (buruh migran perempuan di Indonesia) tentang peristiwa kekerasan, sebagai perilaku komunikasi tidak pantas yang menimpa mereka, yang selama ini tersembunyi, agar menjadi fakta yang tampak. Perspektif komunikasi antarbudaya yang juga disertakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat konteks dan tindakan komunikasi buruh migran perempuan di negara yang berbeda budaya, nilai, dan ideologi. khususnya stereotipe dan prasangka yang terlibat di dalam kekerasan pada buruh migran perempuan. Begitu pula *muted-group theory* yang dikaitkan dengan penelitian ini untuk melihat relasi gender yang terjadi di antara pelaku kekerasan, yaitu majikan dan buruh migran perempuan (sebagai korban kekerasan atau perilaku tidak pantas) sehingga mereka menjadi manusia yang bisu atau tidak berdaya melawan dominasi budaya dan ideologi majikan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dilakukan melalui kajian fenomenologi yang menghendaki investigasi secara mendalam terhadap kasus kekerasan yang menimpa TKW. Simpulan penelitian ini adalah bahwa realitas kekerasan atau perilaku komunikasi yang tidak pantas terhadap buruh migran perempuan Indonesia lebih merupakan kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan ekonomi di wilayah privat TKW, dilakukan oleh majikan yang masih memegang nilai, budaya, dan ideologi patriarkis, feodalisme, dan kekurangpahaman terhadap budaya dan karakter orang Indonesia yang sebenarnya.

Kata Kunci: Kajian Fenomenologi-Perilaku Komunikasi Kekerasan-Buruh Migrant Perempuan

Rull Rangingisan (Dosen pada Jurusan pendidikan Khusus; FIP UNIMA)
Hubungan antara Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas Anak-anak Tunanetra
Correlation of Self Concept and Self-regulation with Self-orientation and Mobility Skill of the Children with Visual Impairment
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 254 - 262

The aim of this research is to know the correlation of self concept and self regulation with the orientation and mobility skill of the children with visual impairment. The hypothesis stated in this research were: There were correlation of self concept and self regulation with the orientation and mobility skill of the children with visual impairment. Increasing self concept and self regulation were indicating the increasing of the skill orientation and mobility. The subjects were 27 visual impairment children studied at education for visual impairment Bartemeus, Manado. The data collected were scale orientation and mobility, self concept and self regulation, and analysed by regression. The result for regression analysis showed: first, the contribution of self concept and self regulation to skill orientation and mobility were significant. Second, there was significant correlation between self concept and skill orientation and mobility. Third, there was significant correlation between self regulation and orientation with mobility skill for visual impairment.

Key Words: Orientation and Mobility Skills-Self Concept and Self Regulation

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada korelasi antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Subjek dalam penelitian ini adalah 27 anak tunanetra di lembaga pendidikan Tunanetra Bartemeus, Manado. Data yang dikoleksi meliputi ukuran keterampilan orientasi dan mobilitas diri, konsep diri dan regulasi diri, dianalisis dengan regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan: pertama, sumbangan konsep diri dan regulasi diri pada keterampilan orientasi dan mobilitas sangat signifikan. Kedua, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan keterampilan orientasi dan mobilitas. Ketiga, ada hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan orientasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas pada anak-anak tunanetra.

Kata Kunci: Keterampilan Orientasi dan Mobilitas- Konsep Diri dan Regulasi

Etty Padmiati (Peneliti Madya B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial)
Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah
Going to Social Resilience Society through Local Social Institution Empowerment in Central Kalimantan Province
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 263 - 275

Local Social institution empowerment as an effort to enhance and uphold the role and its function to build societal resilience, through giving treatment and means to society that represented by several local institution public figures, which in this context local social institution in Telangah Village, Katingan Ilir Regency, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. This research is meant to describe on the implementation of local social institution including its supporting and handicap factor. The reseaarch method used is qualitative descriptive, to know the achievement of the local social institution through giving an action to 30 local public figures and village apparatus. The effectivity of this empowerment program known through a measure comparing between pre and post treatment condition. The result shows that the empowerment targeted society understand on social resilience that indicated through steting an action planning and working program per division or indication, namely social protection for people with social welfare problem division, societal participation on social organization division, conflict control, and local wisdom on natural and social resources management division. The implementation of the working program goes as agreed together. The supporting factor on the implementation of the empowerment is the local government apparatus and the commitment of local public figures. The handicap factor is the limited condition of the local society social resilience forum to collect community fund, to build relation with related institution and corporation, so the outsourcing fund and joint venture have not been implemented. It is recommended that societal resilience forum can be taken as a partner for technical unit and regency social agency to implement social welfare program. So that the forum having an ability to operate the organization and existing program, guiding figures of the forum need an ability establishement by related institutions.

Keywords: Empowerment- Local Social Institution- Resilient Society

Pemberdayaan lembaga sosial lokal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, dengan memberikan perlakuan atau pembekalan terhadap masyarakat yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/aparat desa yang ada di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Ilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan lembaga sosial lokal, dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan, dengan memberikan perlakuan terhadap 30 orang wakil lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/aparat desa. Efektivitas perlakuan ini dapat dilihat dengan mengukur kondisi kelompok (penerima perlakuan) sebelum dan setelah diberi perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran pemberdayaan paham akan ketahanan sosial masyarakat yang ditandai dengan disusunnya rencana aksi atau program kerja per divisi or indikator, yaitu divisi perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, divisi partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, divisi pengendalian konflik, dan divisi kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Pelaksanaan program kerjanya tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah, dan juga kepedulian tokoh masyarakat. Faktor penghambat adalah keterbatasan Forum Tansosmas dalam menggali dana dari masyarakat, menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalian dana dari luar belum dapat dilakukan.Rekomendasi yang diajukan adalah bahwa forum Tansosmas dapat dijadikan mitra kerja lapangan oleh unit teknis dan Dinas Sosial Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Agar forum tersebut memiliki kemampuan menggerakkan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan, perlu pemantapan bagi tenaga pendamping oleh unit teknis terkait.

Kata Kunci: Pemberdayaan-Lembaga Sosial Lokal- Masyarakat Berketahanan Sosial

Haryati Roebyantho dan Setyo Sumarno (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)
Evaluasi Program Asistensi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODK Berat)
Evaluation on Social Assistance Program for Severe Disability
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 276 - 285

The Ministry of Social Affairs has been imposing a policies to protect persons with severe disabilities in an effort to fulfill the rights to improve their social welfare and protection with Minister's Decission Number: 68/HUK/2010 on guidelines for the implementation of social security for people with severe disabilities. The goal of the policy was to fulfill basic needs of persons with severe disabilities and increase awareness of the family and community. Trial policy was implemented from 2006 to 2011. During the 5-year trial, the policy had been able to provide assistance to 17,000 people. However, studies have not been done on the impact of policies and programs. Therefore, the Center for Social

Welfare Research did a quick research to know the success of the program. The research method was evaluative descriptive. Data collected through interviews, document analysis and focus group discussion. Respondents were determined from the cluster, consisting social service implementator; postal officials; surrogate parents; social guidance; Societal social workers (TKSM), in district and municipality/regence level. Respondents casted to evaluate the target figure program, such as surrogate parents of severe disabities; social guider; companion, community leaders and local postal officers in district, city/regence. The Analysis focused on communications policy implementation and the source and structure of organizatinl. The basic analysis of the program's impact are goal achievement, living need adequacy, and commitment growth of families and communities. It was found that the implementation of the policy has been less socialized at the executive level to lower level/ grassroots (village and policy beneficiaries). As a result, the knowledge of the policy reached only until the level of the city or regence implementator, though the implementation of the program has reached the target substancially. The policy impact is to improve the welfare of persons with severe disabilities and improve treatment and that therapy. On the other hand, there has been an increase in families and communities caring awareness for persons with severe disabilities. There has been a family need that has not been psychologically accomplished yet, namely assurance if there is a member of the family get sicked or pass away. Human resources in terms of competence and quality guidance does not refer the Social Welfare Regulatio Number 11 of 2009. It is recommended that is worth to create planned between Ministry of Social Affairs and Ministry of Health to provide a service in family-based therapy and home visit. Also, it needs a cordination between the Ministry of Social Affairs, Post Office, and local government to improve human resource development (social guidance and aid disbursment). Ministry of social affairs also ought to share with local governments for funding socialization program efforts to optimize objective performance, and a need to sharpen and refine the concept or criteria of persons with severe disabilities

Keywords: Evaluation-Social Assistance Policy-Severe Disability

Kementerian Sosial mengeluarkan kebijaksanaan dalam upaya memberikan perlindungan dan kesempatan dalam pemeliharaan sosial bagi orang dengan kecacatan berat melalui Keputusan Menteri Sosial No 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSODK Berat. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ODK Berat dan meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat. Ujicoba kebijakan tersebut dilaksanakan mulai tahun 2006–2011. Selama lima tahun ujicoba, telah mampu memberikan asistensi terhadap 17000 orang. Namun belum pernah dilakukan kajian tentang kebijakan dan dampak program tersebut. Oleh karena itu, Puslitbang Kessos melakukan *quick research* untuk mengetahui keberhasilan program. Penelitian bersifat deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok. Responden ditentukan berdasarkan kluster terdiri atas: Pelaksana di tingkat Dinas Sosial Provinsi, kabupaten/kota, petugas pos kabupaten/kota, wali ODK berat, pendamping provinsi, kabupaten/kota, TKSM. Responden dipilih untuk mengevaluasi sasaran program: wali ODK Berat, pendamping, tokoh masyarakat dan petugas pos kabupaten/kota, kecamatan. Analisis implementasi kebijakan fokus pada komunikasi, sumber dan struktur organisasi. Dasar analisis dampak program ditinjau dari pencapaian tujuan, pemenuhan kebutuhan hidup, tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat. Program JSODK Berat kurang disosialisasikan sampai di tingkat pelaksana *grassroot*

(kelurahan, pendamping dan penerima manfaat). Akibatnya, pengetahuan tentang program hanya sampai di tataran pelaksana kabupaten. Implementasi program secara substansi sudah mencapai sasaran. Dampaknya kesejahteraan ODK berat meningkat terutama dalam perawatan dan therapi. Di sisi lain, terdapat peningkatan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap ODK. Ada kebutuhan keluarga ODK secara psikologis belum terjangkau oleh program, yaitu jaminan dan perlindungan bagi ODK apabila keluarga sakit atau meninggal. Sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan kompetensi dan kualitas pendamping, belum mengacu pada Undang-undang No 11 tahun 2009. Rekomendasi sebagai dasar pilihan alternatif di antaranya diselenggarakan program terpadu antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian kesehatan dalam pelayanan terhadap ODK berbasis keluarga dan *home visit.* Koordinasi antara Kementerian Sosial dengan PT Pos, dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia (pendamping dan petugas penyalur bantuan). Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah untuk *sharing* dana sosialisasi program. Sebagai upaya mengoptimalkan implementasi program, perlu adanya penajaman konsep tentang kriteria ODK berat.

Kata kunci: Evaluasi-Kebijakan Asistensi Sosial-ODK Berat

Husmiati (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
Peranan Harga Diri sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Depresi dan Keberfungsian Sosial Internal Remaja
The Role of Self-dignity as Moderating Variable in Relationship between Depression and Youths' Inner Social Functioning
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 286 - 293

The main purpose of this study is to examine the significant influence of self-dignity as moderating vairable in the relationship between depression and youth's inner social functioning. A total of 121 youths dropout from school who received social rehabilitation program at Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) in Cimahi, Indonesia, in 2012, were selected as respondents through purposive technique. Research instrument was modified from standardized intrument such as: youth depression scale was modified from the generalized contentment scale; Youth self-esteem scale was modified from the Rosenberg Self Esteem Scal; and the inner social functioning scale was modified from inner-interaction social functioning scale. The results of this study found that the youths' self-esteem was a significant role as moderating variable in relationship between youth depression and their inner social functioning. Therefore, the youths' self-dignity factor is very important in addressing the youth problems especially depression that can be improved as their inner social functioning.

Keywords: Dropout Youths' Self-dignity-Depression-Inner Social Functioning

Tujuan utama penelitian adalah untuk menguji pengaruh peranan harga diri sebagai variabel moderasi dalam hubungan depresi dengan keberfungsian sosial internal remaja. Sebanyak 121 remaja putus persekolahan yang memperoleh pelayanan program

rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), di Cimahi, Indonesia, 2012, dipilih secara *purposive* sebagai responden dalam penelitian ini. Alat ukur dalam penelitian ini terdiri dari: skala depresi dimodifikasi dari *generalized contentment scale*; skala harga diri dimodifikasi dari *The Rosenberg Self Esteem Scale*; dan skala keberfungsian sosial internal dimodifikasi dari *Inner-Interaction Social Functioning Scale*. Hasil penelitian menunjukkan harga diri memainkan peranan yang signifikan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara depresi dengan keberfungsiaan sosial internal remaja. Dengan demikian maka faktor harga diri remaja perlu mendapat perhatian serius dalam mengatasi masalah remaja, khususnya depresi, agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Kata Kunci: Remaja Putus Sekolah-Harga Diri-Depresi-Keberfungsian Sosial Internal

Gunanto Surjono (Peneliti Utama B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial)
Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Pascabencana
Social Policy Forecasting on Post-disaster Risk Reduction Management
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 September 2013, hal 294 - 300

The reconstruction of disaster victim are very often ended when phenomenon of natural disaster ebbing away. But when the victim fell recontructed, actually the problem is starting, especially on how the ex-victims get economic resources to live on both entrepreneurship and job. The productivity of natural and human need to be revitalized to support the continuity of ex-victims and people in disaster prone area. The management of social policy on disaster risk reduction is united programs from several stakeholders, such as local and central government, corporations, and people in disaster prone area to revitalize economic resources for ex-victims and people, rehabilate infrastructure related to having disaster preparation, even to grow a new economic alternative based on natural disaster threat. By using interview with experts on disaster management, observation on disaster prone areas, and document analysis the research has been able to set an alternative forecasting of social policy on the management of pot-disaster risk management.

Keywords: Social Policy-Risk Reduction-Post Disaster

Pemulihan korban bencana, sering berhenti pada pemulihan kerugian jiwa, raga, dan harta korban setelah terjadinya bencana alam. Padahal, ketika korban pulih dari akibat bencana, permasalahan lain pascabencana yang mengikuti justru mulai, seperti upaya memulihkan sumber ekonomi bagi mantan korban, baik dalam bidang usaha maupun pekerjaan. Produktivitas alam dan manusia korban bencana membutuhkan revitalisasi ulang dalam rangka menopang keberlangsungan kehidupan korban dan masyarakat di daerah rawan bencana. Menejemen pengurangan resiko pascabencana merupakan gabungan kepentingan pemangku, seperti pemerintah daerah dan pusat, pengusaha, masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka merevitalisasi ekonomi bagi korban dan masyarakat di daerah rawan bencana, bahkan menumbuhkan alternatif ekonomi baru berbasis bencana alam. Melalui metode wawancara dengan beberapa ahli di bidang

menejemen pengurangan resiko bencana, observasi langsung di daerah rawan bencana, dan analisis dokumen, penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan alternatif tentang kebijakan sosial dalam rangka pengurangan resiko pascabencana.

Kata Kunci: Kebijakan Sosial-Pengurangan Resiko-Pascabencana

1

Optimalisasi Etos Kerja Petani *Sedulur Sikep* sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan
Optimization of Farmers Work Ethos Sedulur Sikep as Preventive Effort of Food Crisis

Adhi Surya Perdana
Kandidat Master of Science Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta
E-mail: adhi_surya_perdana@yahoo.com. HP +628567692123. Diterima 31 Mei 2013, disetujui 14 Agustus 2013.

Abstract

Research on work ethos, Sedulur Sikep Communities, done because is seen there is a tendency in the community that working as a farmer can pose a perception that someone has dignity value, spirit, resilience, and work skill away from lie and hold honesty highly through a sense of sincerity on farming, and a support to preserve farming sustainability, so that can be a dignity job to fulfill family and community food needs. The research result shows that work ethos is a drive and an effort to control and evaluate work through a hope and will on farming-activities selves sustain, so that the product gained can be done with responsibility as a real conduct application with an orientation and a goal, give positive value on farmers to prevent family and community food need crisis, and achieve family welfare.

Keywords:
Work Ethos-Sedulur Sikep Famers-Crisis Prevention-Family Food Needs

Abstrak

Penelitian etos kerja masyarakat *Sedulur Sikep* dilakukan karena melihat adanya kecenderungan seseorang melakukan aktivitas kerja sebagai petani dapat memposisikan suatu pandangan yang memiliki nilai luhur, niat, keuletan, dan keterampilan pekerjaan yang jauh dari kebohongan, dan menjunjung tinggi kejujuran melalui rasa setulus hati dalam bercocok tanam dan adanya dukungan melestarikan lingkungan pertanian untuk keberlanjutan masa mendatang, sehingga dapat menjadikan suatu pekerjaan mulia yang dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan khalayak. Hasil penelitian menunjukan bahwa etos kerja merupakan suatu dorongan atau usaha untuk melakukan kontrol kerja dan evaluasi melalui harapan dan keinginan untuk mandiri dalam bertani, sehingga hasil yang diperoleh dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sebagai bentuk aplikasi perbuatan nyata yang memiliki arah dan tujuan dan dapat memberikan nilai positif bagi petani untuk menanggulangi krisis kebutuhan pangan keluarga serta dapat mewujudkan keluarga sejahtera.

Kata Kunci:
Etos Kerja Petani-*Sedulur Sikep*-Krisis-Kebutuhan Pangan Keluarga

A. Kebutuhan Pangan dan Etos Kerja

Pangan merupakan pemenuhan dasar psikologis manusia untuk bertahan hidup, hal ini didasarkan pada realita yang menyatakan bahwa terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan didukung dengan kesehatan sehingga dapat menimbulkan kondisi hidup tentram, tenang dan damai pada setiap lapisan individu atau masyarakat luas serta dalam lingkup kecil pada keluarga. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan berbagai keluhan dan gejolak masyarakat yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas kenyamanan hidup keluarga sebagai suatu komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia (UU RI No 18 Tahun 2012) tentang pangan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus terus dilakukan dan perlu dilakukan monitoring secara berkala, mengingat kebutuhan pangan memiliki peran yang sangat strategis terkait dengan meningkatannya kualitas sumberdaya manusia melalui ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, seimbang, merata, serta dapat terjangkau oleh daya beli keluarga sehingga diharapkan dapat berusaha mandiri untuk memproduksi kebutuhan pangan pada kegiatan usahatani setiap musimnya.

Saat ini jumlah kepadatan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk BPS tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa, kemudian jumlah kepadatan penduduk Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2011 pada angka sementara proyeksi sensus penduduk (SP) tahun 2010 mencapai 32.643.612 jiwa, sedangkan Kabupaten Pati sejumlah 1.198.935 jiwa dengan kepadatan penduduk per km^2 804 jiwa (BPS, 2012). Pertambahan penduduk yang di Kabupaten Pati yang sudah menembus 1 juta jiwa mengakibatkan kebutuhan pangan kian meningkat sehingga diprediksi dapat menimbulkan krisis pangan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga diseluruh wilayah tempat tinggal dapat disesuaikan dengan pola makan dan keinginan konsumsi setiap lapisan keluarga, hal itu bukanlah tugas pokok yang mudah untuk diaplikasikan karena pada saat ini realita kehidupan sosial menunjukan bahwa pangan pokok penduduk Indonesia bertumpu pada satu sumber pangan yang mengandung unsur karbohidrat yang diprediksi dapat melemahkan ketersediaan pengadaan pangan pokok yang menjadi perhatian penting. Hal tersebut dapat terlihat dari pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan untuk pemenuhan makanan daerah perkotaan dan perdesaan tahun 2011 mencapai Rp 228.402 per kapita per bulan dengan kelompok barang tertinggi pada jenis makanan padi-padian yang mencapai Rp 40.251 per kapita per bulan. Keadaan kebutuhan pangan masih mengandung kerawanan, diakibatkan karena hanya bisa memenuhi bahan pangan karbohidrat pada keadaan pas-pasan sesuai pertambahan penduduk yang kian meningkat. Melihat pertambahan penduduk yang cukup besar untuk memperoleh bahan makanan maka diperlukan kehadiran petani lokal yang memiliki etos kerja yang mempunyai hubungan positif dengan produktivitas yang dihasilkannya yakni semakin tinggi etos kerja petani maka diharapkan akan semakin tinggi produktivitas pertanian yang dihasilkannya.

Etos kerja menggambarkan suatu semangat melakukan kegiatan pekerjaan. Petani memiliki motivasi melakukan pekerjaannya untuk tercapainya produktivitas pertanian yang optimal, sehingga etos kerja yang dimilikinya melekat pada petani. Persoalan pemenuhan ketersediaan pangan untuk semua warga sebaiknya dapat tercukupinya kebutuhan pangan melalui pendekatan etos kerja petani. Semangat kesadaran untuk mencukupi pangan yang berasal dari kekuatan sendiri akan menyamai jiwa patriotisme berbangsa dan bernegara. Sebenarnya seorang petani memiliki etos kerja yang tinggi, bayangkan saja ketika petani mulai menaburkan benih dilahan pertanian dia pun memikirkan benih yang taburkan ini agar dapat tumbuh, petani yakin bahwa benih yang ditabur akan tumbuh sehingga hal inilah yang mendorong petani dalam bekerja memiliki semangat kerja yang tinggi dan ketika benih tersebut tumbuh, petani berkeyakinan akan membuahkan hasil yang menguntungkan. Padahal usaha pertanian yang dilakukan oleh petani tidak bisa diketahui

saat proses bercocok tanam berlangsung, karena produktivitas pertanian yang optimal banyak yang dipengaruhi oleh faktor pelemah lain, saat petani mengawali usahatani tidak memikirkan produktivitas yang melimpah tetapi hanya melakukan usaha semaksimal mungkin, itulah prinsip petani yang memunculkan etos kerja. Petani tidak takut akan hujan atau panas ketika waktunya bertani dilahan garapan, hal itu merupakan tantangan bagi petani dalam rangka mencari kebutuhan hidupnya, demi anak dan keluarga yang diperjuangkannya bahkan pekerjaan yang dilakukan itu juga bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan khalayak umum. Etos kerja yang tinggi itulah yang patut kita contoh, seandainya kita semangat bekerja seperti itu maka hasilnya juga dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan pangan diri sendiri maupun keluarga.

Permasalahan pengkajian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana etos kerja masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai upaya menanggulangi krisis kebutuhan pangan keluarga? Bagaimana kemandirian masyarakat *Sedulur Sikep* di lahan garapan pertanian? Manfaat apa saja yang ditimbulkan dari etos kerja bertani yang dilakukan masyarakat *Sedulur Sikep*? Tujuan pengkajian adalah mengetahui etos kerja masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai upaya menanggulangi krisis kebutuhan pangan keluarga. Mengetahui kemandirian masyarakat *Sedulur Sikep* dilahan garapan pertanian. Mengetahui manfaat yang ditimbulkan dari etos kerja bertani yang dilakukan masyarakat *Sedulur Sikep*.

B. Petani, Etos Kerja, dan Kemandirian Kebutuhan Pangan

Petani sebagai Tenaga Kerja: seseorang tenaga kerja yang sebenarnya memiliki keinginan untuk meningkatkan sektor ekonomi yang menguntungkan melalui produksi pertanian berkelanjutan yang tidak akan habis guna mencukupi kebutuhan dasar manusia, namun ternyata ada juga petani yang kurang sejahtera dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena semakin terpinggirkannya petani dalam hal pembangunan, terlihat dari petani mengalami keterpurukan karena produksi yang terus menurun dan juga mengalami kelangkaan bibit, pupuk, sarana produksi dan sebagainya, sehingga petani umumnya mengalami kegagalan panen yang dampaknya dapat dirasakan oleh semuanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Petani bekerja dilahan garapan untuk meningkatkan usahatani melalui optimalisasi keputusan yang diambil oleh setiap petani selaku pengelola antara lain : menentukan pilihan dari berbagai jenis tanaman yang mungkin ditanam pada sebidang tanah, menentukan macam ternak yang sebaiknya dipelihara dan menentukan cara membagi waktu kerja diantara berbagai tugas, teristimewa pada saat-saat berbagai pekerjaan itu dilakukan serentak termasuk pula didalamnya menentukan pilihan tentang jenis dan jumlah kegiatan kerja yang harus dipelihara untuk pekerjaan di lapangan (Mosher, 1983). Petani sebagai seorang pelaksana usahatani (baik sebagai juru tani maupun sebagai pengelola) adalah manusia, yang disetiap pengambilan keputusan untuk usahatani tidak selalu dapat dengan bebas dilakukan sendiri, sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan disekelilingnya. Petani jika ingin melakukan perubahan usahataninya, dia juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh lingkungan sosialnya (Mardikanto, 1993).

Etos Kerja Petani: Pengertian etos kerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001), kata *etos* berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang bermakna watak atau karakter. Maka secara lengkapnya “etos” ialah karakteristik dan sikap, kepercayaan serta kebiasaan, yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Weber menyatakan bahwa manusia dibentuk oleh nilai-nilai budaya disekitarnya khususnya nilai-nilai agama, sehingga berdasarkan kepercayaan tersebut membuat orang-orang penganut agama protestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses (Budiman, 1996). Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta cara mengekpresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak (Tasmara, 2004). Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja, kalau pandangan dan sikap

itu melihat kerja sebagai hal yang luhur untuk eksistensi manusia, maka etos kerja itu akan tinggi; sebaliknya, jika melihat kerja sebagai suatu hal tak berarti untuk kehidupan manusia maka etos kerja menjadi rendah. Orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, cenderung menyukai pekerjaan dan memperoleh kepuasan darinya (Anoraga, 1992), hal itu sesuai dengan pernyataan Weber yang mengatakan bahwa ada kaitan antara perkembangan suatu masyarakat dengan sikap masyarakat itu terhadap makna kerja (Mubyarto dkk, 1993). Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pendapatan dan produktivitas adalah etos kerja dari individu yang berperan dalam usaha produksi, sebagai contohnya adalah seorang petani akan berhasil dalam usahataninya jika ia rajin merawat tanamannya, membersihkan gulma, menjaga tanaman dari hama, dan lain-lain oleh karena itu, perlu dikaji beberapa karaktersitik tenaga kerja yang bergerak dalam usaha produksi, yang meliputi aspek semangat kerja dan keuletan melakukan usahatani (Rusli dkk, 1995). Etos kerja dalam kegiatan penelitian ini memiliki defenisi kecenderungan melakukan aktivitas kontrol maupun monitoring penilaian individu untuk bekerja atau kegiatan berpengharapan yang dilakukan oleh petani dalam melakukan aktivitas bercocok tanam sebagai upaya menanggulangi krisis pangan keluarga.

Konsep Kemandirian Petani: Kemandirian secara harfiah memiliki pengertian sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Konsep kemandirian menurut Saragih (*dalam* Farid (2008) yakni mampu berusaha sendiri, kreatif, kerja keras, dan kompetitif dalam melakukan usaha. Keluarga mandiri di era globalisasi ini dapat tercapai jika ada dukungan oleh transformasi sosial budaya menuju masyarakat mandiri, sedangkan menurut Soesarsono dan Sarma (2004), secara sederhana kemandirian seseorang itu banyak ditentukan oleh tingkat kepercayaan dirinya atas apa yang harus dihadapi. Kemandirian untuk mampu bekerja mandiri (*self employment*) akan sulit dilakukan jika tidak terbiasa belajar, berlatih dan kerja mandiri yang memberi pengalaman sukses. Kemandirian adalah upaya seseorang yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan sumberdaya yang dimiliki sebagai semangat keswadayaan seperti ulet dan kerja keras (Raharjo, 1992). Rasionalitas, kreativitas, keberanian bersanding, etos kerja yang tinggi, efisiensi dalam berproduksi merupakan nilai-nilai penting, yang secara tekun dan terus-menerus perlu ditumbuh kembangkan oleh masyarakat setempat (Ginting, 2004). Masyarakat *Sedulur Sikep* memiliki hubungan antara manusia dengan lingkungan pertanian dimana tempatnya bekerja terjalin secara dekat dan erat, hal ini dikarenakan oleh kegiatan rutinitas mata pencahariannya sebagai petani yang mengakibatkan adanya kedekatan rasionalitas dan kreativitas etos kerja yang tinggi dengan lingkungan pertaniannya. Menurut Rosyid (2010), kodifikasi ajaran Samin dalam bentuk prinsip hidup yang terwariskan antar generasi secara lisan berupa aspek *roso lan rogo* (interaksi sosial). Aspek *roso* merupakan ajaran intern Samin, sedangkan aspek *rogo* meliputi prinsip hidup yang diwujudkan dalam prinsip mensikapi hidup dan harapan hidup untuk semangat bekerja.

Krisis Pangan Keluarga: Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 18 tahun 2012 sebagai pengganti UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan yang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan sehingga perlu diganti. Menurut UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD RI tahun 1945 sebagai dasar komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang berasal dari sumberdaya hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Lingkungan hidup, sebagai lokasi pertanian seyogyanya tetap menjadi tempat yang memberikan kenikmatan dalam arti yang luas bagi manusia untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Namun kenyataannya saat ini, masalah lingkungan hidup menjadi isu yang menimbulkan kegelisahan dan kecemasan. Orang saling menuduh dan melemparkan kesalahan sebagai penyebab rusaknya lingkungan hidup, malahan lingkungan hidup dilihat sebagai pengancam hidup manusia (Daeng, 2000 *dalam* Mumfangati dkk, 2004). Menyadari kait mengaitnya perbuatan manusia terhadap lingkungan dapat menimbulkan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keterbatasan ketersediaan pangan sehingga manusia perlu menata diri dalam menjalani hidup menuju masa mendatang. Manusia menjelang masa akan datang dihadapkan dengan faktor kritis pangan yaitu pertambahan laju kepadatan penduduk, produksi bahan pangan yang tidak secepat pertambahan kepadatan penduduk, menurunnya kemampuan sumber-sumber alam dan pencemaran lingkungan pertanian yang mengakibatkan menurunnya minat kerja petani. Semangat kerja dan tanggung jawab sosial untuk bertahan hidup dapat mendorong usaha manusia mengatasi faktor kritis pangan pada setiap lapisan keluarga.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *fenomenologi*. Penelitian *fenomenologi* bertujuan untuk membangun hubungan baru melalui pengalaman orisinil agar dapat menjelaskan makna-makna yang tersaji di dalam jalinan pengalaman itu sendiri (Raingruber 2003), variasi yang diteliti dan fenomena yang terjadi saat keberadaan peneliti dilokasi sehingga diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian secara apa adanya sesuai yang ditemukan dilapangan. Lokasi penelitian di sekitar Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah dengan fokus daerah penelitian di Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo. Alasan pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena sebagian besar masyarakat *Sedulur Sikep* di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani dengan etos kerja yang tinggi. Sumber data penelitian berasal dari informan yang ditentukan secara *purposive sampling* (secara sengaja) sebanyak delapan orang masyarakat *Sedulur Sikep*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, *focus group discussion* (FGD) digunakan agar informasi yang diteliti dapat diterima dengan seksama dan mendalam kemudian didukung oleh dokumentasi penelitian lapangan yang telah dilakukan secara langsung.

D. *Sedulur Sikep* dan Etos Kerja Petani

Kondisi Demografis Penelitian: Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo terletak di sekitar Pegunungan Kendeng yang berada di Kecamatan Sukolilo. Batas administratif Desa Baturejo yakni Kabupaten Kudus (sebelah Utara); Desa Wotan (sebelah Barat); Desa Gadudero (sebelah Timur) dan Desa Sukolilo (sebelah Selatan), sedangkan batas administratif Desa Kedumulyo yakni Desa Kasiyan dan Desa Cengkalsewu (sebelah utara); Desa Gadudero (sebelah Barat); Kecamatan Kayen (sebelah Timur) dan Desa Tompegunung (sebelah Selatan). Luas lahan sawah menurut cara pengairan irigasi tahun 2011 dalam satuan hektar (ha), Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo masing-masing memiliki sawah irigasi teknis seluas 643 ha dan 100 ha kemudian lahan sawah tadah hujan seluas 281 ha dan 283 ha. Umumnya masyarakat *Sedulur Sikep* bermata pencaharian sebagai petani.

Karakteristik Masyarakat *Sedulur Sikep* Sebagai Petani: Masyarakat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo dan Desa Kedumulyo merupakan masyarakat desa yang memiliki kriteria ada tokoh yang dituakan, lokasi tempat tinggal mereka dengan pusat ibu kota Kabupaten Pati sejauh 27 kilometer, interaksi sosial yang dilakukan antarindividu memiliki keeratan kebersamaan baik dengan anggota keluarga satu dengan lainnya maupun dengan masyarakat bukan *Sedulur Sikep*, keluarga menjalani aktivitas pertanian dengan strata sosial yang relatif sama. Masyarakat *Sedulur Sikep* bermata pencaharian sebagai petani, dimana masyarakat sederhana

memiliki pedoman yang masih dijalankan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara petani dan lingkungan pertaniannya. Mereka menganggap bahwa manusia merupakan bagian dari alam tempat dimana tanah ini dipijak, sehingga diharapkan dapat tercipta pertanian berkesinambungan untuk generasi yang akan datang.

Hal itu dapat dilihat dengan jelas dilapangan, dimana mereka tidak mengeksploitasi lahan pertanian. *Musim tanduran neng kene setahun dua kali ditanduri pari lan palawija, setahun ne ping pindho kuwi biasane nek wis mulai kaya ngene musim tanam pertama sasi sewelas tandur, terus akhir musim kedua sekitar Mei. Lah, kuwi bar musim tanam kedua biasane kadang dulur-dulur isih isa ditanduri palawija karo nunggu sampe banyu medhun di antara bulan sembilan. Ning, mulai Mei sampai Bulan Sembilan kuwi, bapake milih garapan ne ora ditanduri. Merga supaya garapan ne ambi leren, tegese diumpamana ne lemah niki, ya, wong. Wong, ki, ya, dikon nyambut gawe terus, ya, kesel. Ben ana leren ne ketika sesuk iki wis leren 'ko ditanami musim pertama meneh lemah, ki, wis tuwa, dadi ne cara tenaga wong, ya, leren dise. Ora ditanduri terus, pin, pindho* (Musim tanam disini setahun ditanami dua kali yakni tanaman padi dan palawija. Setahun sekarang ini biasanya sudah mulai ditanami musim pertama pada bulan November tahun lalu, terus akhir musim kedua sekitar Mei ditanami lagi. Kemudian setelah musim kedua selesai, kadang orang lain masih ditanami dengan palawija lagi, sekalian menunggu air turun hingga bulan September. Namun mulai bulan Mei sampai September, biasanya bapak sebagai kepala rumah tangga memilih lahan garapan untuk tidak ditanami. Agar lahan sawah/ladang bisa istirahat, tegasnya seperti diumpamakan tanah adalah orang. Orang ini disuruh bekerja setiap waktu tanpa istirahat, maka yang dirasakan kelelahan. Supaya ada waktu istirahat untuk tanah hingga musim pertama tiba, untuk mengembalikan stabilitas kesuburan tanah, jadi serupa dengan orang bekerja maka adakalanya untuk istirahat. Tidak ditanami/dipaksa bekerja setiap musim tanam).

Adanya pendapat dari masyarakat *Sedulur Sikep* secara tidak langsung dalam kehidupan bercocok tanam menjadi semacam aturan yang sewajarnya ditaati, sehingga aktivitas pertanian mereka lakukan akan selalu berhati-hati, menghargai keberadaan tanah dan memperhatikan keberlanjutan produksi pertanian agar panen yang dihasilkan tetap pada kategori baik. Mereka menghindari perbuatan yang bukan wewenangnya sebagai faktor penyebab rusak atau menurunnya kesuburan tanah sebagai penghambat keberlangsungan bercocok tanam untuk turunannya. Cara masyarakat *Sedulur Sikep* menjaga mata pencahariannya sebagai petani seperti pesan orang tua mereka "*Pertanian kanggo nandur, wong neng deso nek kanggo kebutuhanne wong mangan, ya, tetep ikut carane lemah garapan niku, dadi upomo wong tuwa ora ana kanggo anak putu"* (Pertanian sebagai tempat bercocok tanam, orang desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bertani di lahan sawah/ladang masih tetap dijalankan sebagai petani. Jika orang tua sudah meninggal dunia nanti, harapannya dapat mewarisi pertanian kepada anak cucu berikutnya). Mata pencaharian utama masyarakat *Sedulur Sikep* itu hanya bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang dan papan), sehingga diperlukan kerja keras untuk mempertahankan lahan pertanian agar tetap pada fungsinya sebagai lahan pertanian yang optimal kemudian mendinamisasikan kesuburan tanah dan terakhir adalah terjaganya tradisi pekerjaan turuntemurun bercocok tanam sebagai penopang kehidupannya menjadi seorang petani.

Etos Kerja Mewujudkan Kemandirian Petani: Etos kerja menggambar kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang memiliki makna sebagai kontrol maupun monitoring penilaian individu untuk bekerja, sehingga etos kerja dapat dikategorikan tinggi dan rendah. Mengingat uraian etos kerja yang dituliskan, maka dapat dibuat kriteria etos kerja petani untuk mewujudkan kemandirian masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai petani yaitu memposisikan pandangan untuk melakukan sesuatu dibidang pertanian yang memiliki nilai-nilai luhur, apabila mempunyai niat, keuletan serta keterampilan mengolah lahan pertanian maka akan dianugerahkan kemudahan dalam menjalani kehidupan yang dikarenakan petani sebagai relawan kemanusiaan yang bersedia bekerja keras dengan

keringatnya untuk menyediakan bahan pangan manusia dan mahluk hidup lainnya; masyarakat *Sedulur Sikep* menilai bahwa petani merupakan mata pencaharian utama untuk bertahan hidup; bertani di tanah garapan merupakan kegiatan yang bermakna penting untuk terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan keluarga, bekerja sebagai petani merupakan pengamalan aktivitas mulia "petani tidak takut kehujanan atau kepanasan ketika berada di tanah garapan" bahkan pekerjaan yang mereka lakukan dapat menghidupi khayalak umum dari berbagai kalangan; bekerja sebagai petani merupakan pekerjaan yang jauh dari kebohongan dan sesuai dengan ajaran mereka yang menjunjung tinggi berperilaku jujur; kemudian terakhir bekerja sebagai petani tidak lepas dari bercocok tanam untuk merawat dan memelihara tanaman pangan memerlukan proses yang tidak sebentar sehingga pekerjaan yang dilakukan di tanah garapan selalu dilakukan setulus hati sewaktu persemaian setelah itu merawatnya hingga tumbuh berkembang, melindungi tanaman dari bahaya hama/organisme penggangu dan penyakit tanaman yang memerlukan ketekunan, berkeyakinan dan penghayatan hidup yang akan membuahkan hasil panen untuk mewujudkan harapan produkvitas pertanian yang optimal.

Semangat bekerja masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai petani akan menjadikan sumber dorongan internal dari dalam bagi kegiatan yang dilakukannya. Tantangan kehidupan petani yang ingin mengoptimalkan hasil pertanian untuk kebutuhan pangan, dapat dijawab dengan kerja keras setulus hati mewujudkan kemandirian petani. Kerja keras sebagai bentuk etos kerja memiliki arti luas terkait bentuk usaha maupun kegiatan lainnya yang dilakukan manusia, baik secara pengeluaran materi maupun non materi yang bersifat gagasan/ide nilai budaya dan fisik/tenaga manusia. Kualitas etos kerja masyarakat *Sedulur Sikep* yang terlihat dilapangan, ditentukan oleh sistem orientasi ajaran budaya *Sedulur Sikep* yang memiliki sistem ajaran budaya maju yang akan mendapatkan etos kerja yang tinggi sehingga kerja keras yang dilakukan merupakan dorongan tanggung jawab sebagai aplikasi perbuatan nyata disamping itu memiliki arah dan tujuan yang dapat memberikan nilai positif bagi pelaku yang melakukan aktivitas bertani. Etos kerja dapat dijadikan keteladanan dalam melakukan pekerjaan seutuhnya, cukuplah lakukan tindakan yang sederhana dan tepat sasaran mewujudkan keluarga sejahtera.

Kemandirian Petani sebagai upaya Penanggulangan Krisis Pangan Keluarga: Kemandirian seorang petani adalah kecenderungan melakukan aktivitas atau kegiatan yang mengutamakan keterampilan dan pengalaman bercocok tanam/bertani di lahan garapan dalam mengatasi dan mengupayakan pemecahan masalah pertanian guna tercapainya tujuan dan keberhasilan usahataninya, tanpa membatasi berbagai kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Dorongan ingin bekerja mandiri merupakan tujuan dari proses kemandirian yang tidak lepas dari keuletan, disiplin, pantang menyerah dan bekerja keras menjalani kegiatan bertani. Kemandirian petani masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai upaya menanggulangi krisis pangan keluarga dapat berupa usaha memperbaiki tingkat kesuburan tanah kelebihan pemakaian pupuk kimia yang menyebabkan produksi pertanian semakin menurun dan adanya dorongan ingin bekerja keras untuk mengembalikan tanah menjadi subur dan produktif, "*Lemah garapan pertanian oper dosis kimia, aku tertarik, ya, ne isa ana sewa, ya, tak sewa, ya, ora ana, ya, tak buruh. Langsung ora harus teori, ya, langsung praktek nek lemah garapan. Wong aku, ya, tak gawe werna-werna, mulai uyuh sapi, uyuh wedhus, banyu kelapa, sepet tak kum, ya, wis nganu barang-barang sing anggep, ne, wong ora ana regane dadi neng kana sing dimanfaatke. Misal nganti saiki isih ana kanggo wong sing ngudi, la, ne, kene ora luruh dhuwit jane kiro-kiro sing ngula, na, wereng apa?. Langsung kangelan berkarya piye carane ngula, na, wereng"* (Tanah pertanian yang mengalami over dosis, saya tertarik menggarapnya jika bisa di sewa maka saya akan sewa, sebaliknya jika tidak disewa maka saya akan bekerja menjadi buruhnya untuk memperbaiki tanah garapan secara langsung tanpa harus teori, langsung praktek di tanah garapan. Saya memiliki kemampuan/keterampilan yang beranekaragam untuk memanfaatkan urine sapi, urine kambing, air kelapa dan serabut

kelapa yang menurut banyak orang tentang barang-barang tersebut tidak ada harganya jadi itulah yang saya manfaatkan. Contohnya sampai sekarang saya masih ada keinginan untuk bekerja keras/ulet, karena tidak memiliki banyak biaya untuk mengatasi hama wereng seperti apa?. Maka saya langsung berupaya berkarya mencari jalan untuk mengendalikan hama wereng).

Kemandirian petani dalam mengatasi hama penyakit tanaman pangan merupakan bentuk kemampuan dan pengalaman petani untuk bercocok tanam di tanah garapan, seperti memproduksi pestida organik yang berasal dari urine hewan ternak, air kelapa dan serabut kelapa, bagi kebanyakan orang tidak banyak memanfaatkannya bahkan menjadi limbah yang tidak bermanfaat. Namun etos kerja petani yang tinggi mengupayakan berkarya dari limbah hewan ternak, air kelapa dan serabut kelapa agar dapat berubah fungsi sebagai pestisida organik yang ramah lingkungan. Dimana terdapat usaha individu dalam aktivitas usahatani dan peningkatan pemanfaatan limbah organik dengan menggunakan teknologi sederhana yang lebih murah dan efisien, baik secara teknologi biologis maupun pengurangan limbah sampah organik yang terbuang begitu saja. Menempatkan lingkungan pertanian dan petani sebagai tatanan kehidupan sosial yang telah terbentuk dari corak-corak mendasar dalam kebudayaan manusia setempat (Pals, 2011). Dibutuhkannya orang-orang kreatif yang ulet sebagai inovator dan mampu bertahan dihidup dengan menguasai diri sendiri maupun keluarganya yang mana orang tersebut membawa nilai-nilai atau pengaruh sosial masyarakat beserta lingkungan pertanian, hal tersebut telah dikatakan oleh W.I. Thomas dan F. Znaniecki *dalam* Giddens dkk (2004) yang menjelaskan tentang interaksi yang berkesinambungan antara individu dengan lingkungannya ini tidak bisa dikatakan bahwa individu adalah hasil (produk) dari lingkungannya atau individu yang menghasilkan lingkungannya. Namun kedua-duanya dapat menjadi individu sebagai produk dan sekaligus produsen atas nasibnya sendiri. Hal tersebut jelas menerangkan bahwa adanya daya yang berkesinambungan antar keduanya terkait kemampuan manusia beradaptasi untuk memelihara lingkungan hidup pada usaha pertanian guna memenuhi penyediaan bahan pangan bagi keluarganya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan untuk khalayak umum lainnya.

Pengembangan pengalaman lokal sebagai upaya kemandirian petani mengatasi krisis pangan keluarga untuk melakukan aktivitas praktis pada berbagai pengharapan usahatani yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas praktis merupakan intelektualisasi dari ide pribadi, dimana muncul dari keadaan lingkungan sekitarnya sehingga lahirlah rasionalitas yang berasal dari pengalaman lokal dan mampu menciptakan langkah-langkah baru mengatasi permasalahan usahatani lokal yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya menggunakan akal pikiran yakni mencari cara bagaimana tercukupinya kebutuhan pangan dengan beradaptasi bersama lingkungan pertanian, dimana hal tersebut dapat terwujud dalam kebudyaan masyarakat *Sedulur Sikep.* Tanah garapan sebagai tempat bercocok tanam yang merupakan salah satu indikator kehidupan sosial, dimana sumber kehidupan petani ada di tanah garapan. Ketersediaan benih berasal dari hasil panen sendiri seperti tanaman padi "*Aku biasane, ya, misahna seka tak panen ngono kui tak pilahi, terus sadurunge dijikoi wong 'kan wis tak pilih. Cara nyimpen, ya, barang nilen, ne, lewih garing, terus dikarungi dise*" (Saya biasanya saat panen memisahkan benih yang akan ditanam di tanah garapan, sebelum dipotong saat panen. Kemudian cara menyimpan benih dijemur hingga kering dilanjutkan dikarungi untuk disimpan). Usaha pemenuhan benih padi yang dilakukan sudah mencermin kemandirian petani mendapatkan benih secara mandiri, untuk mengurangi pengeluaran biaya pembelian benih ke agen penjualan benih pertanian, sehingga dapat dikatakan sebagai petani mandiri yang terus berusaha untuk tidak tergantung pada benih komersil yang diperjual-belikan di agen pertanian.

Keberhasilan dari usahatani adalah panen yang optimal, sehingga dapat menghasilkan 700 kg padi mentik wangi organik untuk di konsumsi dan sisanya dapat dijual. Adanya pengolahan panen maupun pascapanen "*Nek aku panen*

miturut kebutuhan nuju butuhku lan keluwarga. Cukup tak gawa mulih, tak garingna, tak pepe lagi ko ketaao butuh keluwarga" (Kalau saya panen, maka menyesuaikan dengan kebutuhan saya dan keluarga. Cukup saya bawa pulang, kemudian dijemur sampai kering terus dilanjutkan kembali menyesuaikan kebutuhan keluarga). Cara memanfaatkan hasil panen tanaman pangan "*Bar teko garapan ngono kae, ne pelatarane nganggu yo tak pepe nganti garing terus dikarungi ya disimpen, ne upama sawayahe butuh dijipuk satithik dise. Umpamane butuh dilong didol sawayeh cukup pirang karung.*" (Setelah dari tanah garapan, jika pelataran rumah tidak dipakai maka digunakan untuk menjemur gabah sampai kering terus dikarungi dan disimpan, umpamanya butuh untuk konsumsi diambil sedikit terlebih dahulu, kemudian jika butuh untuk dijual hanya beberapa karung saja). Kebutuhan pangan keluarga sangat diperhatikan secara baik dan bijaksana, sehingga harapannya cadangan pangan yang dimiliki keluarga dapat tersedia dengan baik kemudian jika membutuhkannya dapat mengambilnya ditempat penyimpanan gabah.

Penyimpanan gabah hasil panen dilakukan melalui cara seperti "*Ya, diganjel luwih dhuwur, gabah dikarungi bareng sekam tekan rambut sing slepan*" (Ya, diganjal agar lebih tinggi, kemudian gabah dikarungi bersama dengan sekam yang berasal dari penggilingan padi). Masa simpan gabah yang dilakukan dapat bertahan selama satu tahun, melalui cara sederhana yang tidak mudah cepat busuk jika kelamaan disimpan. Bersamaan kaitannya dengan hal tersebut maka segenap daya upaya pengalaman dan keterampilan petani *Sedulur Sikep* berusaha untuk mengolah dan mengatur usahatani hingga pascapanen untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan sekaligus mempertahankan keberlanjutan usahataninya sebagai upaya menanggulangi krisis pangan keluarga.

Kemandirian petani untuk semangat bekerja, tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas bertani agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan untuk menjadi lebih baik yang terbukti apresiasi penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian PBB (FAO) akan diberikan kepada Indonesia atas keberhasilannya menurunkan kemiskinan dan kelaparan masyarakat disamping mampu meningkatkan produksi pangan. Penghargaan FAO diserahkan di Roma, Italia pada pertengahan bulan Juni 2013 (Sumber www.antaranews.com).

E. Rangkuman

Kesimpulan: Etos kerja yang menjelaskan tentang kecenderungan untuk melakukan aktivitas tertentu yang mana dapat memberikan kontrol dan monitoring penilaian individu untuk bekerja keras dan ulet. Masyarakat *Sedulur Sikep* pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, mengingat etos kerja dapat mewujudkan kemandirian untuk pemenuhan kebutuhan pangan, maka ada pandangan untuk dapat melakukan aktivitas pertanian yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan keterampilan dari kebudayaan masyarakat *Sedulur Sikep*; petani sebagai relawan kemanusiaan yang bersedia bekerja keras; pekerjaan sebagai petani sangat jauh dari kebohongan sesuai dengan ajaran mereka yang menjunjung tinggi kejujuran; dan bekerja sebagai petani dilakukan setulus hati karena berhubungan dengan tanaman yang memiliki jiwa yang tumbuh berkembang kemudian menghasilkan produksi pangan dan tanah garapan sebagai tempat bercocok tanam yang memerlukan perhatian alamiah secara organik. Semangat kerja masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai jawaban dari tantangan kehidupan petani sehingga bermanfaat untuk mengoptimalkan hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan. Kemandirian petani *Sedulur Sikep* sebagai upaya menanggulangi krisis pangan keluarga melalui pengembangan pengalaman lokal yang memiliki pengharapan usahatani yang diperoleh agar menghasilkan tanaman pangan yang optimal dan bermutu baik seperti ketersediaan benih berasal dari hasil panennya sendiri, mengatasi hama penyakit tanaman menggunakan pestisida organik, hasil panen yang peroleh dibawa pulang kemudian disimpan dengan cara sederhana dan mampu bertahan selama satu tahun, jika merasa butuh untuk makanan pokok keluarga maka akan mengambilnya dari tempat penyimpanan gabah keluarga dan apa-

bila ingin dijual gabah hasil panennya, hanya mengambil hasil panen sebagian dari produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan keluarga saat itu.

Saran: Melakukan peningkatan kesadaran etos kerja petani untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan dan mempersiapkan kemungkinan krisis pangan yang mengakibatkan asupan gizi yang rendah, jika hal tersebut terjadi didalam keluarga maka akan mengakibatkkan kelaparan, turunnya tingkat kecerdasan anak beserta anggota keluarganya dan dapat menyebabkan terganggunya stabilitas diberbagai bidang pada suatu bangsa. Peningkatan etos kerja petani yang optimal dan berkesinambungan diharapkan dapat menjadi contoh panutan melalui peningkatan kesadaran moral, perilaku agar lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi krisis kebutuhan pangan keluarga.

Pustaka Acuan

Anoraga, P. 1992. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Nasional (Bappenas). 2010. *Kajian Evaluasi Revitalisasi Pertanian dalam Rangka Peningkatan Kesejateraan Petani.* Laporan Akhir. Jakarta: Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Katalog BPS: 3101015. BPS Indonesia.

Budiman, Arif. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Farid, Abdul. 2008. *Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan Usahatani : Kasus Petani Sayuran di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Pasuruan*. Disertasi. Bogor: IPB

Giddens, Anthony., Daniel Bell, Michel Force, etc. 2009. *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Terjemahan. Bantul-Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.

Ginting, E. 2004. *"Transformasi Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Mandiri" dalam Pembangunan Masyarakat Mandiri.* Prosiding Seminar Lokakarya Nasional, Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Bogor: IPB.

Mosher, A.T. 1983. *Menggerakan dan Membangun Pertanian; Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi.* Jakarta. Yasaguna

Mubyarto, L. Soetrisno., E. Djatmiko, Sulistyo, I. Setiawati, A. Mawarni dan N. Sri Rejeki. 1993. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.

Mumfangati, Titi, Gatut Murniatmo, W. Pantja Sunjata, Sri Sumarsih, Endah Susilantini, dan Christriyati Ariani. 2004*. Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin,* Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Pals, Daniel L. 2011. *Seven Theoris of Religion*. Terjemahan. Yogyakarta: Ircisod.

Raingruber, B (2003). '*Video-cued narrative reflection: A research approach for articulating tacit, relational, and embodied understandings'*, Qualitative Health Research, 13(8): 1155–1169.

Rahardjo, D. 1992. *Keswadayaan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3ES

Rosyid, Moh. 2010. *Kodifikasi Ajaran Samin.* Yogyakarta: Kepel Press.

Rusli, S., A. Daryanto, Sumardjo, Hartoyo, H.K. Daryanto, dan N. Tinaprilla.1995. Kajian Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*) di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Jakarta: Grasindo.

Soesarsono dan Ma'mun Sarma. 2004. *Sekilas Kewirausahaan : Tantangan Mandiri*. Bogor: Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan. IPB.

Tasmara, T. 2004. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

http://www.antaranews.com/berita/376865/*fao-beri-penghargaan-kepada-indonesia*. didownload pada hari Senin 27 Mei 2013 jam 20.10 wib.

2

Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model
Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication

Daud Bahransyaf dan Ratih Probosiwi
Peneliti Madya dan Staf B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Nitipuran, Yogyakarta. Telpon (0274) 337265, Fax (0274) 373530.
Email: [1]daudbram@gmail.com dan [2]ratihprobo@yahoo.com. Diterima 18 Juni 2013, disetujui 23 Juli 2013.

Abstract

As the expansion area, Serakapi Village needs to get facilities to support the development as its main area, Saneo Village. Strengthening human resources needed to run the village development programs by local social institutions in an attempt to embody social resilience. Through the Development of Village Social Resilience Model, that has been implemented by the Ministry of Social Affairs, social resilience in Serakapi Village was studied of its supporting and handicap factors. The results showed that the formed forum, namely Sabua Ade, had clear organized and planned in the division of social protection, community participation, social conflict prevention, and local wisdom development. This forum has been running well according to the plan despite one issue, funding problem. It's recommended that community social resilience model should be aplicated in other regions by respecting the typology and character of the villages.

Keywords:
Human Resources Strengthening–Rural Development–Social Community Resilience

Abstrak

Sebagai daerah pemekaran, Desa Serakapi perlu mendapatkan fasilitas untuk mendukung pembangunan seperti daerah induknya, Desa Saneo. Diperlukan penguatan SDM lokal untuk menjalankan program pembangunan desa melalui kelembagaan sosial lokal sebagai wujud pembangunan ketahanan sosial. Melalui implementasi *action research* replikasi model pengembangan desa berketahanan sosial yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, Desa Serakapi dikaji faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum Tansosmas yang terbentuk, yaitu Sabua Ade, telah diorganisasikan dan direncanakan dengan baik dalam divisi perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian konflik sosial, dan pengembangan kearifan lokal. Forum ini telah berjalan baik sesuai rencana walaupun terdapat kendala pendanaan. Direkomendasikan untuk melakukan replikasi model ini di wilayah lain dengan mempertimbangkan tipologi dan karakter desa.

Kata Kunci:
Penguatan SDM–Pembangunan Desa–Ketahanan Sosial Masyarakat

A. Ketahanan Sosial: Sebuah Pemaknaan

Ketahanan sosial merupakan kemampuan suatu komunitas dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Justika Baharsyah (1999), bentuk ketahanan masyarakat di masa depan adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap total pelayanan sosial yang dinamis, sensitif dan komprehensif, terbentuknya sistem pengembangan sosial untuk masing-masing individu sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian otomatis terhadap perubahan sosial yang sangat cepat, sambil meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan hak asasi universal. Ketahanan sosial, seperti juga adanya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional, merupakan suatu konsep yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial (yang kemudian disebut sebagai empat indikator ketahanan sosial masyarakat).

Fenomena empirik di masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini ke empat komponen indikator tersebut mulai luntur, sebagai akibat perubahan atau pengaruh globalisasi. Diperkirakan faktor kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap melemahnya ikatan kesetiakawan sosial, sehingga perlindungan dan partisipasi sosial terkikis dalam penghidupan dan kehidupan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Masyarakat relatif mudah terpicu konflik sosial, karena aspirasinya tidak diterima oleh elite politik dan atau pemerintah, yang diungkapkan dengan demonstrasi anarkis, pengrusakan sarana dan fasilitas umum/pemerintah. Nilai dan norma agama dan budaya lokal yang selama ini merupakan kearifan lokal, juga memudar di masyarakat.

Dalam hubungan ini ketahanan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat/komuniti sangat dibutuhkan. Suatu komuniti memiliki ketahanan sosial bila mampu melindungi secara objektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2003). Berdasarkan konteks di atas, maka pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan sosial lokal dan jaringan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis baik melalui pendekatan kelembagaan maupun pendekatan fungsional kultural agar mampu meningkatkan daya tahan sosial masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat akan tercipta bilamana suatu kondisi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membentuk sistem pengembangan sosial dan adaptasi sosial, sehingga berkemampuan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial dalam pembangunan sosial.

Implementasi terwujudnya desa berketahanan sosial, dilakukan di Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam bentuk replikasi model "Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial" yang terdapat di masyarakat atau komunitas lokal berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2006. Desa Serakapi dipilih secara purposif, selain direkomendasikan oleh Dinas Sosial setempat, Desa Serakapi merupakan pemekaran Desa Saneo pada tanggal 19 Mei 2010, dengan alasan wilayah desa terlalu luas. Desa ini secara definitif ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2012, dengan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Maret 2012 dan dilantik secara resmi pada tanggal 19 April 2012. Sampai dengan bulan Mei 2012, struktur organisasi desa Serakapi sudah terbentuk, namun kantor desa belum terwujud. Dengan segala keterbatasan yang dihadapinya, Desa Serakapi dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Proses pemberdayaan masyarakat masih memulai pergerakannya, dengan usia yang masih sangat muda dan fasilitas yang terbatas, desa ini berusaha membangun wilayahnya paling tidak sejajar dengan desa induknya. Dibutuhkan pemenuhan fasilitas-fasilitas dan sumber daya untuk mendukung usaha ini. Penerapan model pengembangan desa berketahanan so-

sial di wilayah ini diharapkan mampu membantu desa. Penelitian ini mencoba mengetahui implementasi atas replikasi model yang dilakukan di desa ini selain juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan replikasi model ini.

B. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya merujuk pada penguatan daya (*empowering*), yaitu peningkatan kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*) (Melly G. Tan, 1977). Kinerja dan replikasi pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yang mengacu Kepmensos RI Nomor12/HUK/2006 dapat dicermati dalam dua bentuk kinerja, yaitu kinerja proses (*process performance*) dan kinerja hasil (*outcome performance*) dari pemberdayaan itu sendiri.

Kinerja proses dalam penelitian ini adalah pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yaitu fungsionalisasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial lokal yang terdiri atas kegiatan: memperkenalkan ketahanan sosial masyarakat ke desa oleh tim peneliti dan para fasilitator; menumbuhkan kelompok ketahanan sosial masyarakat di desa; identifikasi potensi, sumber, dan masalah sosial yang terdapat di desa tersebut oleh kelompok ketahanan sosial masyarakat; menyusun rencana aksi setelah menganalisis prioritas masalah sosial yang dipilih dan organisasi kerja kelompok ketahanan sosial masyarakat; dan implementasi rencana aksi kelompok ketahanan sosial masyarakat bersangkutan. Kinerja hasil pemberdayaan kelembagaan sosial lokal dinilai dari terwujudnya desa berketahanan sosial dalam dimensi indikator ketahanan sosial masyarakat yaitu: perlindungan sosial kelompok rentan; peningkatan partisipasi masyarakat; pengelolaan konflik sosial/tindak kekerasan di tingkat lokal; dan pemeliharaan kearifan lokal.

Konsep lembaga sosial selanjutnya digunakan dalam penelitian ini meskipun model yang direplikasi adalah pemberdayaan pranata sosial. Hal ini disebabkan lembaga yang ada di masyarakat desa lebih dipandang secara sosiologis. Pranata sosial lebih banyak digunakan dalam tataran antropologis yang lebih membutuhkan kejelian dan waktu yang lama dalam pengkajiannya. Konsep lembaga sosial dirasa lebih sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memberdayakan masyarakat desa melalui badan atau organisasi yang menjalankan sistem norma atau aturan mengenai aktivitas masyarakat (pranata). Pranata sosial sifatnya lebih konseptual, dimana eksistensinya hanya dapat dipahami secara imajinasi dan nalar sebagai konsep yang ada dalam pikiran.

Secara sosiologis, lembaga sosial merupakan sistem norma yang memiliki tujuan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Mengacu pada Kepmensos RI Nomor 12/HUK/2006, kelembagaan sosial lokal adalah suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat lokal. Kelembagaan sosial lokal berfungsi sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku menghadapi permasalahan kehidupan dalam masyarakat lokal, menjaga keutuhan masyarakat (integrasi), sebagai kontrol sosial. Pandangan lain mengungkapkan bahwa kelembagaan sosial lokal merupakan sistem nilai dan norma yang berwujud pada pendirian organisasi sosial sebagai sentra warga masyarakat lokal menjalankan hak dan kewajiban ketika mengimplimentasikan nilai dan norma sebagai acuan kehidupan bersama (Rusmin Tumanggor, 2006).

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, yaitu individu, keluarga dan komunitas, memungkinkan untuk melakukan tindakan/aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (*quality of life and wellbeing*). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan kelembagaan sosial lokal dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/*stakeholders*). Menurut Harry Hikmat (2004) kondisi tersebut dapat ditunjukkan melalui aktualisasi diri (ekspresi diri yang dihargai dan dijadikan pertimbangan keputusan kelompok) dan koaktualisasi eksistensi (adanya aktualisasi bersama dalam kelompok berimplikasi pada

eksistensi kelompok komunitas/masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial di lingkungannya.

C. Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial

Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial di Desa Serakapi diharapkan dapat mentransformasikan kondisi awal ketahanan sosial masyarakat (kondisi awal) menjadi kondisi ketahanan sosial masyarakat optimum (kondisi akhir). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Action Research* yang bertujuan memberikan strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Prinsip *Action Research* yang digunakan adalah merumuskan masalah dan merencanakan tindakan; melaksanakan tindakan dan pengamatan/*monitoring*; refleksi hasil pengamatan; dan perubahan/revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Rancangan penelitian merupakan Quasi Eksperimen dalam bentuk "*one group pre-test post-test*". Model Desa Berketahanan Sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada penelitian ini, variabel bebas atau *independen*t *variable* (X) adalah model Desa Berketahanan sosial yang akan dilihat melalui kemampuan forum dalam hal: Tingkat pemahaman masyarakat tentang ketahanan sosial; Perlindungan sosial terhadap kelompok PMKS; Partisipasi masyarakat dalam organisasi lokal; Pengendalian terhadap konflik sosial; Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial.

Variabel terikat atau *dependent variable* (Y) pada penelitian ini adalah kondisi kelompok sasaran/anggota keluarga/komunitas di lokasi penelitian yaitu kondisi perlindungan sosial bagi kelompok sasaran/anggota keluarga/komunitas; kondisi partisipasi masyarakat dari kelompok sasaran/anggota keluarga/ komunitas; kondisi pengendalian konflik/tindak kekerasan pada kelompok sasaran/anggota keluarga/ komunitas; dan kondisi kearifan lokal kelompok sasaran/ anggota keluarga/komunitas dalam mengelola sumber daya alam dan sosial serta penanganan bencana alam dan sosial.

Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposif, di Desa Serakapi Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk relatif lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya yang diprediksikan memiliki Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif lebih kompleks; jangkauan lokasi lebih mudah dibanding dengan desa yang lain, sehingga akan memperlancar keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pasca treatment dengan pertimbangan waktu, tenaga dan dana; dan kenyataan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa ter-

Tabel 1.
Model Desa Berketahanan Sosial

No	Materi Pelatihan	Penyaji	Target yang Dicapai	Keterangan
1	Perlindungan Sosial bagi kelompok PMKS	Dinas sosial	Tersosialisasinya jenis pelayanan sosial dasar guna mewujudkan perlindungan sosial bagi kelompok PMKS	Peserta paham ttg: 1. Jenis pelayanan sosial dasar 2. Kemampuan jangkauan pelayanan sosial dasar 3. Keberlangsungan pelayanan sosial dasar
2	Partisipasi masyarakat dalam organisasi lokal	Dinas Sosial	Termotivasinya warga/ peserta dalam keterlibatan berorganisasi lokal	Peserta tergerak/sadar dalam kegiatan orsos lokal/kelembagaan sosial
3	Pengendalian terhadap konflik sosial	Kepolisian/ Praktisi hukum/ Kesbanglinmas	Tersosialisasinya pemahaman peserta dalam mengendalikan terhadap konflik sosial	Peserta terlibat & cepat merespon dalam pengen dalian terhadap konflik sosial
4	Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial	Bappeda	Tersosialisasinya kearifan lokal dlm mengelola sumber daya alam dan sosial	Peserta mampu melibatkan kearifan lokal yg ada guna mewujudkan Desa Berketahanan Sosial

tinggal serta lokasi tersebut adalah daerah yang dapat memenuhi kriteria kebutuhan pelaksanaan model pengembangan desa berketahanan sosial. Keterdapatan sejumlah kelembagaan sosial lokal yang secara potensial dapat didayagunakan dan diberdayakan sebagai agen ketahanan sosial dan kepemilikan implikasi bagi menguatnya ketahanan sosial masyarakat membuat desa ini menarik untuk dijadikan lokasi penelitian dan dapat menjamin kepastian diperolehnya data yang benar sesuai kriteria.

Penelitian ini disasarkan pada kelembagaan sosial dan *stakeholders* terkait. Kelembagaan terdiri atas lembaga sosial yang tumbuh secara tradisional di lingkungan masyarakat; lembaga sosial yang tumbuh dan difasilitasi pemerintah, baik yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan (Posyandu), Pendidikan, dan Kepemudaan (Karang Taruna); serta lembaga adat, yang dipatuhi masyarakat terhadap nilai dan norma, aturan-aturan lokal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku sebagai penuntun perilaku sosial pada kehidupan masyarakat lokal. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) meliputi tokoh masyarakat, baik yang bergerak dalam bidang keagamaan, adat, kemasyarakatan, kepemudaan, kewanitaan, pemerintah lokal, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi. Sasaran tersebut diambil sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau sesuai dengan kebutuhan setempat sebagai pranata yang nantinya diberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan selama 4 (empat) hari kegiatan.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan melalui *testing*, wawancara, observasi dan telaah dokumentasi (data sekunder). Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Rancangan analisis penelitian secara lebih terperinci dapat dilihat pada Diagram 1.

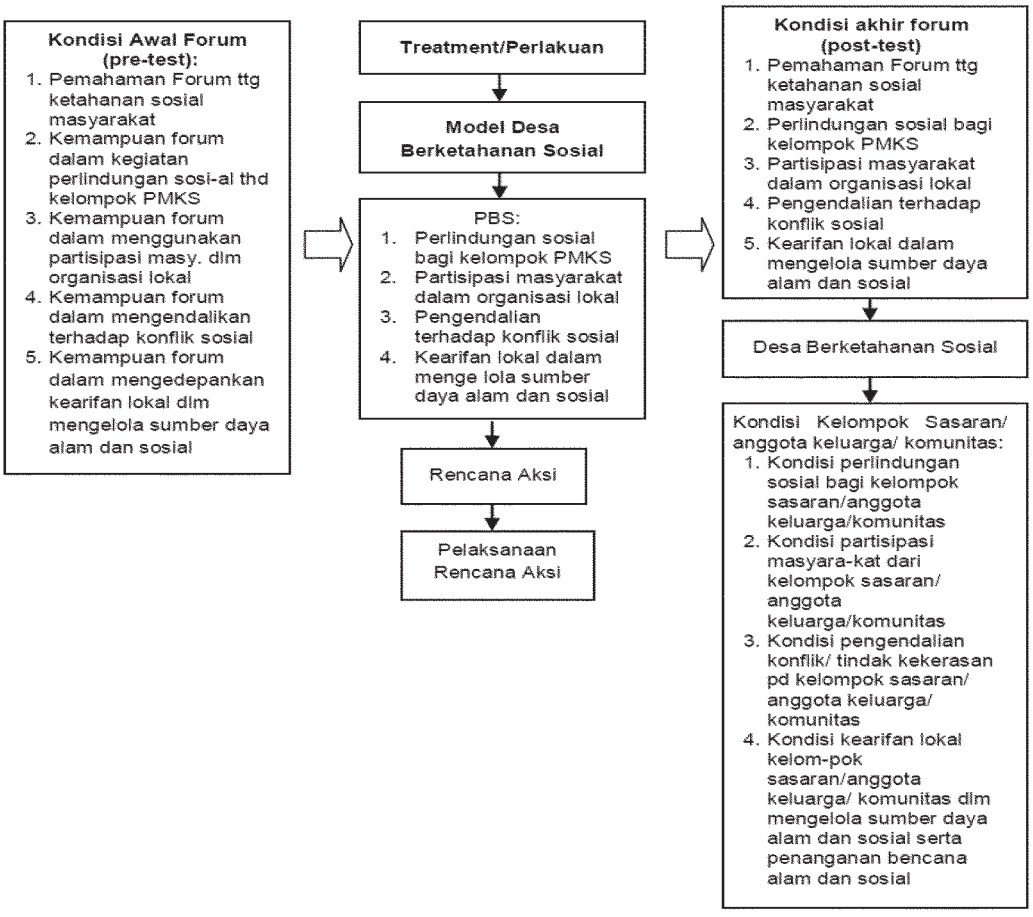

Diagram 1. Rancangan Analisis Penelitian

D. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1. Karakteristik Peserta Pemberdayaan: Untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat desa, dibutuhkan upaya pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan kepada pengurus lembaga sosial lokal yang ditunjuk sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Peserta berasal dari beberapa organisasi/kelembagaan sosial lokal, seperti karang taruna 5 orang (16,67 persen), tokoh masyarakat 6 orang (20,00 persen), tokoh pemuda 6 orang (20,00), BPD dan LSM masing-masing 4 orang (13,33 persen), dan lainnya tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2.
Asal Organisasi/Kelembagaan Sosial

No	**Asal Organisasi** /Kelembagaan Sosial	f	persen
1	Karang Taruna	5	16,67
2	Tokoh Masyarakat	6	20,00
3	Tokoh Pemuda	6	20,00
4	BPD	4	13,33
5	LSM	4	13,33
6	Himpunan Mahasiswa dan Pemuda	3	10,00
	Jumlah	30	100,00

Generasi muda sebagai ujung tombak pembangunan perlu mendapat perhatian yang lebih dalam proses pembangunan. Pelibatan generasi muda dalam proses pemberdayaan ini diwujudkan dengan partisipasi karang taruna, tokoh pemuda, dan himpunan mahasiswa serta pemuda. Ide-ide kreatif generasi muda diharapkan mampu membawa perubahan sesuai dengan tuntutan jaman. Ditinjau dari usia peserta, sebagian besar berusia produktif yakni antara 21 – 40 tahun (66,67 persen), peserta yang berusia 41–60 tahun ada 7 orang (23,33 persen), dan ada seorang peserta yang berusia relatif muda yakni 20 tahun, dan diatas 61 tahun ada 2 orang, tetapi masih aktif, lincah, gesit dan mau bekerja untuk kegiatan sosial. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan membutuhkan kegesitan serta keuletan dari fasilitator (masyarakat yang diberdayakan) karena merupakan aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya. Untuk jelasnya seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3.
Peserta Menurut Usia

No	Usia (Tahun)	f	persen
1	< 20	1	3,33
2	21-40	20	66,67
3	41-60	7	23,33
4	>60	2	6,67
	Jumlah	30	100,00

Bila ditilik dari pendidikan, peserta pemberdayaan ini sebanyak 16 orang berpendidikan tamat SLTA, kemudian 7 orang (23,33 persen) adalah tamatan SLTP, dan masing-masing 3 orang (10,00 persen) tamatan SD dan Sarjana. Hal ini sangat terkait dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat desa yang memang didominasi lulusan SMA. Namun hal ini cukup memadai, karena lulusan SMA atau sederajat dianggap telah mampu berpikir secara rasional dan memiliki landasan pengetahuan yang cukup untuk menerima materi pemberdayaan dengan baik. Adanya peserta yang merupakan sarjana ini memang merupakan pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan baik dalam organisasi olah raga, kesenian dan keagamaan. Mereka ini merupakan tokoh pemuda desa yang berkeinginan desa Serakapi menjadi desa yang maju dalam segala sektor. Dan ini terlihat dari antusias, dinamika dan semangat mereka dalam mengikuti pemberdayaan. Kondisi pendidikan peserta ini dapat diperhatikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Peserta menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	f	persen
1	SD	3	10,00
2	SMP	7	23,33
3	SMA	16	53,33
4	D3	1	3,33
5	S1	3	10,00
6	Himpunan Mahasiswa dan Pemuda	3	10,00
	Jumlah	30	100,00

Mata pencaharian para peserta pemberdayaan tidak begitu beragam, hanya ada empat jenis pekerjaan yang ditekuni yaitu petani sebanyak 23 orang (76,66 persen), ibu rumah tangga sebanyak 3 orang (10,00 persen), aparat pemerintah desa (kadus) sebanyak 2 orang (6,67 persen), dan guru sebanyak 2 orang (6,67 persen). Mayoritas petani di desa Serakapi merupakan petani padi (padi ladang), petani jagung dan kacang hijau yang merupakan komoditi andalan desa.

Tabel 5
Peserta Menurut Pekerjaan (N=30)

No	Jenis Pekerjaan	f	persen
1	Petani	23	76,66
2	Ibu Rumah Tangga	3	10,00
3	Kepala Dusun	2	6,67
4	Guru Tidak Tetap	2	6,67
	Jumlah	30	100,00

2. **Pelaksanaan Pemberdayaan:** Tim Peneliti, fasilitator, pendamping forum dan panitia pemberdayaan melakukan penyamaan persepsi dan hal lainnya untuk kelancaran dan mendukung kegiatan permberdayaan. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan selama 4 hari untuk kegiatan bimbingan sosial yang telah ditentukan untuk diterapkan pada perlakuan terhadap peserta pemberdayaan.

   Peserta pemberdayaan dikelompokkan menjadi empat kelompok atau divisi sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial yaitu kelompok *partisipasi sosial*, kelompok *perlindungan sosial*, kelompok *konflik sosial* dan kelompok *kearifan lokal*. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pengurus forum/kelompok, dan inisial forum/kelompok, setelah personil forum terbentuk, dalam hal ini ketua dan sekretaris forum memandu kegiatan selanjutnya yakni simulasi tentang pemahaman ketahanan sosial masyarakat, pemetaan wilayah desa yaitu peta sosial dan pemetaan terhadap potensi kelembagaan, sistem sumber, PMKS, wilayah-wilayah bermasalah maupun wilayah-wilayah berpotensi. Masing-masing kelompok/divisi diminta untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya menggunakan langkah-langkah MPA (Metode *Partisipatori Assesment*). Demikian juga masing-masing kelompok untuk memilih prioritas masalah sosial yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui pemberdayaan. Kemudian fasilitator menyimpulkan dan memperkuat hasil identifikasi masing-masing kelompok.

   Tahapan berikutnya adalah menentukan pemetaan potensi, dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di desa Serakapi, peserta pemberdayaan diajak untuk berdiskusi membuat peta sosial/*mapping* tentang kondisi desanya. Selain itu, diadakan diskusi untuk menentukan PSKS menjadi prioritas untuk mendukung dalam mengatasi PMKS yang harus segera ditangani. Menggambar peta sosial baik itu tentang sarana prasarana, sarana jalan, jembatan, pendidikan, perekonomian/ pasar/warung/ toko, kesehatan, perkebunan dan sarana pendukung lainnya yang ada di desa, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan mudah. Kemudian pemetaan masalah sosial sebagai kantong-kantong PMKS, antara lain masalah kemiskinan, pemukiman kumuh, anak/remaja nakal, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan masalah sosial lain yang ada di desa tersebut. Hasil identifikasi disajkan dalam matrik kegiatan, selanjutnya disampaikan oleh masing-masing kelompok/divisi untuk ditanggapi oleh kelompok lainnya, didampingi dan dipandu oleh pendamping forum. Fasilitator, kemudian menyimpulkan dan memperkuat hasil diskusi kelompok tentang potensi dan sumber yang ada.

   Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana Aksi (*Action Plan*) atau program kerja. Penyusunan program kerja tersebut meliputi empat indikator ketahanan sosial yang masing-masing tersusun dalam empat devisi, di mana masing-masing devisi menentukan prioritas masalah yang akan ditangani untuk dapat dilaksanakan selama 5 bulan kedepan. Rencana aksi tersebut disusun dalam suatu matrik program kerja yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, pihak yang terkait, langkah-

langkah kegiatan, jadwal kegiatan, biaya dan sumber biaya, penanggung jawab serta hasil kegiatan yang akan dicapai. Semua peserta terlibat aktif untuk menyusun rencana aksi, bahkan mereka sepakat menyelesaikan tugas tersebut di luar jam pelatihan/pemberdayaan. Program kerja forum yang telah mereka sepakati. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tentang rencana aksi atau program kerja forum oleh pengurus forum atau ketua forum.

3. **Model Pengembangan Desa Berketahanan Sosial Pemberdaya Kelembagaan Sosial Lokal:** Model desa berketahanan sosial tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 terbukti mampu memberdayakan kelembagaan sosial lokal. Kemampuan model tersebut harus diikuti oleh beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh tim peneliti, dan telah dilakukan aksi di beberapa daerah. Penetapan dan penyamaan persepsi dengan para fasilitator, penunjukkan tenaga pendamping, penetapan kriteria lokasi dan sasaran pemberdayaan (dalam hal ini perwakilan pengurus lembaga/organisasi lokal) dan modul pemberdayaan menjadi kunci pokok keberhasilan pemberdayaan. Menciptakan kepercayaan antara tim peneliti dan peserta pemberdayaan merupakan kunci keberhasilan berikutnya, karena ketahanan sosial masyarakat diciptakan dari masalah kesejahteraan sosial yang ada dengan memanfaatkan potensi dan sumber sosial lokal yang dituangkan dalam rencana aksi untuk 5 bulan, sebagai aksi yang akan dilakukan oleh forum yang terbentuk. Artinya program yang dibuat oleh forum merupakan *bottom up*, tim peneliti dan fasilitator serta unsur Dinas Sosial hanya memfasilitasi terwujudnya program aksi, termasuk dalam realisasi pelaksanaan rencana aksi tersebut. Tahapan yang menjadi prosedur dalam membentuk desa berketahanan sosial sebagai berikut.
   a. Persiapan: Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan ini meliputi: Penyiapan petugas: petugas yang harus disiapkan adalah tenaga yang aktif pada kegiatan masyarakat (*community worker*). Penyiapan lapangan: penyiapan lapangan kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan studi kelayakan daerah yang akan dijadikan sasaran. mengurus perizinan dari pihak terkait.
   b. Pelaksanaan Pengembangan: Pada pelaksanaan pengembangan, kegiatan yang dilakukan berupa: Pemetaan kondisi awal ketahanan sosial masyarakat. Pemetaan dilakukan dengan mengumpulkan data, baik melalui observasi, wawancara mendalam, maupun pengisian instrumen sebagai alat ukur. Pendataan awal dilakukan untuk memahami kondisi awal komunitas lokal terhadap dimensi indikator ketahanan sosial masyarakat lokal sebelum intervensi (pengembangan) sosial dilakukan. Pelaku pemetaan adalah petugas masyarakat (*community worker)*, perwakilan pranata sosial dan pendamping.
   c. Pembekalan atau penguatan: Pembekalan diberikan pada fasilitator daerah, yang merupakan perwakilan dari Instansi sosial kabupaten, instansi Bappeda dan instansi lainnya sesuai dengan kondisi lokasi atau yang disarankan oleh pemerintah daerah setempat. Materi pembekalan adalah materi yang terdapat pada modul bimbingan sosial yang berisi tentang permasalahan kesejahteraan sosial, penggalian sistem sumber, konsep ketahanan sosial masyarakat, perencanaan partisipatif.
   d. Pengungkapan Masalah (*assesment*): Dalam pengungkapan masalah, sasaran/forum dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan serta potensi yang dimiliki masyarakat. Masalah sosial yang ditemukan akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan, yang menjadi bahan kegiatan pada rencana aksi. Metoda yang digunakan pada tahap ini adalah diskusi kelompok terfokus dan curah pendapat. Untuk menggambarkan kondisi suatu

desa, dapat pula digunakan beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu PRA (*Participatory Rural Apraisal*), seperti menggambarkan peta, masalah sosial, dan potensi masyarakat.

e. Perencanaan alternatif program atau kegiatan: Dalam proses ini tim peneliti bertindak sebagai fasilitator yang membantu forum berdiskusi mengenai program dan kegiatan yang tepat dan dapat dilaksanakan.
f. Penyusunan rencana aksi: Rencana aksi yang akan dilakukan dalam pengembangan masyarakat diformulasikan secara tertulis. Penyusunan rencana aksi dimulai dari perumusan program, tujuan yang akan dicapai, indikator keberhasilan, langkah-langkah kegiatan, pembentukan tim kerja, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, identifikasi sarana dan prasarana pendukung, serta mobilisasi sumber untuk ketercapaian program peningkatan ketahanan sosial masyarakat.
g. Pembentukan jejaring: Pembentukan jejaring ini dibutuhkan sebagai media forum untuk menjadikan mitra kerja dalam melaksanakan rencana aksi, dan keberlanjutan kerja forum dimasa mendatang.
h. *Monitoring* dan Evaluasi: *Monitoring* dilakukan oleh tim peneliti pada bulan ketiga pelaksanaan rencana aksi. Tujuan *monitoring* adalah memantau dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi komunitas lokal selama tahap pengembangan berjalan. Untuk melihat keberhasilan implementasi model, maka dilakukan evaluasi pada bulan ke lima. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran tingkat ketahanan sosial masyarakat setelah forum tansosmas melakukan aksi peningkatan tansosmas selama lima bulan. Evaluasi dilakukan oleh tim peneliti pada bulan ke lima, kegiatan yang dilakukan meliputi, pengisian instrumen *post-test* untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman forum tentang ketahanan sosial, di tiga lokasi pemberdayaan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara partisipasif terhadap forum tansosmas dan tenaga pendamping. Metoda yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi ini adalah Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam, observasi, maupun melalui kajian terhadap catatan forum/kelompok dan pendamping forum/kelompok.

Hasil pengukuran terhadap *pre-test* dan *post-test* terhadap personil forum tansosmas (30 orang per lokasi kabupaten) terhadap pemahaman empat indikator ketahanan sosial masyarakat, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, pengendalian terhadap konflik sosial dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial, dapat diketahui melalui Tabel 6 dan uraian berikut ini.

Sebelum pemberdayaan, dari 30 peserta, sebanyak 6,67 persen-33,33 persen terlibat dalam perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, dalam pengendalian konflik sosial sebanyak 6,67 persen–23,33 persen, dalam pengelolaan kearifan lokal terhadap sumber daya alam dan sosial sebanyak 6,67 persen–20 persen.

Sesudah pemberdayaan, dari 30 peserta, sebanyak 86,67persen-96,67 persen terlibat dalam perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, dalam pengendalian konflik sosial sebanyak 50 persen - 83,33 persen, dalam pengelolaan kearifan lokal terhadap sumber daya alam dan sosial sebanyak 66,67 persen–70 persen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan efektif meliputi tingkat perlindungan sosial, partisipasi sosial, penyelesaian konflik, dan kearifan lokal. Keefektifan tersebut ditunjukkan melalui uji beda mean yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberdayaan. Terdapat perbedaan yang jelas antara kemampuan personil forum sebelum dan sesudah dilakukan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang

Tabel 6
Analisis Uji T-Test Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Nilai T	P	Mean		Hipotesa	Keterangan
				Sebelum	Sesedah		
1	Perlindungan Sosial	-27,004	0,000	19,333	28,033	Diterima	• Sangat signifikan • Efektif
2	Partisipasi Sosial	-10,033	0,000	3,800	5,067	Diterima	• Sangat signifikan • Efektif
3	Penyelesaian Konflik	-21,631	0,000	11,933	16,133	Diterima	• Sangat signifikan • Efektif
4	Kearifan Lokal	-13,000	0,000	5,867	8,033	Diterima	• Sangat signifikan • Efektif

salah satunya adalah komitmen dari masyarakat dan *stakeholders* untuk ikut secara aktif dalam program pemberdayaan ini.

i. **Terminasi:** merupakan tahap "pemutusan" hubungan secara formal antara pemberi program dengan komunitas sasaran, yakni forum tansosmas. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri atau mampu melakukan upaya pemecahan/penanganan masalah kesejahteraan sosial, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena jangka waktu yang ditentukan secara administratif sudah selesai. Oleh karena itu, secara formal dalam rangka pembinaan forum tansosmas yang sudah terbentuk selanjutnya diserahkan kepada instansi terkait mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, bahkan bila diperlukan sampai dengan tingkat provinsi.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu menerima dengan baik pengalihan fungsi Forum Tansosmas Sabua Ade yang telah terbentuk dan eksis di masyarakat desa. Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten, melakukan pembinaan dan menjadikan mitra kerja dalam penanganan PMKS, dan memfasilitasi terwujudnya desa berketahanan sosial pada tahun depan. Begitu pula dengan pemerintahan desa dan kecamatan, memfasilitasi Forum Tansosmas Sabua Adea dalam rangka menciptakan desa berketahanan sosial, melalui program kerja yang selama ini sudah mereka lakukan, dan mensinergikan dengan program pembangunan desa yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Replikasi Model

Dalam sebuah proses perubahan masyarakat, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Sama halnya dengan proses pemberdayaan yang dilakukan di Desa Serakapi, berikut adalah faktor pendukung dan penghambat dalam proses replikasi model desa berketahanan sosial.

Dalam pelaksanaan replikasi model ini, pemerintah daerah, khususnya dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui perwakilan kelembagaan/organisasi sosial lokal dalam menciptakan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu niat baik camat, kepala desa, dan Instansi terkait lainnya dalam mendukung program juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program. Keterlibatan fasilitator, khususnya Bappeda dan Kesbanglinmas, secara tidak langsung telah menjadi jejaring kerja yang mendukung dan mengembangkan keberlangsungan kegiatan forum tansosmas. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat serta tokoh masyarakat dalam mendukung keberadaan forum tansosmas dibuktikan melalui kerja bakti yang di prakarsai oleh forum dalam pembenahan jalan dan bersih lingkungan, pen-

dataan PMKS, penyelenggaraan penyuluhan kepada remaja tentang narkoba dan minuman keras. Hal ini tentu sangat mendukung keberhasilan dan keefektifan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa berketahanan sosial.

Disamping faktor pendukung pelaksanaan program, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program terutama mengenai keaktifan anggota forum dan juga keterbatasan dana yang dimiliki forum. Keterbatasan jejaring kemitraan dan kerjasama dalam forum membuat penggalangan dana dari luar forum sedkit terhambat. Faktor ekonomi internal anggota forum membuat dana internal terbatas dan juga fokus anggota forum sedikit terpecah karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi.

F. Gagasan Akhir

Dalam proses replikasi model yang dilaksanakan di Desa Serakapi ini, pemahaman peserta pemberdayaan (personil forum tansosmas) terhadap 4 indikator tansosmas yaitu perlindungan sosial, partisipasi sosial, penyelesaian konflik, dan kearifan lokal terbukti signifikan, artinya pasca pembekalan oleh fasilitator membawa perubahan pengetahuan tentang indikator ketahanan sosial masyarakat dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, khususnya di lingkup desa. Forum Ketahanan Sosial Masyarakat dapat menjadi mitra kerja lapangan bagi Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan hasil dan keefektifan program, diperlukan pemantapan tenaga pendamping oleh unit teknis agar forum memiliki kemampuan menggerakkan organisisasi dan program kegiatan tetap berjalan dan eksis dalam menciptakan ketahanan sosial masyarakat. Replikasi model desa berketahanan sosial ini dapat dilakukan pada wilayah kabupaten lain dengan mempertimbangkan tipologi dan karakter desa yang akan dijadikan lokasi replikasi sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat.

Pustaka Acuan

Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas* (*Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*). Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

————. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*.Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmad Suhendi, dkk. 2009. *Pengembangan Desa Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Pranata Sosial (replikasi model di empat provinsi).* Jakarta: Pusbangtansosmas Departemen Sosial RI

Astuti, Mulia, dkk. 2006. *Replikasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial, Menuju Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.

Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 2003. *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Departemen Sosial RI

Biithe Mikkelsen, 1999, *Pengembangan Masyarakat di Miangas*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos Departemen Sosial RI

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu, *Statististik Daerah Kecamatan Woja tahun 2010*.

Chusnan Yusuf, 2002, *Ketahanan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif pembangunan Kesejahteraan Sosial (dalam Sosialisasi Program Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat*), Jakarta, Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Dep. Sosial RI.

Departemen Sosial RI. 2006. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Ssosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial.* Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Endro Winarno, dkk. 2001. *Ujicoba Pola Pengentasan Keluarga Miskin Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung*. BPKS: Yogyakarta

Harry Hikmat, 2004*, Dimensi Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta, Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Dep. Sosial RI.

Idrus, Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu sosial (pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta, UUI Press.

Justika Baharsyah. 1999. *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial Pelajaran dari Krisis.* Jakarta: Departemen Sosial RI

Melly E. Tan, 1977, *Pengembangan Masyarakat di Miangas*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos Departemen Sosial RI

Muttaqin, dkk. 2005. *Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat* (*Implementasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial*). Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.

Suhendi, Ahmad; dan kawan-kawan. 2007. *Modul Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.

Suhendi, Ahmad; Ani Wuryandari; dan Endah Triyati. 2007. *Replikasi Model Desa Berketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Pranata Sosial (di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi).* Jakarta: Pusbangtansosmas-Badiklit Kesos-Departemen Sosial RI.

Sukoco, Dwi Heru. 2002. *Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Departemen Sosial RI.

Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research 4*, Yogyakarta, Penerbit ANDI

3

Kajian Fenomenologi: Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia

Phenomenological Insight: Violence as Communication Behavior toward Indonesian Migrant Workers Women

Anggraeni Primawati dan Ellys Lestari Pambayun

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tunas Nusantara Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Sosiologi Universitas Nasional (UNAS) Jakarta. Email: angkyprima@yahoo.com. HP. 08122737499. Ellys Lestari Pambayun, Dra. MSi. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Komunikasi Universitas Nasional (UNAS). Email: ellyslestaripambayun@gmail.com. HP. 081808695954. Diterima 23 Juli 2013, disetujui 6 September 2013.

Abstract

The research on violence as women migrant workers communication behavior in Jakarta was based on the observation of the reality of the violennce that endlessly (even flourishing) experienced by Indonesian women migrant workers in Jakarta. Physical, verbal, psychological, and even economic violence often experienced by women migrant workers. From the observations the problem then was found that violence, as inappropriate behavior experienced by women migrant workers, was closely related to the communication ability, language skill, and cultural understanding of women migrant workers at their work sites, Saudi Arabia and Malaysia. The theoretical basis used to analyze the research finding was phenomenological approach that especially explore the experience of actors or subjects (Indonesian women migrant workers) on the violence as inappropriate communication behavior, tends hiding, to be a fact that can be revealed. In addition, the perspective of intercultural communication included in this study, also used to see the context of communications and actions of women migrant workers in countries of different cultures, values, and ideologies, particularly stereotypes and prejudices involved in the violence on women migrant workers. Similarly, muted-group theory associated with this study, was used also to look at gender relations that occur among violent offenders, namely employers and migrant women (as victims of violence or inappropriate behavior) so they became a silent human being or powerless against the cultural and ideological domination of their employers.The research method used was a qualitative approach, exploring through phenomenological method that required in-depth investigation of the violence. The conclusion of the research was that the reality of violence behavior, as an inappropriate communication to Indonesian women migrant workers, was more physical, verbal, psychological, and economic expression in their private areas by the employers who still held the value, culture and patriarchal ideology, feudalism, and their lack understanding on the real Indonesian character and culture.

Keywords:
Phenomenological Insight-Violence Behavior Communication- Migrant Workers Women

Abstrak

Penelitian tentang fenomenologi kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta ini didasarkan atas pengamatan terhadap realitas kekerasan yang terjadi atau dialami para buruh migran perempuan di Indonesia yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin marak. Kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan ekonomi kerap dialami buruh migran perempuan. Dari hasil pengamatan ditemukan masalah, bahwa kasus kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang tidak pantas ini sangat terkait dengan kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa, dan pemahaman budaya buruh migran perempuan di lokasi bekerja mereka, yaitu di Arab Saudi dan Malaysia. Dasar teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang secara khusus memiliki tujuan mengeksplorasi pengalaman aktor atau subjek (buruh migran perempuan di Indonesia) tentang peristiwa kekerasan, sebagai perilaku komunikasi tidak pantas yang menimpa mereka, yang selama ini tersembunyi, agar menjadi fakta yang tampak. Perspektif komunikasi antarbudaya yang juga disertakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat konteks dan tindakan komunikasi buruh migran perempuan di negara yang berbeda budaya, nilai, dan ideologi. khususnya stereotipe dan prasangka yang terlibat di dalam kekerasan pada buruh migran perempuan. Begitu pula *muted-group theory* yang dikaitkan dengan penelitian ini untuk melihat relasi gender yang terjadi di antara pelaku kekerasan, yaitu majikan dan buruh migran perempuan (sebagai korban kekerasan atau perilaku tidak pantas) sehingga mereka menjadi manusia yang bisu atau tidak berdaya melawan dominasi budaya dan ideologi majikan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dilakukan melalui kajian fenomenologi yang menghendaki investigasi secara mendalam terhadap kasus kekerasan yang menimpa TKW. Simpulan penelitian ini adalah bahwa realitas kekerasan atau perilaku komunikasi yang tidak pantas terhadap buruh migran perempuan Indonesia lebih merupakan kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan ekonomi di wilayah privat TKW, dilakukan oleh majikan yang masih memegang nilai, budaya, dan ideologi patriarkis, feodalisme, dan kekurangpahaman terhadap budaya dan karakter orang Indonesia yang sebenarnya.

Kata Kunci:
Kajian Fenomenologi-Perilaku Komunikasi Kekerasan-Buruh Migrant Perempuan

A. Perempuan dan Komunikasi Kekerasan

Perempuan adalah aktor komunikasi, baik di ruang privat maupun publik. Sebagai aktor komunikasi tentu dituntut untuk dapat mengakselerasi diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Salah satu perubahan ini adalah adanya tuntutan perempuan untuk mampu mengkomunikasikan kepentingannya pada kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin meningkat tajam. Ketiga perubahan tersebut berimplikasi terhadap pola kerja perempuan sebagai aktor aktif keluarga mereka. Dalam era pembangunan di Indonesia, dasawarsa 1970-an memang telah ditandai oleh banyaknya perubahan, termasuk perubahan pola kerja kaum perempuan. Mayling Oey (2004:127) menyebutkan tiga faktor penyebabnya. *Pertama*, pertumbuhan penduduk usia kerja yang terus menerus tinggi, akibat kesuburan atau kehamilan penduduk di masa lalu, yang menciptakan tekanan penduduk, khususnya di Jawa. *Kedua,* kepesatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dasawarsa sebelumnya. Ini dibuktikan oleh kenaikan tahunan sebesar 7,3 persen dalam produk domestik bruto (PDB) antara 1971 dan 1980. Ketiga, meskipun faktor penyebab khususnya tak dapat dipastikan, namun dapat dikemukakan bahwa kemajuan ekonomi yang pesat itu telah mendorong perubahan sosial yang begitu cepat. Pendapat Mayling Oey ini tidak berlebihan bila menuntut perempuan untuk lebih aktif dalam komunikasi. Karena tanpa komunikasi, kebutuhan mereka tidak akan muncul memenuhi hidup mereka.

Perubahan sosial ini juga memunculkan realitas berubahnya pola komunikasi dan orientasi kerja perempuan, yang semula cenderung memiliki moto “makan tidak makan asal kumpul” mereka suarakan pada orang lain menjadi “berkumpul terus kapan majunya?”. Pola pikir atau orientasi tersebut yang membuat perempuan Indonesia memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dengan meninggalkan keluarga demi perubahan hidup keluarganya. Akhirnya, perempuan tersebut terlibat interaksi dan komunikasi yang intens dengan pihak seperti PPTKIS yang dapat menjadikan mereka TKW atau buruh migrant di luar negeri. Realitasnya kemudian memberikan bukti yang menakjubkan, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah pekerja migran terbesar. *Harian Kompas* menyebut ada sekitar enam juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan 80 persen di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya bekerja sebagai pembantu rumah tangga (Kompas, 14 Nopember 2009). Namun sayangnya, keputusan perempuan untuk menjadi buruh migran sebagai hasil perubahan orientasi perempuan ini tidak diiringi perubahan pada kemampuan komunikasi yang kritis dan komprehensif di bidang mereka di tempat kerja, padahal mereka hidup di abad komunikasi dan informasi yang sangat cepat dan canggih. Khususnya, pengenalan budaya yang baik di negeri pribumi. Dunia kerja sebagai *public sphere* tempat mereka bekerja yang terlibat di dalamnya tidak bisa disikapi dan ditindaki oleh perilaku komunikasi seperti di dunia privat.

Realitas lainnya adalah jumlah pekerja migran perempuan atau tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia ini meskipun tergolong besar, tetapi tidak sebanding dengan nasib dan masa depan mereka sebagai pahlawan devisa Negara, karena posisi tawar mereka lemah di tambah ketidakmampuan dalam komunikasi. TKW seringkali mendapat perlakukan tidak adil berupa penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Perilaku komunikasi kurang pantas, baik fisik maupun non-fisik yang diperoleh TKW (buruh migran perempuan) Indonesia seolah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pahlawan devisa. Potret ketidakadilan terhadap TKW yang mengadu nasib di luar negeri semakin menambah luka dan harga diri bangsa Indonesia, semakin terinjak-injak oleh bangsa lain.

Tanpa pembekalan keterampilan (*skill*), penyuluhan bahasa dan budaya setempat, akan rawan terjadi ketidakpuasan sang majikan yang menggaji mereka, yang bukan tidak mungkin akan berujung pada tindakan-tindakan pelecehan seksual dan kekerasan kepada TKW/TKI. Contoh nyata dari hambatan komunikasi yang berakibat fatal ini terjadi pada kasus Sumiati asal Dompu Bima Nusa Tenggara Barat, yang terluka parah akibat digunting majikannya di

Madinah, Arab Saudi. Seperti yang ditegaskan oleh pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Sarosa Hamongpranoto, yang menilai bahwa Sumiati tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan majikan, disebabkan dirinya tidak mampu berbahasa Arab dan Inggris, dan mengenali budaya majikan, sehingga memunculkan tindakan kekerasan dari majikan. *http//www. formatnews.com.*

Perilaku komunikasi yang sangat menyakitkan, berupa penyiksaan buruh migran perempuan yang mengadu nasib di luar negeri, yang mengalami hukuman mati di Arab Saudi karena membunuh majikan yang kerap menyiksanya secara fisik, menimpa Ruyati. Pemicu masalah TKW Ruyati binti Satubi salah satunya adalah kultur yang berbeda, sehingga terjadinya miskomunikasi antarbudaya. Seharusnya TKW sebelum berangkat ke negara lain, perlu di-*training* (dilatih) oleh pemerintah tentang budaya, bahasa, tradisi, dan kebiasaan masyarakat di negara tempat TKW bekerja.

Kekerasan demi kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sungguh membuat martabat dan harga diri bangsa demikian rendah. Perlindungan terhadap TKI dari pemerintah, dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI juga sangat lemah, sehingga setelah ada kejadian pemerintah baru ramai-ramai mengambil langkah penyelesaian. Kasus ini tampaknya tidak diselesaikan dengan penggunaan pola komunikasi yang komprehensif dan efektif. Kesannya pemerintah sangat reaktif, tetapi tidak antisipatif.

Sebagai misal terkait kasus Sumiati, presiden segera menggelar rapat kabinet khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengundang menteri terkait, tetapi akar permasalahan dan persoalan TKI/TKW secara keseluruhan tampaknya tidak tersentuh. Oleh karena tidak ada *grand design* pembangunan ketenagakerjaan dan model komunikasi yang pro-buruh migran, kasus demi kasus mirip Sumiati akan terus terjadi. Pertanyaannya, apakah permasalahan TKI yang sudah lama terjadi tidak cukup menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk membangun sistem ketenagakerjaan dan komunikasi Indonesia yang berorientasi pada buruh migrant?

Penganiayaan juga dialami oleh Kikim Komalasari, seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat, yang bekerja di Arab Saudi. Bedanya, kalau Sumiati masih hidup, Kikim disiksa majikannya sampai tewas. Jenazahnya dibuang ke tong sampah. Konon, ia dibunuh majikannya tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Informasi mengenai kematian Kikim disampaikan oleh seorang relawan Posko Perjuangan TKI (Pospertki) PDI-Perjuangan di Kota Abha. Ini membuktikan fungsi komunikasi dan informasi, dalam hal ini monitoring dan pengawasan TKI, yang dijadikan alat meminta tambahan anggaran BNP2TKI dan Kemenakertrans pada DPR, tidak tepat fungsi. Pesan informatif atau pernyataan pemerintah yang menyatakan tentang rendahnya persentase masalah yang dihadapi TKI, yakni 0,01 persen, juga lebih menunjuk makna retorika politik. Pola komunikasi ini mengisyaratkan adanya upaya untuk menyederhanakan masalah melalui angka. Sejatinya, perilaku komunikasi yang tidak manusiawi terhadap seorang TKI saja, cukup bagi negara memperjuangkannya. Menjadi tidak manusiawi apabila harus menunggu angka signifikan. Sebab, negara berkewajiban melindungi keselamatan setiap warga Negara. Pemerintah belum memiliki *proper sense of humanity,* juga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara tegas untuk meyakinkan bangsanya yang menjadi TKI berani menekan negara pengguna TKI. Peran komunikator pemerintah yang tidak berfungsi, membawa implikasi kredibilitas dan *power* pemerintah tereduksi, baik di mata bangsanya sendiri maupun di mata negara asing.

Penyiksaan dan eksploitasi terhadap buruh migran perempuan, salah satunya terjadi karena faktor kemiskinan. Sebagai kaum miskin, perempuan tidak memiliki kemampuan melawan, menjadi lemah, dan pasrah. Ketidakberdayaan tersebut disebabkan hilangnya hak bersuara dan mengkomunikasikan keberadaan mereka, secara lugas dan informatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 70 persen dari total jumlah orang miskin di Indonesia adalah perempuan. Russo dan Denmark (1984) menyatakan bahwa di dunia pada tahun 1981 saja representasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 63 persen.

Keadaan tersebut merupakan bentuk feminisasi kemiskinan sehingga menjadi masalah yang sangat serius, padahal banyak keluarga yang bertopang hidup pada kaum perempuan. Mereka bekerja dengan gaji yang sama sekali tidak bisa membantu mengangkatnya dari jurang kemiskinan. Pada tahun 1987, di dunia dari sekitar 4,7 juta pekerja perempuan, 65 persennya bekerja di sektor penjualan dan pelayanan (Unger dan Crawford, 1992: 456)

Migrant CARE pada tahun 2009 melaporkan, terjadi 5314 kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Dari 5314 kasus itu, 97 persen dialami oleh perempuan, sementara hanya 3 persen dialami oleh laki-laki. Terjadi juga 1018 kasus kematian buruh migran di tahun 2009. Dari 1018 kematian tersebut, kasus kematian karena kecelakaan kerja berjumlah 90 kasus, sementara kematian karena kekerasan berjumlah 89 kasus. Kematian yang tidak diketahui sebabnya berjumlah 268 kasus. Wahyu Susilo mengemukakan, bahwa diskriminasi buruh migran perempuan Indonesia tidak mengenal tempat. Di dalam negeri, mereka tidak saja diperlakukan sebagai komoditas dan warga negara kelas dua, mereka juga mendapat perlakuan yang diskriminatif, baik mulai saat perekrutan, penampungan, pemberangkatan, maupun saat kepulangan. Terminal III Bandara Soekarno Hatta merupakan tempat nyata dari bentuk diskriminasi terhadap buruh migran perempuan Indonesia, karena memisahkan mereka dengan penumpang umum lainnya. Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, TKI juga diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan forum komunikasi atau serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Waktu kerja ketat, banyak menghalang-halangi buruh migran menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. (Jurnal Perempuan, Edisi 26 tahun 2002: 54). Potensi komunikasi dan interaksi di antara buruh migran perempuan dan pihak luar menjadi tertutup, bahkan seringkali terjadi disinformasi.

Realitas ketertutupan komunikasi tersebut sangat berlawanan dengan keberadaan buruh migran perempuan (TKW) Indonesia di Singapura, seperti yang diungkapkan Dewi, seorang buruh migran perempuan Indonesia asal Ciamis (Jawa Barat). “Victoria Park, bisa sebagai wadah komunikasi berbagai hal, karena kalau hari libur TKW berkumpul di sini,” ujar dia mengenai taman di tengah kota yang menjadi tempat khusus komunitas TKW setiap Hari Minggu. Ia memuji sikap pemerintah Hongkong dan aktivis wanitanya yang serius menangani kasus-kasus yang menimpa TKI di Hongkong, yang jumlahnya sekitar 130.000 orang. Beberapa aktivis pembela perempuan Hongkong membagi-bagikan brosur tentang cara-cara pengaduan jika mereka dirugikan majikannya dalam tiga bahasa, Mandarin, Inggris, dan Indonesia

Penyebab terjadinya kekerasan dan perilaku tidak manusiawi terhadap buruh migran perempuan Indonesia di Arab Saudi (sebagai) salah satu negara pengguna TKW menurut seorang anggota DPRD, NTB, bidang Kesra dan Tenaga Kerja, TGH Hazmi Hamzar adalah persoalan bahasa dan pengenalan budaya. Persoalan bahasa, tenaga kerja Indonesia banyak yang diberangkatkan dalam kondisi kepahaman bahasa yang minim, sehingga menjadi faktor penghambat komunikasi antara seorang pekerja dengan majikan. Kemampuan mengenal budaya, juga menghambat komunikasi, lebih parah lagi dapat mengancam keselamatan diri TKW.

Mengenai urgensi komunikasi sebagai faktor penting bagi reduksi dan solusi kekerasan pada TKW dikemukakan pula oleh Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson, bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, penampilan pribadi, dan pencapaian tujuan hidup. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.

Fenomena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor domestik diungkapkan Nievva Guttek (1987), bahwa kebanyakan perempuan bekerja di bagian pelayanan tempat pekerjaan mereka tidak jauh berbeda saat mereka di rumah, seperti membersihkan rumah, menyediakan makanan, mengasuh anak, baik di

rumah majikan maupun rumah sakit atau kantor. Stereotipe feminin yang melihat pekerjaan perempuan sebagai produk alamiah bukan didasarkan pada kompetensi individual, ini tentu saja memapankan terjadinya devaluasi terhadap pekerjaan perempuan (Unger dan Crawford, 1996: 452).

Stereotipe feminin dalam persoalan buruh migran perempuan menjadi persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dan isu jender. PRT migran berada pada relasi kuasa yang amat timpang karena mereka perempuan dan bekerja dalam sektor informal rumah tangga. Di rumah, perempuan calon buruh migran, terutama yang masih muda, kerap mengalami pemaksaan dari lingkungannya yang miskin untuk segera bekerja. Pendidikan yang rendah menyebabkan peluang kerja yang tersedia biasanya sebagai PRT. Begitu keluar rumah, mereka menjadi korban perekrut tenaga kerja. Di tempat kerja, status pekerja informal membuat mereka tidak memiliki posisi tawar dengan majikan. Kemampuan komunikasi buruh migran perempuan Indonesia sangat lemah, sehingga tidak mampu menyuarakan pandangan dan perasaan mereka secara terbuka (*speechless*).

Pengalaman yang menunjukan betapa rentannya tenaga kerja wanita (TKW) dalam kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual ini seharusnaya mendapat perhatian ekstra khusus. Meskipun, kasus Nirmala Bonat beberapa saat lalu, tergolong kasus TKW yang telah mendapatkan perhatian khusus, tetapi tidak sedikit kasus penyiksaan, pelecehan seksual dan upah kerja tidak dibayar luput dari perhatian publik. Sebagian kasus tersebut memang belum merepresentasikan problem pekerja migran yang sesungguhnya, karena bisa jadi melebihi penderitaan 'Nirmala' lainnya yang tidak sempat diliput media. Begitu pula, kasus-kasus TKW yang terkena hukuman mati akibat hubungan seks di luar nikah di Timur Tengah mestinya merupakan persoalan nasional. Namun, upaya pemerintah terkesan parsial dan musiman. Status pekerja migran, termasuk yang ilegal timbul disebabkan oleh karena ketidaksesuaian kompetensi pekerjaan (*mismatched of qualification)* yang tersedia dan PRT di luar negeri telah menjadi penyebabnya. Padahal, tidak seorang pun menafikkan betapa besarnya devisa buruh migran perempuan bagi negara.

Peran komunikasi dilibatkan dalam persoalan kekerasan pada buruh migran perempuan karena penyebab kekerasan secara potensial bisa terjadi karena adanya kendala komunikasi (*barriers of communication*) di antara pelaku dan korban. Deddy Mulyana (1999: 9) mengungkapkan, bahwa kita tidak boleh menyepelekan perbedaan budaya antara TKW dan majikan mereka yang bisa menimbulkan konflik komunikasi antara kedua pihak. Benturan budaya lebih mungkin lagi terjadi apabila keluarga, misalnya Arab Saudi atau Malaysia (sebagai negara Islam) tidak menghayati dan mengamalkan agama mereka. Keluarga Arab Saudi yang menzalimi pembantunya dengan mengurungnya sepanjang waktu, tidak memberinya upah yang dijanjikan, menyiksanya atau memperkosanya, tidak akan terjadi apabila mereka yakin bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Sifat dan perilaku bangsa Arab atau Malaysia, dan negara lainnya dalam kehidupan sehari-hati bersifat *cultural* semata, bukan perwujudan keyakinan mereka pada agama. Bangsa Arab Saudi memiliki budaya "kehormatan adalah segalanya" atau etnosentrisme yang kuat, sehingga menganggap bangsa lain lebih rendah, termasuk perempuan Indonesia yang menjadi buruh mereka.

Young Yun Kim (1982: 364) menegaskan, bahwa buruh migran perempuan sebagai pendatang harus memiliki potensi akulturasi yang memadai untuk dapat beradaptasi dengan budaya asing atau baru. Potensi akulturasi itu ditentukan oleh faktor-faktor: kemiripan antara budaya asli (buruh migran perempuan) dengan budaya pribumi (Arab, Malaysia, dan sebagainya), usia saat berimigrasi atau saat menjadi buruh migran, latar belakang pendidikan, karakteristik kepribadian (komunikatif, interaktif, dan toleran), dan pengetahuan tentang budaya pribumi

Fenomena buruh migran perempuan (TKW) dalam perspektif makro dipandang sebagai akibat bekerjanya struktur sosial ekonomi, institusi sosial, budaya, dan kebijakan negara yang mengabaikan masyarakat miskin. Fenomena

buruh migran perempuan adalah produk sistem sosial dan budaya. Buruh migran perempuan sebagai makhluk berbudaya atau warga masyarakat tidak terhindarkan harus mengikuti *scenario format* sistem sosial, budaya, dan kebijakan pembangunan. Menjadi buruh migran perempuan seolah sebagai suatu model adaptasi bagi perempuan pedesaan untuk menyambung dan mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya. Persoalannya, model adaptasi dengan menjadi buruh migran perempuan ini justru kontraproduktif ketika mereka menjadi korban kekerasan karena ketidak mampuannya mengikuti prosedur resmi sebagaimana dikatakan Robert. K. Merton (1968), sebagai *illegitimate mean*.

B. Permasalahan Buruh Migran Perempuan

Fenomena kekerasan sebagai perilaku komunikasi tidak pantas pada buruh migran perempuan Indonesia merupakan masalah krusial yang dihadapi Indonesia. Budaya komunikasi koersif atau kekerasan yang dilakukan majikan buruh migran perempuan disinyalisasi telah sangat merugikan dan membuat penderitaan bahkan trauma bagi korban yang mengalami kekerasan. Peran pemerintah, BNP2TKI, agensi TKI, buruh migran perempuan, pengguna jasa buruh migran perempuan, masyarakat, harus lebih memiliki kesadaran, pemahaman, juga kemampuan komunikasi yang kritis dan strategis dalam memaknai budaya kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat merendahkan harga diri bangsa. Rumusan masalah yang diajukan adalah fenomena apakah yang terjadi dalam kekerasan sebagai perilaku komunikasi (tidak pantas) pada buruh migran perempuan Indonesia ini, kesadaran dan pemahaman makna-makna apakah yang muncul pada diri korban terhadap perilaku komunikasi (yang tidak pantas) atau kekerasan tersebut, bagaimana bentuk, pola, dan aksi kekerasan sebagai perilaku komunikasi (tidak pantas) yang dilakukan pelaku kekerasan, dan bagaimana upaya penanganan dan tindakan komunikasi pemerintah, BNP2TKI, dan pihak kompeten lainnya pada kekerasan buruh migran perempuan Indonesia. Tujuan Penelitian adalah untuk mengeksplorasi fenomena kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia, mengeksplorasi proses konstruksi kesadaran dan pemaknaan yang berlangsung atau muncul pada buruh migran perempuan terhadap fenomena atau kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang mereka alami, dan menganalisis realitas bentuk, pola, dan aksi kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang dialami korban (buruh migran perempuan) oleh pelaku kekerasan (majikan) mereka, dan menganalisis upaya penanganan dan komunikasi pemerintah, BNP2TKI dan pihak kompeten lainnya pada realitas kekerasan buruh migran perempuan Indonesia.

C. Penggunaan Metode Pemahaman Tindak Kekerasan secara Fenomenologis

Metode fenomenologi, menurut Polkinghorne (Creswell,1998: 51-52) adalah, *"a phenomenological study describes the meaning of the lived experiences for several individuals about a concept or the phenomenon. Phenomenologist explore the structure of cosciousness in human experiences"* (suatu kajian fenomenologi menjelaskan makna pengalaman hidup dari konsep dan fenomena para individu. Artinya, para peneliti fenomenologi mencoba mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia). Sedangkan menurut Husserl (Creswell, 1998: 52) peneliti fenomenologis berusaha mencari tentang, sesuatu yang sangat esensial dan struktur yang tunggal atau pemusatan yang didasarkan pada makna pengalaman dan menekankan pada kesadaran yang memuat pengalaman, baik tampilan luar maupun kesadaran dari dalam yang didasarkan pada memori, citra, dan makna. Tujuan penelitian fenomenologi secara lebih rinci dapat dijelaskan, TD. Wilson dari Sheffield University London, dengan menggunakan pendekatan Schutz, menyatakan tujuan penelitian fenomenologi: *…is to study how human phenomena are experienced in consciousness, in cognitive and perceptual acts, as well as how they may be valued or appreciated aesthetically. Phenomenology seeks to understand how persons construct meaning and a key concept is inter-*

subjectivity. Our experience of the world, upon which our thoughts about the world are based, is intersubjective because we experience the world with and through others (…adalah kajian tentang bagaimana fenomena pengalaman manusia yang disadari, dalam tindakan kognitif dan perseptual, juga bagaimana mereka dinilai atau diapresiasi secara estetis. Fenomenologi berusaha memahami bagaimana cara orang-orang mengkonstruksi makna dan suatu konsep kunci yang merupakan intersubjektivitas). Penelitian fenomenologi ditujukan untuk mengetahui bagaimana peneliti menginterpretasikan tindakan sosialnya dan orang lain sebagai sesuatu yang bermakna (dimaknai) dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna tersebut pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial mereka (Sudarmanti, 2005). Untuk menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran, dalam kognitif, dan dalam tindakan-tindakan perseptual. Fenomenolog mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep kunci secara intersubjektif. Penelitian fenomenologis berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala…" (Kuswarno, 2011).

Pada tahapan penelitian kualitatif dapat bergerak ke depan dan ke belakang selama prosesnya berlangsung, tapi bisa juga bergerak menuju pada sebuah akhir, membangun langkah menuju ke sebuah kesimpulan di setiap tingkatnya, mereka alami kemudian mempersempit hal tersebut yaitu pada makna dan kesadaran yang muncul pada diri responden (buruh migran perempuan) dapat mencapai fokus penelitian yang ketat yaitu pada bagaimana buruh migran perempuan menerapkan teori-teori fenomenologis terhadap pengalaman kekerasan atau perilaku komunikasi yang buruk yang dialaminyanya.

Tahap pengumpulan data, dengan pertimbangan pada kondisi dari objek penelitian tentang kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang tidak pantas terhadap buruh migran perempuan Indonesia, pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam karena sesuai dengan tradisi penelitian fenomenologis yang bersifat interogatif, reflektif, dan menghendaki interaksi dengan informan (buruh migran perempuan sebagai orang pertama atau yang mengalami kekerasan secara langsung) agar fenomena kekerasan atau perilaku komunikasi yang dialami mereka dapat diceritakan secara mendalam.

Proses pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi menurut Creswell (1998: 112) dapat digambarkan sebagai yang diamati, akses data, strategi pengambilan informan, bentuk data proses perekaman data, isu lapangan, dan penyimpanan data. Urutan dalam realitas pengumpulan data adalah dengan mendekati beberapa individu (Buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta) yang pernah mengalami peristiwa atau fenomena kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang buruk; Menemukan individu (Buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, dan Timur) yang pernah mengalami suatu fenomena kekerasan atau perilaku komunikasi yang buruk; Menemukan individu (Buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta Barat, Selatan, Timur, dan Pusat: di rumah, kantor, tempat singgah atau penampungan, pusat rehabilitasi, dan sebagainya, yang benar-benar pernah mengalami suatu fenomena kekerasan fisik (nonverbal), verbal, psikologis, dan seksual yang diamati; Wawancara dengan buruh migran perempuan sampai 2-5 orang; Wawancara mendalam dalam jangka waktu yang lama; Menempatkan fenomena kekerasan sebagai perilaku komunikasi yang dialami buruh migran perempuan Indonesia dalam tanda kurung *(bracketing method*); Transkrip wawancara dan file dalam komputer.

Pemilihan buruh migran perempuan di Jakarta sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan: Masih langka penelitian terhadap kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia, khususnya dalam konteks mengeksplorasi kesadaran dan pemaknaan mereka terhadap pengalaman kekerasan atau perilaku komunikasi yang buruk yang mereka alami di tempat mereka kerja. Adanya kegagalan atau ketidakberhasilan penanganan dan komunikasi terhadap kekerasan sebagai perilaku komunikasi

pada buruh migran perempuan Indonesia oleh pihak-pihak kompeten seperti pemerintah, BNP2TKI dan lainnya. Sebagai indikatornya terdapat beberapa reaksi atau tanggapan dari berbagai khalayak, baik dari para akademisi, peneliti, aktivis, politisi, pengamat sosial, dan masyarakat lainnya tentang ketidakberhasilan penanganan kekerasan terhadap buruh migran perempuan Indonesia. Ada pun pemilihan kota Jakarta kare-na realitas korban kekerasan terhadap buruh migran perempuan banyak yang berasal atau berdomisili di Jakarta. Selain itu, kemudahan para peneliti dalam mencari dan menemukan sumber atau informan penelitian.

Analisis Data yang digunakan adalah kajian fenomenologi mengikuti pemikiran Creswell (1998: 148) melalaui proses: Menggambarkan makna dari kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan untuk peneliti; Menemukan pernyataan-pernyataan bermakna dan membuat daftarnya; Mengelompokkan pernyataan-pernyataan buruh migran perempuan yang sama ke dalam unit-unit makna tertentu; Membangun deskripsi tekstural (kekerasan apa yang terjadi atau dialami); Membangun deskripsi struktural (bagaimana peristiwa kekerasan itu terjadi); Membangun deskripsi keseluruhan dari peristiwa kekerasan atau perilaku komunikasi buruk yang terjadi (esensi dari kekerasan: siapa pelaku, di mana, dan mengapa terjadi, jenis kekerasan atau perilaku komunikasi buruk: mulai dari verbal, fisik, mental, sampai seksualitas); Narasi esensi peristiwa kekerasan atau perilaku komunikasi buruk, dilengkapi dengan table pertanyaan, dan unit-unit makna kekerasan atau perilaku komunikasi buruk.

D. Kekerasan terhadap TKW dari Aspek Fenomenologi

Penelitian fenomenologi dan komunikasi antarbudaya yang berpayung pada konstruktivisme (Kelly, 1955 dalam Asante dan Gudykunts, 1989:34) tentang kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia di Jakarta ini peneliti asumsikan untuk mengungkap suatu fenomena kekerasan atau perilaku komunikasi yang tersembunyi agar menjadi fakta yang tampak, kemudian mendalami fenomena yang tampak tersebut dengan mengungkapkan fakta yang tersembunyi dari peristiwa kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan".

Melalui studi fenomenologi ini para korban kekerasan yaitu buruh migran perempuan Indonesia yang bernama Sayiniah dan Irma mengungkapkan bahwa mereka menyadari telah menjadi korban kekerasan atau perilaku komunikasi yang tidak pantas dari para majikan mereka, di mana mereka menganggap bahwa perilaku yang menyakitkan tersebut sebagai suatu kejahatan dan melanggar hak asasi mereka sebagai manusia yang bermartabat dan berderajat sama di mata Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang diungkapkan informan Irma (kerja di Kuwait), sebagai berikut.

> "Kekerasan itu perbuatan yang tidak manusiawi dan sering dilakukan tanpa alasan yang benar atau pasti. Banyak pemicu yang membuat majikan melakukan kekerasan pada pembantu, bukan masalah disiplin atau aturannya tapi lebih ke sifat dan emosi mereka saja."

Realitas yang dialami korban sebenarnya suatu yang bersifat pribadi dan menjadi milik diri sendiri, tetapi pelanggaran hak asasi seperti kekerasan tersebut tidaklah akan mencapai solusi apabila tidak diungkapkan, karena kekerasan yang dialami mereka dapat menjadi suatu pembelajaran bagi yang lain. "Kekerasan adalah suatu perbuatan yang menyakitkan orang lain secara lahir dan batin." Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, Nisma Abdullah pun menegaskan, bahwa kekerasan pada buruh migran Indonesia menjadi masalah yang sangat besar, terutama kekerasan di ruang privat, seperti pekerja rumah tangga. Permasalahan kekerasan yang menimpa TKW, 99 persen, memang disebabkan kurangnya kemampuan komunikasi TKW pada majikan.

Kekerasan tersebut Bagi korban atau perilaku komunikasi tidak pantas yang mereka alami bermakna pensubordinasian dan eksploitasi terhadap keberadaan mereka sebagai pembantu rumah tangga dari majikan yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang dilandaskan agama yang mereka anut, yaitu Islam. Seperti yang diungkapkan Irma (kerja di Kuwait), sebagai berikut.

> "Semula saya berpikir kalau bekerja di negara Arab yang menganut Islam itu akan tidak beda dengan di Indonesia, ternyata sangat jauh bedanya setelah saya mengenal mereka. Apalagi di Arab ada tingkatan status atau derajat. Itu sangat mencolok. Meskipun negara Islam tapi kebiasaan mereka tidak memegang nilai-nilai Islam gitu! Suka-suka mereka saja. Soal disiplin juga tidak tentu. Mereka buat aturan seenaknya saja sama pembantu macam saya."

Sisi objektif fenomena (*noema*) artinya para korban kekerasan (Sayiniah dan Irma) dengan mata kepala dan telinga mereka sendiri mendapatkan pukulan, bentakan, penghinaan, dan pelecehan seksual yang mereka rasakan sebagai suatu yang sangat menyakitkan dan membuat tubuh mereka tak berdaya. Seperti kelanjutan penuturan Irma sebagai berikut.

> "Saat subuh anaknya yang tentara datang memegangi kaki saya. Karena saya takut sama dia yang masih pakai seragam dan dipinggangnya terselip pistol, makanya saya diam saja. Saya takut setengah mati. Dia minta saya layani. Lalu saya tuntun dia ke kamar mandi. Saya bilang, "Jangan di sini nanti ketahuan Madam, mending di kamar mandi aja." Karena saya ingat di kamar mandi saya simpan 'Remason' (minyak angin) saya. Di kamar mandi dia minta saya raba-raba dia. Ya..saya terpaksa meraba-raba dia, tapi otak saya tetap jalan untuk lari dari dia. Lalu saya suruh dia buka celana dalamnya, setelah itu saya remas-remas alat vital dia pakai tangan yang sudah dibalut Remason. Dia teriak-teriak panggil mamanya, "Yuma…Yuma…." Sambil mengipas-ngipas kemaluannya."

Sisi subjektif (*noesis*) adalah tindakan buruh migran perempuan sebagai korban kekerasan dalam *(intended act)* merasakan kekerasan sebagai suatu yang merendahkan dan membunuh harga diri mereka sebagai perempuan, mendengar suara hati mereka dari rasa sakit yang mereka derita sebagai suatu yang harus dimaknai sebagai panggilan untuk bangkit dan berdiri dengan kuat, memikirkan kekerasan yang dialami sebagai sesuatu yang harus direnungi dan dicari jalan keluarnya, dan menilai kekerasan sebagai suatu yang bisa membuat hidupnya berubah menjadi perempuan yang lebih tegar dan kokoh. Seperti penuturan Sayiniah (TKW yang bekerja di Malaysia dan Hongkong) dan Irma (TKW yang bekerja di Kuwait), sebagai berikut. "Diam saja, kalau melawan mereka tambah galak dan kalap. Bahkan, bisa-bisa dikeroyok. 'Saya hanya bisa diam, tapi hati dongkol. Tapi, saya terus berpikir mencari jalan…."

Dalam kajian fenomenologis, buruh migran perempuan adalah aktor yang mengalami tindakan kekerasan atau perilaku komuniksi yang bersifat agresif, evasif, dan koersif (buruk) bersama aktor lainnya yaitu majikan sebagai pelaku kekerasan, sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Aktor juga menjalani proses kebersamaan dalam suatu waktu dan peristiwa tertentu yang terjadi di antara mereka yang bersifat alami, bukan imajiner atau tidak riil. Menurut perspektif Albert Schutz, buruh migran perempuan sebagai aktor yang mengalami kekerasan atau perilaku komunikasi koersif dari majikan mungkin memiliki salah satu dari dua motif, pertama motif yang berorientasi ke masa depan (*in order to motive)* yaitu ingin hidup lebih baik secara ekonomi dan sosial sehingga mereka bertahan dengan penderitaan mereka; dan kedua motif yang berorientasi ke masa lalu (*because motive),* artinya mereka tidak ingin mengulang kepahitan hidup dengan beban ekonomi yang sulit. Hal tersebut diungkapkan oleh buruh migran perempuan Indonesia, Irma, sebagai berikut. "Saya mau menjadi TKW karena saya ingin hidup saya lebih baik di masa depan untuk anak-anak saya". Sementara Sayiniah mengungkapkan: "Ya, buat cari duitlah Mbak…buat keluarga dan masa depan. Hidup saya di desa, di Jember penuh kekurangan, mana ditinggal suami alias dicerai. Jadi harus cari uang untuk anak-anak. Minimal mereka bisa selesai sekolahnya gitu….."

Kedua motif ini akan menentukan penilaian terhadap diri mereka sendiri dalam statusnya sebagai buruh migran. Kondisi ini juga yang akan menentukan gambaran atau citra buruh migran menurut mereka sendiri terhadap "masa yang akan datang dan harapannya" ataupun alasan "masa lalu yang mengakibatkan mereka menjadi korban kekerasan atau perilaku komunikasi yang buruk"

E. Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi: Perspektif Komunikasi Antarbudaya

Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, *material life* atau posisi kelas akan membentuk dan membatasi pemahaman mengenai relasi sosial (Miller, 2005: 304; West & Turner, 2007: 502-503). Dalam konteks ini, majikan merupakan pihak yang selalu dominan dan superior, sementara buruh migran adalah pihak yang inferior dan marjinal, sehingga kekerasan adalah suatu yang dianggap *legitimate* dari relasi kekuasaan tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan Irma sebagai buruh migran perempuan yang mengalami langsung pensubordinasian diakibatkan adanya relasi sosial yang tidak seimbang dan setara, sebagai berikut.

> "Ya, pandangannya sama saja bahwa budaya dan berkomunikasi dengan orang Arab ini sangat sulit, karena mereka sangat memandang status. Kalau kita dianggap sama dengan mereka, mereka baru mau bicara dan memandang kita. Tapi, kalau seperti kita pembantu rumah tangga mana ada komunikasi. Kalau ada suara dari mereka hanya perintah sambil teriak. Padahal kita ini statusnya adalah pekerja bukan budak. Pekerja yang punya surat kontrak dan punya *lawyer.* Tapi, bagi majikan semua surat-surat perjanjian kerja itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah aturan mereka sendiri. Ya suka-suka mereka aja!"

Nisma Abdullah menyatakan bahwa kemampuan komunikasi penting sekali apalagi penguasaan bahasa dan budaya ditempat bekerja. Bila komunikasi salah sedikit saja efeknya menimbulkan emosi majikan, kemarahan dan ketidakpuasan. Apalagi kalau orang Timur Tengah mayoritas membayar kira kira 20-25 juta untuk mengambil pekerja rumah tangga. Jadi, otomatis ketika ia sudah mengeluarkan uang banyak, kemudian orang yang diambil tidak ahli dan siap bekerja, akan menimbulkan persoalan sendiri. Begitu pula, TKW Indonesia itu terkenal tidak lincah alias lembek dibanding dengan TKW negara lain, Filipina misalnya. TKW Indonesia jika dipanggil seringkali diam saja, dan bagi orang Arab etikanya ketika dipanggil sudah harus ada di depan mata mereka. Paling tidak harus lari ketika di panggil. Jadi memang dibutuhkan kesiapan mental dan kesigapan untuk menjadi TKW. Biasanya kesalahan terjadi karena gugup atau karena psikologis pada majikan, dan berpengaruh terhadap pekerjaannya. Dalam keahlian, khusus untuk pembantu rumah tangga sebenarnya teknologi alat rumah tangga mempermudah, namun tidak dikuasai. Misalnya dia tidak tahu bagaimana mengoperasikan mesin cuci. Inilah pemicu utama dari kekerasan terhadap TKW Indonesia.

Kekerasan yang dilakukan terhadap buruh migran perempuan Indonesia oleh majikan menurut Douglas dan Waksler (2002) merupakan kategori kekerasan individu bukan kekerasan kolektif, karena pelaku melakukan kekerasan disebabkan adanya motivasi untuk mengungkapkan aktivitas atau peran mereka, dan ada semacam kesepakatan umum bahwa contoh kekerasan individu dilaporkan jauh lebih sedikit dari contoh kekerasan sesungguhnya. (Santoso, 2002 : 9) Kekerasan sebagai perilaku individu ini bisa terlihat dari pengakuan para TKW yang menjadi korban kekerasan di luar negeri, yaitu Irma dan Sayiniah, sebagai berikut.

> "Pernah mereka pakai tongkat, si nenek 'kan jalannya pakai tongkat. Kalau makanan yang saya masak gak cocok saya dipukul pakai tongkat itu ke punggung. Persoalannya, bila majikan yang punya masalah atau lagi stress ya pembantu lah yang kena sasaran. Ya, jadi sasaran terus, deh..Oya..anaknya yang 5 tahun suka pukuli saya pakai pedang-pedangan. Meskipun main-main tapi saya yang jadi lawan mainnya. Orang tuanya diam saja, tapi kalau anaknya keterlaluan, baru orang tuanya melarang anaknya. Kalu saya merasa kesakitan, mereka bilang kataya saya tidak punya otak, karena yang sedang saya hadapi 'kan anak kecil. Setiap tindak-tanduk saya mereka rekam pakai CCTV di rumahnya, katanya untuk melihat apakah saya mencuri atau tidak atau jahat pada anaknya."

Penuturan Irma: "Saya baru tiba di rumah janda itu, saya langsung diminta mencuci baju. Semua baju yang kotor dia keluarkan. Yang berwarna harus dipisahkan dari baju warna putih. Kemudian selesai mencuci saya disuruh makan, makannya sekerat roti diisi goreng telur, saya baru boleh makan setelah mendengar bel bunyi. Setelah bel berbunyi saya baru makan, tapi belum selesai makan bel sudah bunyi lagi pertanda saya harus selesai makan dan sisa roti itu harus dibuang. Setelah itu saya harus

membersihkan ruangan, sambil diawasi dia pegang rotan lagi."

Kekerasan apa pun yang dialami buruh migran perempuan Indonesia dari pelaku majikan, dalam perspektif komunikasi termasuk dalam bentuk agresi. Karena, kekerasan tidak mungkin dilakukan hanya dalam hati. Menjadi tindakan kekerasan apabila perilakunya tampak atau ditampakkan, baik secara sengaja maupun tidak, baik verbal maupun non-verbal, dan baik terbuka maupun tertutup. Dalam perspektif komunikasi kekerasan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan verbal dan kekersan non-verbal. Kekerasan verbal seperti memaki, mengancam, melecehkan, menghina, merendahkan, dan sebagainya. Sedangkan, kekerasan non-verbal dalam bentuk kekerasan fisik seperti menekan, menyikut, mencubit, memukul, menampar, menendang, mencekik, mencengkeram, membanting, mencakar, menelikung tangan atau kaki, menjambak rambut, membenturkan kepala, dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan, kemarahan, kebencian, hukuman, ancaman, kekejaman, bisa juga pelajaran atau peringatan dari pelakunya. (Pambayun, 2012:438). Pengalaman kekerasan verbal dan nonverbal ini diungkapkan Sayiniah dan Irma, sebagai berikut.

> "Seringnya di kata-katai kasar, kadang dipukul atau dicubit. Pernah rambut saya dijambak. Uang saya diminta agensi atau dipotong. Tidak boleh pegang uang, IC, dan surat-surat kontrak, karena mereka takut saya lari. Pokoknya di Malaysia tidak sebebas di Hongkong. Jam kerja tidak ada batas, tidur hanya 5 jam. Tidur jam 1 malam dan harus bangun jam 4 subuh."

Penuturan Irma: "Yaitu dipukuli, dikata-katai, diremehkan karena kita ini dianggap mereka budak yang sudah mereka beli pada agensi. Dibebani kerjaan sangat banyak dengan waktu tidur hanya empat jam, tapi hanya diberi gaji 45 dinar. Itu pun diberikan bila kontrak kita sudah selesai.Tangan mereka itu ringan sekali untuk memukul, apa saja bisa memicu mereka untuk memukul."

Menurut Nisma Abdullah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta Kekerasan terjadi lebih ke fisik. Kira kira 80%. Misalnya pukulan atau menampar. Ini terjadi misalnya saat majikan bangun, dia biasanya melakukan pengecekan terhadap hasil kerja TKW. Contohnya mengecek debu lantai. Jadi kadang BMI banyak yang menyiasati sesuatu. Namun masalah sering terjadi, ketika TKW bangun jam enam dan majikan bangun pukul 12, TKW yang sudah membersihkan lantai ketika pagi hari, maka lantai sudah berdebu lagi. Maka itu perlu ada penyiasatan, misalnya mengerjakan pekerjaan yang lain ketika majikan belum bangun. Kemudian menjelang majikan bangun, baru mengepel lantai. Agar lantai masih bersih. Kamar mandi, setrika, juga itu tak mudah. Budaya menyetrika orang Arab itu harus licin sekali.

Dalam tindakan kekerasan agresi (istilah Douglas dan Weskler) ini merupakan aplikasi tekanan yang dilakukan pada orang lain, umumnya memang dilakukan dalam kajian komunikasi. (Littlejohn, 1996:109). Terlihat dalam tindakan kekerasan tersebut agresi yang dilancarkan pihak majikan atau pelaku kekerasan meliputi agresi atau serangan yang bersifat a*ssertiveness*, di mana majikan atau pelaku kekerasan bertindak atas kebenaran yang diyakininya sendiri demi kepentingan diri mereka; *argumentativeness,* di mana si majikan selalu menentang apapun yang dikemukakan Sayiniah dan Irma, dan lebih mendukung sudut pandang orang lain dalam hal ini anggota keluarga lain; *hostility,* yaitu tindakan kekerasan yang majikan lakukan merupakan refleksi atau ekspresi dari kemarahan, karena perbedaan budaya, status, ketidakpuasan, dan hambatan komunikasi yang kuat pada pembantu rumah tangganya (TKW Indonesia), yaitu Sayiniah dan Irma; *verbal agresiveness,* di mana si majikan selalu berusaha untuk menyakiti Sayiniah dan Irma sebagai pembantu mereka dengan kata-kata atau emosional bukan secara fisik, seperti menghina, mengasari, mengancam, dan meledakan emosi pada pembantu mereka.

Secara komunikasi antarbudaya, kekuatan bahasa ini di Arab juga menentukan posisi tawar seseorang, karena itu di Arab jarang ada orang yang berkata lembut atau halus. Artinya, teriakan, jeritan, suara dengan volume yang sangat keras, dan intonasi yang kuat ada-

lah budaya atau tradisi komunikasi mereka. (Mulyana, 1999)

Perspektif komunikasi antarkelompok atau antarbudaya memberikan pengertian bahwa tindakan yang buruk biasanya terjadi karena munculnya prasangka atau biasa disebut dengan stereotip *(stereotype*) dan prejudis *(prejudice*). Samovar (1981:122) menjelaskan bahwa stereotipe dan prejudis merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat karena keduanya sering kali terjadi secara bersamaan. Seseorang yang memiliki stereotip yang buruk terhadap buruh migran perempuan juga cenderung memiliki prejudis terhadap perempuan buruh migran perempuan tersebut. Untuk lebih jelasnya pengertian keduanya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. *Stereotip* adalah kepercayaan yang lahir karena seseorang terlalu menyamaratakan, terlalu menyederhanakan, dan terlalu membesar-besarkan persepsinya sendiri, dengan yang biasanya salah sama sekali, bisa jadi setengah salah, atau benar (pada intinya). Ini terjadi dan dialami Irma yang bekerja di Kuwait, dengan pengungkapan sebagai berikut:
   "Perlakuan mereka itu dilakukan karena mereka anggap kita ini berbeda dengan mereka, meskipun mereka itu tidak kaya. Karena mereka menganggap Indonesia itu jorok, kumuh, barbar,dan bau. Habis mereka dicekoki oleh kaumnya dengan tontonan tentang Indonesia yang menggambarkan Indonesia itu seperti suku-suku di Papua seperti suku Asmat yang tidak pakai baju dan makan di hutan begitu….Mereka tidak tahu Bali atau Jakarta, atau kota-kota besar di Indonesia. Maklum yang saya ikuti itu majikan dari suku Badwi yang kolot, terbelakang, hidup gak tentu, pokoknya kalau orang orang Indonesia bilang itu *ndeso,* malah lebih terbelakang dari itu. Di Arab itu, selalu disuguhi tontonan yang buruk-buruk tentang Indonesia: banjir, kurang makan, perkelahian, dan borok-borok Indonesia lainnya.Laki-laki dan perempuan sama-sama kasarnya dan tidak memiliki sikap menghargai bahwa kita itu manusia.Tapi, kalau orang Arab yang kota dan sudah *go international*, mereka kan sudah tahu Indonesia, ya..pasti akan menghargai Indonesia. Setidaknya tidak memperlakukan pembantu sebagai binatang."
b. *Prejudis.* Sikap prejudis ditandai dengan adanya kebiasaan yang selalu menghakimi seseorang atau kelompok tanpa bukti yang jelas. Lebih mengandalkan emosi dan menolak bukti yang benar itu tanda lainnya dari prejudis. Bila kita ingin mengenali prejudis lebih jauh, maka kita dapat melihat dari ungkapan Sayiniah (saat bekerja di Malaysia pada keluarga beretnis China) dan Irma (saat bekerja di Kuwait pada keluarga bersuku Badwi), sebagai berikut. "Saat kerja dengan keluarga janda itu pun saya sudah bilang saya ini punya keahlian dalam kecantikan, tapi mereka malah melecehkan saya. Kata mereka,"Di Indonesia yang terbelakang 'kok ada juru rias!"Padahal saya sudah tunjukkan ijazah dan sertifikat saya. Mereka tetap tidak percaya. Saat saya menuntut ke agensi kenapa saya malah jadi babu, mereka malah semakin menekan saya dengan perlakuan yang tidak manusiawi." Menurut penuturan Sayiniah: "Sering juga dibanding-bandingkan dengan pembantu-pembantu mereka sebelum saya. Itu kan pelecehan buat saya. Akhirnya saya suka tantang mereka, emang pembantu yang lalu bisa apa, saya juga bisa kok!"

Seperti yang telah dinyatakan oleh Alo Liliweri bahwa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya akan lebih sulit dibandingkan dengan mitra bicara yang sama budayanya. Tingkat kesulitan itu dapat berasal dari perbedaan fisik, emosional, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, nonverbal, dan kompetisi (Liliweri, 2002:74).

F. Kekerasan menurut Teori Muted-Group

Secara komunikasi antarbudaya relasi perempuan-laki-laki dapat dilihat dari perbedaan-perbedaan budaya, nilai, norma, dan status yang diperankan mereka masing-masing. Perempuan sebagai anggota kelompok subordinat tidak memiliki kebebasan seperti yang dimi-

liki laki-laki dalam mengungkapkan apa yang mereka inginkan, karena kata-kata dan norma-norma yang mereka gunakan diformulasikan oleh kelompok dominan, laki-laki. (Griffin, 1997: 459) Perbedaan ini sangat kontras terlihat saat diungkapkan kedua buruh migran perempuan Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia dan Kuwait yaitu Sayiniah dan Irma, sebagai berikut. "Selain pukulan kan gaji tidak dibayarkan. Majikan saya bilang, "Sudah untung kamu kerja dengan saya tidak dibayar, tapi kan di kasih makan dan baju, tidak seperti di negara kamu. Di Indonesia 'kan kamu telanjang dan makan cuma ubi kayu di hutan". Pokoknya kita ini dianggap sampah! Mau kaya atau miskin mereka tetap menganggap pembantu itu statusnya rendah sekali. Meskipun hidup tidak kaya, mereka itu minta dilayani seperti ratu atau raja. Setelah kita bekerja seharian mereka kalau malam minta dipijit atau apa saja." Sementara penuturan Sayiniah: "Apalagi kalau mereka tidak puas dengan cara kerja dan komunikasi kita. Padahal saat kerja itu ada masa adaptasi 4 bulan, tapi tidak berlaku. Masa adaptasi itu tetap tidak dihitung. 'Kan, kalau masa adaptasi itu komunikasi dan cara kerja kita masih kaku. Nah, kalau kelihatan *gak* beres, ya, saya dibentak-bentak. Semakin sering dibentak ya semakin gugup dan takut 'kan saya….jadi kalau kerja jadi *gak* keruan gitu. Nah, …kondisi tidak keruan itu membuat majikan terus gencar marahi saya. "

Senada dengan para buruh migran perempuan tersebut, Nisma Abdullah menegaskan bahwa persoalan budaya ini sangat sulit didobrak. Budaya di Arab dan Malaysia itu sangat kaku dan tertutup pada orang luar. TKW yang sudah bekerja di mereka sudah dianggap budak mereka, artinya milik mereka dan seolah-olah putus dengan dunia luar. Sulit sekali menembus komunikasi dengan mereka. Apalagi orang Indonesia seperti TKW ini sama sekali tidak *powerfull* untuk melawan majikan. HP mereka seringkali disita, bahkan tidak dikembalikan. Bila ketahuan akan mengakibatkan penyiksaan. Karena itu, harus ditekankan kepada para tenaga kerja Indonesia, misalnya ketika dimarahi majikan, meskipun merasa bersalah, jangan terlalu menundukan muka karena bagi mereka budaya sopan santun seperti menunjukkan suatu kelemahan dan kemalasan.

Apalagi kedua negara tersebut (Timur Tengah dan Malaysia) masyarakatnya 'kan masih menganut patriarkis ditambah prasangka budaya dan sosialnya tinggi terhadap orang Indonesia. Jadi, sulit untuk memberi keyakinan pada mereka untuk percaya pada TKW kita . Kramarae (Littlejohn, 1996:239-240) mengembangkan tujuh hipotesis tentang komunikasi perempuan, ia menegaskan bahwa: Pertama, perempuan sangat sulit mengekspresikan dirinya dibandingkan laki-laki, karena itu pengalaman mereka kehilangan suaranya. Laki-laki pun enggan berbagi pengalaman dengan perempuan. Kebisuan ini dialami oleh Sayiniah ketika bekerja dengan keluarga beretnis China di Malaysia, sebagai berikut.

> "Diam saja, kalau melawan mereka tambah galak dan kalap. Bahkan bisa-bisa dikero-yok. 'Kan takut saya. Setiap gerak-gerik saya diawasi terus. Bahkan bila main ke taman saja, majikan juga terus mengikuti."

Kedua, perempuan dianggap lebih mudah memahami makna laki-laki dibanding laki-laki memahami perempuan. Laki-laki kurang ekspresif dalam berkomunikasi dan cenderung mengembalikan masalah pada kekuatan logika. Berikut pengalaman Sayiniah saat bekerja dengan keluarga beretnis China di Malaysia. "Saya sudah mengalami kekerasan gak begitu lama setelah saya bekerja. Kekerasan yang dialami tidak boleh keluar rumah, hp tidak boleh punya/dipergunakan, passport dibawa majikan, tidak ada libur kerja, 5 jam tidur sehari. Susah untuk solat juga.Karena dianggap buang waktu dan mengurangi jam kerja saya, katanya."

Ketiga, perempuan menciptakan makna-makna ekspresi mereka sendiri di luar sistem dominan laki-laki. Karena itu, perempuan cenderung berkomunikasi secara nonverbal, disebabkan verbal mereka tidak dipedulikan. Seperti yang dialami Sayiniah saat mengekspresikan kekecewaan dan sakit hatinya karena perilaku komunikasi yang di luar batas rasional majikannya di Malaysia, sebagai berikut. "Semula, sih, syok, tapi lama-kelamaan saya tahan dan anggap biasa. Asal tidak berlebihan saja. Kalau sudah merasa tidak kuat dan ingin menangis saya lari ke kamar mandi. Paling bisa menangis, itu pun di kamar atau kamar mandi.

Karena kalau ketahuan bisa tambah dimarahi. Katanya nanti ketahuan agen. Pokoknya gak boleh menangis dihadapan mereka. Saat satu bulan sih masih dielus-elus kalau menangis, tapi setelah lewat satu bulan itu ya mulai saya dibentaki setiap hari."

Pengalaman Irma dituturkan sebagai berikut. "Kalau komunikasi bicara maksudnya saya termasuk orang yang lancar, tapi kalau sudah masalah bahasa sedikit terhambat. Tapi 'kan ada bahasa tubuh, jadi bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan majikan. Di BLK PPTKIS dipelajari memang bahasa tapi tidak lama, sebelum menguasai kita sudah diberangkatkan."

Keempat, perempuan seringkali mengekspresikan ketidakpuasan pada komunikasi dibandingkan laki-laki. Misalnya, gossip dan keluhan kerap dilakukan perempuan sebagai ungkapan emosionalitas mereka. Hal ini pernah dilakukan Sayiniah dan Irma meskipun sangat sulit dilakukan, dikarenakan akses dirintangi dan alat komunikasi dirampas majikan mereka, berikut penuturan Sayiniah: "Ya, kata mereka (teman-teman), kekerasan katanya ada di mana-mana. Sifat orang Malaysia itu keras dan, gak, mau ngerti. Kalau diajak bicara, bilang mulut saya akan dipukul nanti. Teman-teman lebih parah dari saya, ada yang sering tidak dikasih makan berhari-hari. Sama-sama tidak bisa pegang uang, jadi tidak bisa beli sendiri. Kalaupun dikasih makan, tapi makanan basi dan sudah tidak enak dimakan. Bila kita bertemu sering kita ngobrol bagaimana cara kita bersatu untuk mengambil tindakan. Paling ke teman-teman yang, gak, sengaja saya temui di pasar atau di mana gitu. Mereka juga sama diperlakukan kasar juga sama majikan. Bahkan, lebih sadis dari saya. Ada yang tidak dikasih makan, ada juga yang disekap di kamar tiga hari."

Irma juga menuturkan: "Ya, gak, pakai apa-apa. Wong, saya, gak, pakai alat HP atau semacamnya. Kan, dipegang si nyonya. Agar saya, gak, ngadu katanya. Ngobrol dengan teman-teman juga gak boleh karena takut dipengaruhi katanya. Kalau saya menulis surat ke keluarga saya saja mereka bilang akan memotong gaji saya. Rumah mereka juga tingkat tinggi, jadi tidak ada celah untuk saling berbicara dengan tetangga sebelah. Pokoknya serba tertutup dan terkekang komunikasinya. Mengirim uang saja hanya setahun sekali, majikan pula yang mengirimkannya, bukan saya. Tapi itu pun hanya satu bulan gaji dari setahun kerja yang bisa dikirimkan ke keluarga saya. Takut uangnya dipakai mantan suami saya, bukan untuk anak-anak saya."

Kelima, perempuan seringkali mengubah aturan-aturan komunikasi dominan untuk melawan aturan-aturan baku atau konvensional. Kedua buruh migran perempuan Indonesia yang bernama Sayiniah dan Irma sebenarnya merupakan perempuan-perempuan yang aktif, asertif, dan terbuka sehingga keinginan untuk melawan seringkali menghinggapi akal sehat mereka karena opresi atau tindakan kekerasan majikan sudah tidak bisa ditolerir lagi, namun keterbatasan ruang, waktu, dan instrument membuat hasrat, ide, dan tindakan mereka terhalangi, bahkan menjadi kebisuan semata. Hal tersebut mereka ungkapkan sebagai berikut. Sayiniah: "Ya, saya jadi harus lebih hati-hati dan harus lebih kuat. Dan harus lebih banyak teman juga tahu harus lari ke mana kalau diperlakukan tidak layak oleh majikan."

Irma menuturkan: "Ya, sangat. Saya tidak merasa harus kapok dengan perlakuan majikan saya dahulu, karena setiap orang itu berbeda. Saya yakin masih banyak orang yang berhati mulia di luar sana. Saya berdoa agar tidak lagi menemui orang-orang yang berperilaku sadis semacam majikan saya atau majikan teman-teman saya yang bernasib tragis. Saya masih bersyukur tidak mengalami kekerasan yang dapat merenggut jiwa atau menjadikan tubuh saya cacat. Karena itu, kekerasan dan perilaku komunikasi mereka dapat menjadi renungan saya untuk menghadapi hidup ini lebih tegar dan kuat.

Keenam, secara tradisional perempuan kurang suka untuk membuat kata-kata baru yang bisa menjadi popular di masyarakat luas. Terakhir, perempuan lebih senang bercanda dibanding laki-laki. Pengalaman untuk mencoba bercanda pernah dialami Sayiniah saat bekerja pada keluarga beretnis China di Malaysia, berikut penuturannya: "Bahasa mereka juga Melayu kasar, padahal saya belajar Melayu halus dan baik. Jadi, kita sering beda pengertian saja. Mak-

sud saya baik, eh..mereka menganggap saya main-main. Seperti, saya pernah dimarahi mereka, lalu saya tersenyum karena saya anggap kesalahan saya tidak besar, eh...mereka maki-maki saya dianggap meremehkan mereka."

Muted-group theory ini merupakan teori komunikasi yang sangat sesuai untuk melihat pengalaman dan kesadaran perempuan (buruh migran) di lingkungan kerjanya. Teori ini mengekplorasi struktur yang melatarbelakangi terjadinya opresi buruh migran perempuan oleh majikannya yang memiliki latar belakang budaya tertentu atau berbeda, dan menyarankan terjadinya perubahan yang positif. Berikut pengalaman para buruh migran perempuan Indonesia, Sayiniah dan Irma dalam melakukan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan cerah:

Penuturan Irma: "Saya tetap melanjutkan hidup saya dengan menjadi ibu rumah tangga bagi anak-anak saya. Aktif di organisasi yang dapat membantu teman-teman sesama TKW di Indonesia agar mereka tidak mengalami nasib buruk seperti saya dan yang lainnya. Kalau di Filipina, saya lihat walaupun TKW diurus swasta tapi campur tangan pemerintah sangat kuat dan *powerful.* Sedangkan di Indonesia daya tawar kita di Indonesia ini sangat lemah." Sementara penuturan Sayiniah: "Saya memiliki perkumpulan dengan teman-teman yang senasib. Bahkan saya tergabung di Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai relawan. Saya ingin membuktikan pada keluarga dan para tetangga saya bahwa saya bisa berhasil sebagai *single parent*. Selama ini mantan suami dan tetangga saya mengira saya sebagai pelacur di Malaysia, makanya saya akan bawa sertifikat kerja saya bahwa saya benar-benar kerja di Malaysia dan Hongkong sebagai pembantu rumah tangga."

Dalam pendekatan *Muted-Group Theory* terlihat bahwa Sayiniah dan Irma sebagai korban kekerasan atau perilaku komunikasi yang tidak pantas sehingga mengalami kebisuan atau dibisukan oleh kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan muncul menjadi perempuan yang memiliki kekuatan untuk bangkit dalam mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat, juga bermanfaat bagi sesamanya. Seperti yang diungkapkan Nisma Abdullah, ketua SBMI bahwa ada sebagaian yang buruh migran perempuan yang bersikap menjadi ketakutan karena trauma, tapi ada juga yang cepat pulih dan melupakan peristiwa yang dialaminya. Karena, kebutuhan ekonomi lebih mendesak dibanding perasaan tertekan mereka. Banyak yang mereka bisa pelajari dari kekerasan tersebut. Salah satunya mengetahui budaya-budaya majikan atau individu tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka banyak yang bergabung dengan SBMI untuk menjadi relawan dalam bentuk pelayanan konsultasi, mediasi, advokasi, monitoring, dan pendampingan dalam mulai dari proses perekrutan di PPTKIS sampai pasca bekerja di luar negeri, khususnya bagi para buruh migran perempuan yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal dan psikologis.

G. Rangkuman

Penelitian yang menggunakan Pendekatan Fenomenologi dalam mengungkap Kekerasan sebagai Perilaku Komunikasi pada Buruh Migran Perempuan Indonesia ini bermaksud mengeksplorasi pengalaman kekerasan para buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti Timur Tengah dan Malaysia juga Hongkong. Realitas terjadinya penyiksaan dan pensubordinasian terhadap buruh migran perempuan yang mencapai 80 persen dari total buruh migran atau TKW ini nasibnya tidak sebanding dengan masa depan para buruh migran perempuan ini sebagai pahlawan devisa bagi negara. Karena posisi tawar mereka yang lemah ditambah ketidakmampuan dalam komunikasi, TKW seringkali mendapat perlakukan tidak adil berupa penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Potret ketidakadilan terhadap TKW yang mengadu nasib di luar negeri semakin menambah luka dan harga diri bangsa Indonesia semakin terinjak-injak oleh bangsa lain.

Dari hasil eksplorasi melalui wawancara mendalam dengan para buruh migran perempuan Indonesia ini, lebih sering mengalami kekerasan atau agresi fisik, seperti dipukul, dijambak, ditampar, bahkan disentuh bagian-bagian yang terlarang, baik menggunakan tangan maupun rotan atau benda-benda tumpul lainnya. Kekerasan verbal yang dialami buruh

migran perempuan seperti dibentak, dimaki, dilecehkan atau dihina, dan sebagainya. Kekerasan lain yang bersifat material pun mereka alami seperti dirampasnya HP dan dokumen-dokumen penting, dipotong dan ditahan gaji, tidak diberi uang jajan atau keperluan yang mereka butuhkan. Munculnya kekerasan atau perilaku komunikasi tidak pantas ini karena minimnya pembekalan akan keterampilan *(skill),* bahasa dan budaya setempat, dan penyuluhan tentang hal-hal yang disebutkan tadi, sehingga mereka rawan menjadi sasaran ketidakpuasan sang majikan yang menggaji mereka, yang bukan tidak mungkin akan berujung pada tindakan-tindakan pelecehan seksual dan kekerasan kepada TKW/TKI.

Khususnya dalam persoalan komunikasi antarbudaya, terungkap bahwa para buruh migran perempuan ini mengalami hambatan komunikasi dan budaya yang sangat kuat.Hal ini disebabkan tertanamnya stereotip dan *prejudice* yang telah berlangsung lama dari para majikan yang berbangsa Arab dan Malaysia terhadap para pembantu mereka yang berasal dari Indonesia. Majikan dari kedua negara ini memiliki stereotip bahwa orang Indonesia itu kurang disiplin, lamban, lemah, dan tidak ahli bekerja sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak pantas disebabkan ketidakpuasan dalam relasi sosial mereka. Selain penguasaan kedua unsur bahasa dan budaya, yang berimplikasi pada kompleksitas komunikasi juga adanya budaya machoisme atau ideologi patriarkis yang sangat kental di kalangan bangsa Arab dan Malaysia, yang menganggap bahwa pembantu adalah objek kekuasaan dan kekuatan mereka sebagai pembeli atau penguasa ekonomi. Oleh karena itu, buruh migran perempuan yang dianggap sebagai *the other* komunikasinya dibungkam atau dibisukan, sehingga mereka tidak bisa lagi mengekspresikan perasaan, pikiran, bahkan keberadaan mereka sebagai manusia yang bermartabat dan mulia di mata Allah Yang Maha Esa.

Pustaka Acuan

Craib, Ian. 1984. *Teori-Teori Sosial dan Modern: dari Parson sampai Habermas.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative*. USA: Sage.

Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. 1994. *Handbook of Qualitative Research.* London: Sage.

Gorman, GE dan Clayton, Peter. 1997. *Qualitative Research for the Information Professional.* London: Library.

Griffin, EM. 1997.*A First Look at Communication Theory*: Third Edition. New York: The McGraw Hill.

Gudykunts. William B, Stella Ting-Toomey, dan Elizabeth-Chua.1988. *Culture and Interpersonal Communication.* New York Park: Sage.

Littlejohn, Stephen W. 1996. *Thories of Human Communication*. London: Wadsworth

Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. 2005. *Thories of Human Communication.* London: Wadsworth

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya**.**

Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Budaya Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat.1990*. Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy.2011*. Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Oey, Mayling. 2004. *Perubahan Pola Kerja Kaum Perempuan di Indonesia Selama Dasawarsa 1970: Sebab dan Akibatnya" dalam Liza Hadiz (editor), Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru.* Jakarta: LP3S..

Pambayun, Ellys Lestari. 2009. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya.* Bandung: Nuansa.

Pambayun, Ellys Lestari. 2012. *Communication Quotient: Kecerdasan Komunikasi dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual*. Bandung: Rosdakarya.

Santoso, Thomas.2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia-Universitas Kristen Petra.

Susilo, Wahyu. 2002. Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia, (dalam Jurnal Perempuan): *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan.* Edisi 26.

Unger, Rhoda & Crawford, Mary. 1992. *Women and Gender: A Feminist Psychology.* USA: McGraw Hill.

http://Sudarmanti. blogspot.com. Diakses 2012.

http://www.formatnews.c

4

Hubungan antara Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas Anak-anak Tunanetra
Correlation of Self Concept and Self-regulation with Self-orientation and Mobility Skill of the Children with Visual Impairment

Rull Rangingisan
Dosen pada Jurusan pendidikan Khusus; FIP UNIMA
Alamat: Kaaten Tomohon Telepon 0431-353685. E-mail: rangngisanrull@yahoo.co.
Diterima 18 Januari 2013, disetujui 20 Juli 2013.

Abstract

The aim of this research is to know the correlation of self concept and self regulation with the orientation and mobility skill of the children with visual impairment. The hypothesis stated in this research were: There were correlation of self concept and self regulation with the orientation and mobility skill of the children with visual impairment. Increasing self concept and self regulation were indicating the increasing of the skill orientation and mobility. The subjects were 27 visual impairment children studied at education for visual impairment Bartemeus, Manado. The data collected were scale orientation and mobility, self concept and self regulation, and analysed by regression. The result for regression analysis showed: first, the contribution of self concept and self regulation to skill orientation and mobility were significant. Second, there was significant correlation between self concept and skill orientation and mobility. Third, there was significant correlation between self regulation and orientation with mobility skill for visual impairment.

Key Words:
Orientation and Mobility Skills-Self Concept and Self Regulation

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada korelasi antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Subjek dalam penelitian ini adalah 27 anak tunanetra di lembaga pendidikan Tunanetra Bartemeus, Manado. Data yang dikoleksi meliputi ukuran keterampilan orientasi dan mobilitas diri, konsep diri dan regulasi diri, dianalisis dengan regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan: pertama, sumbangan konsep diri dan regulasi diri pada keterampilan orientasi dan mobilitas sangat signifikan. Kedua, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan keterampilan orientasi dan mobilitas. Ketiga, ada hubungan yang signifikan antara regulasi diri dan orientasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas pada anak-anak tunanetra.

Kata Kunci:
Keterampilan Orientasi dan Mobilitas- Konsep Diri dan Regulasi

A. Entitas Anak-anak Tunanetra

Perkiraan jumlah populasi yang mengalami gangguan penglihatan serta orang buta di Indonesia adalah 3.450.000 (www.mitra netra. or.id). Organisasi kesehatan sedunia (WHO) memperkirakan juga bahwa terdapat paling tidak sepuluh juta orang buta di dunia, dengan peningkatan jumlah setiap tahun (Cartwright dkk., 1981). Menurut WHO, jumlah orang dengan lemah penglihatan (*low vision*) di negara sedang berkembang pada umumnya adalah tiga kali lipat jumlah orang buta. Ini berarti jika jumlah orang buta di Indonesia 3,450,000 orang, maka jumlah orang yang lemah penglihatan adalah 10.350.000 orang. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan di delapan provinsi yang diselenggarakan tahun 1996, angka kebutaan di Indonesia adalah satu setengah persen dari jumlah penduduk. Jika saat ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 230 juta-hasil sensus 2000, maka berarti jumlah orang buta di Indonesia adalah 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu orang). Jika digabungkan jumlah orang buta dengan lemah penglihatan di Indonesia berdasarkan dua estimasi tersebut di atas maka total tunanetra di Indonesia adalah 13,800,000 (tiga belas juta delapan ratus ribu orang).

Bagaimanakah reaksi seseorang apabila melihat orang lain yang buta sedang berjalan atau sedang duduk di tempat umum atau apakah yang diharapkan bagi mereka yang buta? Pertanyaan yang muncul mengenai reaksi dan harapan terhadap mereka yang memiliki gangguan penglihatan atau yang disebut buta, sangat beragam. Beberapa orang mungkin mempunyai sikap positif, tetapi mungkin ada yang mempunyai reaksi negatif. Cartwright, dkk. (1981) mengidentifikasi empat sikap orang pada umumnya terhadap mereka yang mempunyai gangguan penglihatan, yakni : merasa kasihan (*pity*), merasa kuatir (*fear*), merasa salah (*guilty*) dan merasa gelisah (*discomfort*).

Sikap, harapan, dan reaksi pada individu dengan kondisi yang mempunyai gangguan penglihatan dapat meningkatkan bantuan untuk menentukan jalan bagi kehidupan tunanetra, serta kemampuan dan interaksi mereka dengan orang lain (Barraga dan Scott, dalam Cartwright dkk. 1981).Garaigordobil dan Bernaras (2009) menemukan bahwa gangguan penglihatan dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan rendah diri yang berdampak pada kurangnya penerimaan sosial, rendahnya nilai akademik,ketidak mampuan fisik dan miskin dalam penyesuaian sosial. Nadeau dan Tessier (2006) mengatakan bahwa adanya kecacatan fisik menyebabkan individu diasingkan dan tidak dilibatkan oleh lingkungannya padahal mereka juga membutuhkan relasi sosial, diterima dalam lingkungannya dan adanya hubungan timbal balik. Walaupun mereka merupakan kelompok kecil di antara manusia di dunia ini, tetapi sebagai manusia perlu untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal, agar mereka dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Lembaga pendidikan yang menangani anak-anak yang mempunyai gangguan penglihatan antara lain adalah Sekolah Luar Biasa Bagian A (SLB-A) yang di dalamnya dididik anak tunanetra, mengharuskan diselenggarakannya program orientasi dan mobilitas. Kalley (2006) mengemukakan bahwa orientasi dan mobilitas memberikan pengajaran kepada individu dengan gangguan penglihatan dalam menggunakan indera yang masih berfungsi untuk menentukan posisi mereka dengan lingkungan dan teknik untuk berpindah secara aman dari satu tempat ke tempat yang lain. Martinez (1998) mengatakan bahwa latihan orientasi dan mobilitas (OM) membantu tunanetra mengetahui dimana dia berada dan kemana dia ingin pergi (orientasi), dan juga membantu dia melaksanakan keinginan tersebut. Melalui orientasi dan mobilitas, tunanetra diharapkan dapat menggunakan semua indera yang masih berfungsi, dapat mengetahui dimana dia berada, dan dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada orang lain. Orientasi dan mobilitas juga menyanggupkan tunanetra melakukan gerak pindah dari satu tempat ke tempat lain yang diinginkan, dapat menimbulkan kepercayaan diri, berani menghadapi kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Emerson dan Corn (2006) mengatakan bahwa tujuan yang penting

orientasi dan mobilitas adalah memungkinkan siswa untuk memasuki setiap lingkungan yang sudah dikenal atau belum dikenal dengan aman, efisien, senang dan mandiri.

Tunanetra adalah suatu istilah yang digunakan pada mereka yang tidak dapat mempergunakan alat penglihat dalam kegiatan hidup sehari-hari. Depdikbud (1985) memberikan pengertian tunanetra sebagai berikut: seorang dinyatakan tunanetra apabila penglihatannya dikoreksi secara maksimal ia tidak dapat mempergunakan fasilitas pendidikan atau pengajaran yang pada umumnyadigunakan oleh anak-anak awas. Barraga (dalam Purwaka, 2005) memberi pengertian tunanetra sebagai suatu cacat penglihatan sehingga mengganggu proses belajar dan pencapaian belajar secara optimal sehingga diperlukan metode pengajaran, pembelajaran, penyesuaian bahan pelajaran dan lingkungan belajar.

Masalah yang sangat mendasar yang dirasakan oleh tunanetra adalah kurangnya informasi melalui rangsangan visual karena keterbatasan alat visualnya. Dampak ketunanetraan sangat mempengaruhi emosi dari tunanetra itu sendiri, namun dengan adanya program orientasi dan mobilitas maka tunanetra dapat mengatasi sebagian kesulitan yang mereka hadapi. Kemampuan orientasi dan mobilitas merupakan modal utama bagi tunanetra dalam menghadapi kehidupannya agar mereka dapat melakukan aktivitas sendiri dalam kegiatan hidup sehari-harinya. Agar anak tunanetra dapat bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain yang diinginkannya, dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari (seperti mandi sendiri, menyikat gigi sendiri, merawat rambut, mencuci pakaian, menyeterika pakaian, memasak, menggunakan kamar kecil), dapat menghindarkan diri dari bahaya, perlu melatih indera-indera yang masih berfungsi. Indera-indera yang masih berfungsi dapat digunakan oleh tunanetra untuk mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Raharja (2008) mengatakan bahwa Orientasi adalah proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek yang ada dalam lingkungannya. Untuk dapat mengorientasikan dirinya dalam lingkungan, tunanetra harus terlebih dahulu faham betul tentang konsep dirinya (Raharja, 2008). selanjutnya Rahardja (2008) menjelaskan bahwa Konsep diri tunanetra pada awalnya berhubungan dengan citra tubuh (*body image*) yakni suatu kesadaran atau pengetahuan tentang bagian tubuh, fungsi bagian-bagian tubuh, nama bagian tubuh, dan hubungan antara bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Kesadaran dan pengetahuan diri ini akan mempengaruhi gerak orang tunanetra dalam ruang akan efisien. Kesadaran dan pengetahuan diri pula merupakan dasar bagi tunanetra mengenal siapa dia, dimana dia berada, dan bagaimana sampai ke tujuan. Apabila ia dapat dengan baik mengetahui konsep dirinya, orang tunanetra akan mudah membawa dirinya memasuki lingkungan atau membawa lingkungan ke arah dirinya. Atkinson dkk (1996) menjelaskan bahwa konsep diri adalah susunan berbagai gagasan, perasaan, dan sikap yang dipunyai orang mengenai diri mereka sendiri. Adanya konsep diri akan memperkuat mobilitas tunanetra itu sendiri. Irham dan Hadikasma (1996) menjelaskan bahwa konsep-konsep yang dimiliki tunanetra dapat membangun dan memperkokoh mobilitas tunanetra.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini konsep diri mengacu pada pendapat Husdarta (2010), yakni cara individu memandang dirinya sendiri secara utuh, baik fisik, emosi, intelektual, sosial dan spiritual, kepribadian, kemampuannya, nilai, tujuan dan peranan. *American Foundation for the Blind* (2009) menetapkan bahwa orientasi adalah kemampuan tunanetra untuk membuat suatu peta mental mengetahui tempat berada dan kemana tempat yang diinginkan untuk pergi. Mobilitas adalah suatu aktivitas mencapai tujuan. Orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan harus mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilitas. Keterampilan orientasi dan mobilitas meliputi berjalan dengan pendamping awas, menggunakan tongkat putih yang panjang, dan teknik untuk menggunakan ingatan dan perasaan sehingga dapat bergerak bebas dan aman. Keterampilan mobilitas sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan tunanetra meng-

gunakan indera-indera yang masih berfungsi untuk menerima rangsangan serta memahami hubungan lokasi antara diri dengan objek-objek di lingkungan sekitar dan antara satu objek dengan objek lainnya di dalam lingkungan. Tunanetra dapat menilai kemampuannya, dan mempunyai harapan akan masa depan dengan kemampuan-kemampuannya terutama dalam melakukan gerak (mobilitas) untuk memenuhi kebutuhannya.

Keterampilan orientasi dan mobilitas dalam penelitian ini adalah kesadaran tunanetra mendapatkan informasi tentang dunia melalui pendengaran, penciuman, perabaan dan perasaan, kemampuan tunanetra untuk melindungi diri jika berjalan terutama di tempat yang belum dikenal, kemampuan untuk menggunakan tongkat dan kemampuan untuk berjalan dengan pendamping awas.

Menurut cerita tunanetra sendiri bahwa masalah yang sering dihadapi tunanetra dalam melakukan gerak pindah dari satu tempat ke tempat lain yang diinginkan yakni sering kepalanya atau kakinya terbentur dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, dan sering anak tunanetra mengalami kekecewaan dan gagal mencapai tujuan. Kegagalan dan kekecewaan yang dialami tunanetra membuat mereka merasa tidak senang, marah dan kecewa. Menghadapi kegagalan ini maka tunanetra perlu mengatur diri (*self Regulation*) yang ada dalam dirinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Anderson dkk (2007) mengatakan bahwa regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur tujuannya, merencanakan dan memonitor apa yang mereka lakukan. Santrock (2007) menjelaskan bahwa pembelajaran regulasi diri adalah memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian DeWall, Baumeister, dan Vohs (2008) menjelaskan bahwa regulasi diri bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas dalam berbagai cara, termasuk mengatur atau memaksimalkan usaha, melihat kesalahan-kesalahan, gigih melakukan kegiatan walaupun mengalami kegagalan, terampil dan tepat serta tenang melakukan pekerjaan.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas maka dalam penelitian ini pengertian regulasi diri adalah suatu proses atau strategi bagaimana tunanetra dapat mengatur, memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan dalam melakukan orientasi dan mobilitas dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beriut: Apakah konsep diri dan regulasi diri ada hubungan dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif untuk melihat hubungan konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak tunanetra yang sedang belajar pada Sekolah Luar Biasa bagian A Bartemeus Manado. Penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena semua anak tunanetra dijadikan subjek penelitian.

Hiptesis penelitian ini adalah terdapat hubungan antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi ganda. Hartono (2008) mengatakan bahwa regresi ganda berguna untuk mencari hubungan fungsional antara dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan teknik analisis regresi ganda dengan alasan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yakni konsep diri dan regulasi diri sebagai prediktor, dan satu variabel dependen yaitu keterampilan orientasi dan mobilitas sebagai kriteriumnya. Analisis regresi ganda ini digunakan untuk mengetahui korelasi antara konsep diri dan regulasi diri secara bersama-sama terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. Skala tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang diharapkan dapat mengukur keterampilan orientasi dan mobilitas, konsep diri dan regulasi

diri anak-anak tunanetra. Azwar (2008) menjelaskan bahwa pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut, pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid yang dilakukan secara sistematis. Skala-skala tersebut di buat dalam tulisan Braille sehingga anak-anak tunanetra dapat membaca sendiri pernyataan-pernyataan dan dengan bebas tunanetra memilih item yang tersedia. Skala pengukuran yang diberikan kepada subjek penelitian terdiri dari:

1. Skala Keterampilan Orientasi dan Mobilitas: untuk mengukur keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra yang disusun penulis berdasarkan teori keterampilan orientasi dan mobilitas yang dikemukakan Martinez (1998). Keterampilan orientasi dan mobilitas dengan indikator-indikator: kesadaran (mendapatkan informasi melalui pendengaran, penciuman, sentuhan dan sisa penglihatan), teknik-teknik melindungi diri dan keterampilan menggunakan tongkat.
2. Skala Konsep Diri: digunakan skala konsep diri yang disusun penulis berdasarkan teori konsep diri yang dikemukakan oleh Calhoun dan Acocella (1990). Aspek-aspek yang diukur adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri, harapan dan penialaian tentang dirinya sendiri.
3. Skala Regulasi Diri: untuk mengukur regulasi diri yang dimiliki tunanetra digunakan skala regulasi diri yang disusun penulis berdasarkan teori regulasi diri yang dikemukakan oleh Pintrich dkk, (2008). Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur regulasi diri adalah: perencanaan, monitoring; mengatur dan mengontrol usaha-usaha terhadap tugas yang diberikan; mengingat dan memahami materi yang diberikan.

Pengujian alat ukur dilakukan secara kuantitatif. Azwar (2008) menjelaskan bahwa pengukuran merupakan proses kuantifikasi suatu atribut, pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid yang dilakukan secara sistematis. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi ganda. Hartono (2008) mengatakan bahwa regresi ganda berguna untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Menggunakan teknik analisis regresi dengan alasan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yakni konsep diri dan regulasi diri sebagai prediktor, dan satu variabel dependen yaitu keterampilan orientasi dan mobilitas sebagai kriteriumnya. Analisis regresi ganda ini digunakan untuk mengetahui korelasi antara konsep diri dan regulasi diri secara bersama-sama terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra.

C. Hasil Pengukuran Statistik Antarvariabel (Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas)

Hasil analisis statistik reliabilitas item-item pada skala orientasidan mobilitas (.821), konsep diri (.838) dan regulasi diri(.815) diperoleh nilai lebih dari .800 pada Cronbach's Alpha, *criteria indeks reliability* sangat tinggi (Agung, 2010). Dari tampilan *out put SPSS* terlihat bahwa *Corrected item total correlation* (korelasi antara butir dan total butir) menunjukkan angka lebih besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah valid. Dari deskripsi subjek penelitian di atas tampak bahwa kebanyakan tunanetra yang dijadikan subjek penelitian dan mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut adalah laki-laki dengan jumlah 14 orang dan perempuan 13 orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 27.

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran butir-butir ketiga skala yakni skala orientasi dan mobilitas, skala konsep diri dan skala regulasi diri adalah berdistribusi normal sehingga Ho di terima dan menolak Ha. Hasil uji linier antara variabel orientasi dan mobilitas dengan konsep diri dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p< 0,05$). Hasil uji berdasarkan kaidah menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah linier. Hasil uji linearitas antara variabel orientasi dan mobilitas dengan regulasi diri dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p< 0,05$). Hasil uji berdasarkan kaidah menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel adalah linier. Berdasarkan hasil analisis statistik Regresi dengan SPSS 15 *(windows)* bahwa secara bersama-sama konsep diri dan regulasi

diri berhubungan dengan keterampilan orientasi dan mobilitas karena dari tampilan *output* SPSS model *summary* besarnya R-*Square* adalah 0.770, hal ini berarti 77 % sumbangan konsep diri dan regulasi diri terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas. Sisanya (100 % - 77 % = 23 %) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Analisis varian (ANOVA) untuk menguji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tampilan ANOVA menunjukkan bahwa F = 40.110 ; P = 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), berarti bahwa pengaruh konsep diri dan regulasi diri sangat signifikan terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra. Karena probabilitas (p < 0,05) maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra atau dapat pula dikatakan bahwa konsep diri dan regulasi diri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhubungan dengan keterampilan orientasi dan mobilitas sehingga hipotesis yang mengatakan ada hubungan antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara keterampilan orientasi dan mobilitas dengan konsep diri signifikan karena r = 0.475, taraf signifikansi 0.006 lebih kecil dari 0.05 (p < 0.05). Kemudian korelasi antara keterampilan orientasi dan mobilitas dengan regulasi diri sangat signifikan karena r = 0.814, taraf signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 (p < 0.05), dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kesesuian antara teori dan hasil penelitian.

D. Deskripsi tentang Keterhubungan Antarvariabel (Konsep Diri dan Regulasi Diri dengan Keterampilan Orientasi dan Mobilitas)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi dua variabel bebas yaitu konsep diri dan regulasi diri serta satu variabel terikat yaitu keterampilan orientasi dan mobilitas. Indikator variable-variabel yang diukur adalah sebagai berikut.

1. Konsep diri dengan indikator: Pengetahuan: Aspek konsep diri ini adalah yang berhubungan dengan apa yang individu ketahui tentang dirinya; Kelengkapan dan Kekurangan fisik. Harapan: Harapan adalah aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan; Penilaian: Individu menilai tentang dirinya sendiri yakni siapakah saya dan seharusnya menjadi apa yakni standar bagi individu itu sendiri.
2. Regulasi diri dengan indikator: Perencanaan: Anak-anak tunanetra dapat merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan; Monitoring: Anak-anak tunanetra dapat memonitor atau mengontrol kegiatan yang dilakukan sehingga dapat berhasil dengan baik; Mengatur kegiatan atau tugas yang diberikan.
3. Keterampilan orientasi dan mobilitas dengan indikator: Kesadaran (mendapatkan informasi melalui indera pendengaran, penciuman, sentuhan dan sisa penglihatan); Teknik-teknik melindungi diri dari rintangan yang dapat membahayakan tubuh; Keterampilan menggunakan tongkat.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu konsep diri dan regulasi diri secara bersama-sama berperan sebagai prediktor terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Peran kedua variabel bebas yakni konsep diri dan regulasi diri memberikan sumbangan efektif sebesar 77 persen terhadap keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Sisanya 23 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain kesehatan, instruktur orientasi dan mobilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas anak-anak tunanetra. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan olehIrham dan Hadikasma (1996) bahwa konsep-konsep yang dimiliki tunanetra dapat membangun dan memperkokoh mobilitas tunanetra. Hasil penelitian korelasi antara keterampilan orientasi dan mobilitas dengan regulasi diri menunjukkan korelasi yang sangat signifikan. Miller dkk (2001) mengatakan bahwa regulasi diri terdiri dari komponen kemauan (*will*) dan komponen keterampilan

(*skill*). Mereka mengatakan bahwa regulasi diri membuat keputusan mempunyai nilai terhadap tujuan dan juga kemampuan mengatur kapasitas keterbatasan mereka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kesesuian antara teori dan hasil penelitian.

E. Rangkuman

1. Kesimpulan

Ada hubungan antara konsep diri dan regulasi diri dengan keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan regulasi diri secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dapat memprediksi keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra. Ada hubungan yang signifikan antara keterampilan orientasi dan mobilitas dengan konsep diri tunanetra, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep diri dapat memprediksi keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra usia sekolah. Ada hubungan yang sangat signifikan antara keterampilan orientasi dan mobilitas dengan regulasi diri tunanetra, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep diri dapat memprediksi keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra. Masih ada faktor lain yang dijelaskan oleh variabel-variabel yang bukan menjadi fokus penelitian ini antara lain kesehatan, instruktur orientasi dan mobilitas dan lain-lain.

2. Saran

Subjek penelitian: Perlu konsep diri dan regulasi diri untuk meningkatkan keterampilan orientasi dan mobilitas tunanetra, dan disarankan untuk melakukan latihan secara teratur untuk memasuki lingkungan baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Tenaga Pendidikan (Guru dan instruktur Orientasi dan Mobilitas): Guru dan instruktur orientasi dan mobilitas perlu memberikan petunjuk bahwa setiap rangsangan suara, bau, perabaan, kinestetis, atau visual yang mempengaruhi penginderaan memberikan informasi kepada tunanetra tentang informasi penting untuk menentukan posisi dirinya. Penelitian mendatang diharapkan dapat dilakukan dengan prediktor lainnya

Pustaka Acuan

Agung, W. (2010). *Panduan SPSS* 17.0: *Untuk Mengelolah Penelitian Kuantitatif*. Jogjakarta: Garailmu.

American foundation for the blind (2009).http:// www. afb.org/ diakses tanggal 23 april 2009.

Anderson, E.S., Winett, R.A., Wojcik, J.R.(2007). Self regulation, self efficacy, outcome expectation, and social support: Social cognitive theory and nutrition behavior. *Journal of Psychology and Education*, *34*(3) 304-312. The Society of Behavior Medicine. Departement of Psychology, Virginia Tech, Blacsburg, VA.USA.

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., dan Ernest R. H. (1996). *Pengantar Psikologi*. (Alih Bahasa : Nurdjanah T. dan Barhana R). Jakarta:Erlangga.

Azwar, S. (2008). *Reliabilitas dan Validitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bandura, A. (1997). *Self Efficacy,The exercise of control.* New York: Freeman.

Boehmer, S. (2007). *Relationships between Felt Age And Perceived Disability, Satisfaction With Recovery, Self-Efficacy Belief and Coping Strategies*. *Journal of Health Psychology*, *12*(6)895-906.www.age publication.com. Diakses tanggal 26 september 2009.

Calhoun,J.F. and Acocella,J.R.(1990). *Psychology of Adjustment and Human Relationship*. New York: McGraw Hill.Inc

Cartwright, P.G., Cartwright, C.A., dan Ward, M.E. (1981).*Education Special Learners.* (second edition). The Ohio State University.

Depdikbud.(1985).*Petunjuk Praktis Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Bagian A.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Proyek Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

DeMOTT, R.M. (1982).*Exceptional children and youth, an introduction to special education*. Colombus, Ohio.

Direktotar Pendidikan Luar Biasa (2006). Informasi pelayanan pendidikan bagi anak tunanetra.http://www.ditplb.or.id/profile.php ?id.43. Diakses 1 Agustus 2010.

Duwi Priyatno, *Belajar olah data dengan SPSS 17.* Yogyakarta: Andi.

Emerson, R.S.W., dan Corn, A.L. (2006) *Orientation and Mobility Content for Children and Youth : A Delphi Approach Pilot Study. Journal Impairment dan Blindness.100* (6), 2-16.

Garaigordobal, M. dan Bernaras, E. (2009). *Self Concept, Self Esteem, Personality Traits and Psychopathological Symptoms in Adolescents with and without Visual Impairment. The Spanish journal of psychology,12* (1), 149-160.

Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.* Semarang: UNDIP.

Gufron N.dan Risnawati, R., (2011) *Teori-teori psikologi.* Jogyakarta: Ar Ruzz Media.

Hadikasma, P.(1981).*Orientasi dan Mobilitas Tunanetra* : *Projek peningkatan/pengembangan Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: IKIP, Seksi Penulisan Buku/Diktat.

Hallahan, D.P., dan Kauffman, J.M. (1988). *Exceptional Children, Introduction to Special Education*. New Jerssey: University of Virginia.

Hartono. (2008). *Statistik Untuk Penelitian, Lembaga Studi Filsafat*, *Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Hosni, I. (1996). *Buku Ajar Orientasi dan Mobilitas.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Guru.

Hurlock, E.B. 1979. *Personality Development*. New York: Mc Graw-Hill Inc.

Husdarta, H.J.S. (2010) *Psikologi Olah Raga*, Bandung: Alfabeta.

Kalley, P. (2006). *Historicaldevelopment of Orientation and Mobility as Profession,* webmaster@orientation and mobility.org. Diakses tanggal 23 September 2009.

Kingsley, M. (1999).*The Effect of a Visual Loss.* (Penerjemah : Didi Tarsidi). http://d-tarsidi.blogspot.com. Diakses 4 Mei 2009.

Martinez, C.(1998), *Orientation and Mobility Training:The Way To Go*, http://isd.saginaw.k12.mi.us/-mobility/index.htmfile://E:/odanm.htm.

Martinez, R., Sewell, K.W. (1986).*Self-concept of Adults with Visual Impairments*, Journal article by Ramiro Martinez, Kenneth W. Sewell; The Journal of Rehabilitation, Vol. 62,

Miller, D.C. dan Byrnes, J.P. (2001) *To Achieve or Not to Achieve: A Self Regulation Perspective on Adolescent' academic Decision Making*. *Journal of Education Psychology*. The American psychological Association. University of Maryland College Park, vol.91. No.4,677-685

Monks, F.J., Knoers, A.M.P., dan Haditono, S.R. (1999). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press.

NadeaudanTessier (2006).*Socialadjustment of Children with Cerebral Palsy In Mainstreem Class*. *Journal of Developmental Medicine dan Child Neurology 48*(5).

Pintrich, P.R., dan De Groot, E. V. (1990).*Motivational and Self Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Education Psychology.82*(1), 33-40.

Pintrich P.R., Schunk D.H. dan Meece J.L. (2008). *Motivation in Education,* New Jersey, Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.

Pradopo, S. (1977). *Pendidakan Anak-anak Tunanetra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Priyatno, D. (2008) *Belajar Olah Data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi

Rahardja, D. (2008). *Konsep Dasar Orientasi dan Mobilitas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, file://:/konsep -dasar-orientasi-mobilitas.html

Robert, S., Wall, E., dan Corn, A.L. (2006). *Orientation and Mobility Content for Children and Youth* :*A Delphi Approach Pilot Study.* Michigan University, JVIB, copyright © American Foundation for the Blind.

Salkin, N.J.(2009). *Teori-teori Perkembangan Manusia* (penerjemah : M. Khozim). Bandung: Nusa Media.

Sternberg, R.J. (2008). *Psikologi Kognisi.* (penerjemah: Yudih Santoso*)*.(edisi keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.(2008), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. (cetakan keempat).

Takamura, M. (2005).*Pedoman Orientasi Mobilitas.* Yayasan Mitra Netra, www.mitranetra.or.id,the way to go. Diakses 13 Juni 2009.

Walgito, W.(2004).*Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.

Widjajantin, A. (1996). *Ortopedagogik Tunanetra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pendidikan Tenaga Guru.

Yayasan Mitra Netra Indonesia. (2005). *Pendidikan dan Pengembangan tunanetra*. http://www.mitranertra.or.id. di akses 14 April 2009.

Zimmerman, B.J. (2008). *Investigating Self Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal,* Graduate Center of the city University of New York. Manth 2008,vol 45,No. 1,pp,166-183.

5

Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial melalui Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah
Going to Social Resilience Society through Local Social Institution Empowerment in Central Kalimantan Province

Etty Padmiati
Etty Padmiati, Peneliti Madya B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial. Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Yogyakarta Telpon (0274) 377265. Diterima 29 Mei 2013, disetujui 7 Juni 2013.

Abstract

Local Social institution empowerment as an effort to enhance and uphold the role and its function to build societal resilience, through giving treatment and means to society that represented by several local institution public figures, which in this context local social institution in Telangah Village, Katingan Ilir Regency, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. This research is meant to describe on the implementation of local social institution including its supporting and handicap factor. The reseaarch method used is qualitative descriptive, to know the achievement of the local social institution through giving an action to 30 local public figures and village apparatus. The effectivity of this empowerment program known through a measure comparing between pre and post treatment condition. The result shows that the empowerment targeted society understand on social resilience that indicated through steting an action planning and working program per division or indication, namely social protection for people with social welfare problem division, societal participation on social organization division, conflict control, and local wisdom on natural and social resources management division. The implementation of the working program goes as agreed together. The supporting factor on the implementation of the empowerment is the local government apparatus and the commitment of local public figures. The handicap factor is the limited condition of the local society social resilience forum to collect community fund, to build relation with related institution and corporation, so the outsourcing fund and joint venture have not been implemented. It is recommended that societal resilience forum can be taken as a partner for technical unit and regency social agency to implement social welfare program. So that the forum having an ability to operate the organization and existing program, guiding figures of the forum need an ability establishement by related institutions.

Keywords:
Empowerment- Local Social Institution- Resilient Society

Abstrak

Pemberdayaan lembaga sosial lokal merupakan suatu upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, dengan memberikan perlakuan atau pembekalan terhadap masyarakat yang dipresentasikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/ aparat desa yang ada di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Ilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan lembaga sosial lokal, dan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan, dengan memberikan perlakuan terhadap 30 orang wakil lembaga sosial lokal dan tokoh masyarakat/aparat desa. Efektivitas perlakuan ini dapat dilihat dengan mengukur kondisi kelompok (penerima perlakuan) sebelum dan setelah diberi perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran pemberdayaan paham akan ketahanan sosial masyarakat yang ditandai dengan disusunnya rencana aksi atau program kerja per divisi or indikator, yaitu divisi perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, divisi partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, divisi pengendalian konflik, dan divisi kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Pelaksanaan program kerjanya tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah, dan juga kepedulian tokoh masyarakat. Faktor penghambat adalah keterbatasan Forum Tansosmas dalam menggali dana dari masyarakat, menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalian dana dari luar belum dapat dilakukan.Rekomendasi yang diajukan adalah bahwa forum Tansosmas dapat dijadikan mitra kerja lapangan oleh unit teknis dan Dinas Sosial Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Agar forum tersebut memiliki kemampuan menggerakkan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan, perlu pemantapan bagi tenaga pendamping oleh unit teknis terkait.

Kata Kunci:
Pemberdayaan-Lembaga Sosial Lokal- Masyarakat Berketahanan Sosial

A. Ketahanan Sosial Masyarakat dan Lembaga Sosial Lokal

Ketahanan Sosial Masyarakat telah menjadi isu kritis di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kecenderungan meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat. Isu ini tidak saja berpangkal dari makin pudarnya nilai kesetiakawanan sosial yang ditandai dengan merebaknya konflik sosial di berbagai daerah, tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial di lingkungannya termasuk rentannya kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh eksternal serta kemampuan masyarakat dalam melakukan berbagai "perlawanan" terhadap penetrasi budaya asing yang menghancurkan keunikan lokalnya. Kerapuhan ini juga ditandai oleh tumbuhnya berbagai gerakan sosial masyarakat lokal yang mengarah pada gejala disintegrasi.

Disintegrasi sosial biasanya ditandai dengan terjadinya "*anomie*", di mana nilai dan institusi yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi kegamangan dan orang-orang hidup dalam ketidakpastian. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia. Bentrok antar warga merupakan pemicu konflik yang paling sering terjadi, seperti pertikaian di Tarakan yang melibatkan kelompok keturunan Kalimantan dengan keturunan pendatang dari Sulawesi. Konflik tersebut telah menewaskan 5 orang dan melukai 6 orang dari kedua kelompok, serta menyebabkan sejumlah bangunan hangus dibakar (Kompas, 30 September 2010).

Demikian pula yang terjadi bentrokan antar warga (dengan isu agama) di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Madura. Bentrokan ini selain diwarnai terbakarnya 20 rumah warga, juga memakan korban 2 orang meninggal dan 5 orang lainnya terluka (Jawa Pos, 27 Agustus 2012).

Kasus lainnya adalah konflik sosial yang terjadi di Lampung Tengah, yaitu pertikaian antara warga Kampung Buyut Kecamatan Gunung Sugih dengan warga Desa Kusumadadi Kecamatan Bakri. Konflik ini terjadi karena tindakan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab (tindakan main hakim sendiri), sehingga Desa Kusumadadi yang dihuni warga Lampung transmigran keturunan Jawa, diamuk massa dari Kampung Buyut yang mayoritas dihuni warga Lampung *Ulun* (asli) (Kompas, 12 November 2012).

Masalah kemiskinan, disinyalir juga melemahkan ikatan kesetiakawanan sosial, sehingga perlindungan dan partisipasi sosial masyarakat saat ini terkikis dalam kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. Kearifan lokal juga menipis dalam masyarakat, nilai dan norma agama serta budaya lokal terlihat luntur di masyarakat, sehingga ketidakpuasan aspirasi diungkapkan dengan demonstrasi yang diikuti oleh tindak kekerasan atau anarkis. Dengan kata lain, tekanan kemiskinan akhirnya membuat komunitas miskin frustasi, dan kadang melanggar norma dan nilai yang masih berlaku dalam masyarakat.

Fenomena di atas memberikan gambaran betapa rentannya daya tahan sosial masyarakat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut. Untuk menguatkan ketahanan sosial suatu masyarakat perlu suatu upaya yang sistematis agar ketahanan sosial masyarakat tersebut menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Dengan kata lain, penguatan tersebut akan menjadikan masyarakat memiliki daya tahan yang kuat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi.

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya dalam mengatasi berbagai resiko perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya (Betke, 2002). Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik, yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semula atau bahkan lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Jadi ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah

ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan (Mu'man Nuryana, 2002).

Pemahaman ketahanan sosial lebih lanjut menegaskan bahwa, ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga: mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan, dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang memiliki dua dimensi makna, yaitu ketahanan sosial dalam pengertian alat atau metode, dan ketahanan sosial dalam pengertian tujuan. Ketahanan sosial masyarakat sebagai metode atau alat, merupakan suatu rumusan dan model pendekatan ketahanan sosial yang dapat memberikan berbagai *input* dan *output* bagi upaya terciptanya suatu kondisi masyarakat yang berkemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta masyarakat yang memiliki suatu daya tahan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Sedangkan ketahanan sosial sebagai tujuan (*goal*) merupakan harapan-harapan ideal yang dapat diwujudkan dengan menggunakan cara atau metode, sehingga masyarakat menjadi dinamis, berkemampuan, memiliki daya tahan, memiliki daya juang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan sosial, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat (Zuhri Bahri, 2004: 10).

Jadi penguatan ketahanan sosial dapat diasumsikan dengan logika, jika ketahanan sosial pada masing-masing individu kuat, maka ketahanan sosial keluarga juga akan menjadi kuat dan berdaya. Demikian pula, jika ketahanan sosial keluarga kuat, maka ketahanan sosial masyarakat akan menjadi kuat juga. Pemahaman di atas mengindikasikan bahwa ketahanan sosial masyarakat dapat diwujudkan dan diupayakan menjadi kuat, jika individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan juga lembaga sosial dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik di dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka sasaran dari pengembangan ketahanan sosial diarahkan pada lembaga sosial. Sebab, di dalam lembaga sosial terdapat sejumlah nilai dan norma sosial yang dihayati dan diamalkan bersama, sebagai upaya mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antar lapisan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan lembaga sosial memiliki arti dan posisi penting dalam membantu terciptanya keteraturan sosial (*social order*), sehingga struktur-struktur sosial dalam masyarakat mampu melakukan peran dan fungsinya dengan baik.

Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga sosial lokal sampai saat ini masih dipandang sebagai suatu sistem yang dapat mengatur keseimbangan bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat masih berkeyakinan bahwa lembaga sosial merupakan salah satu modal sosial yang mampu melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan tantangan globalisasi. Lembaga sosial dalam konteks ketahanan sosial semakin menjadi bermakna penting dan strategis dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Djojodiguno (dalam Sugiyanto, 2002: 2) bahwa, lembaga sebagai ajang pemenuhan kebutuhan manusia.

Atas pertimbangan dan realitas di atas, maka pemberdayaan lembaga sosial (lokal) harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis melalui pembekalan kelembagaan, dalam upaya mencapai masyarakat yang berketahanan sosial. Oleh karena itu, lembaga sosial (lokal) tersebut diharapkan mampu memberikan konstribusi yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, melalui pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan lembaga sosial lokal dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut, penelitian ini dilakukan.

Kajian ini dilakukan di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Ilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan kriteria, antara lain : merupakan salah satu desa tertinggal, memiliki sejumlah lembaga sosial lokal yang secara potensial dapat didayagunakan dan diberdayakan sebagai agen ketahanan sosial, dan memiliki implikasi bagi menguatnya ketahanan sosial masyarakat.

Sasaran dalam penelitian ini adalah lembaga sosial lokal baik yang tumbuh secara tradisional di lingkungan masyarakat, maupun yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti : lembaga adat, Karang Taruna, PKK, BPD, Posyandu, Majelis Taklim/Gereja. Selain itu, tokoh masyarakat/ aparat desa, dan juga dunia usaha. Adapun target sasaran garap yang akan diberi perlakuan sebanyak 30 orang, diambil dari atau mewakili masing-masing lembaga sosial lokal yang ada dan juga dari tokoh masyarakat/aparat desa.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu dengan melakukan test untuk mengukur kondisi sasaran garap/kelompok (penerima perlakuan) sebelum dan setelah diberi perlakuan. Dari hasil inilah nantinya selain dilihat perkembangannya, juga akan dianalisis tingkat keberhasilan atau sebaliknya, sehingga akan dihasilkan suatu laporan yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ketahanan Sosial Masyarakat dan Modal Sosial

Permasalahan sosial yang membentang pada tataran empiris adalah fenomena sosial dari fakta sosial yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang tidak terelakkan. Ada beberapa kecenderungan kasus yang mengindikasikan terjadinya permasalahan sosial yang mengarah pada terjadinya krisis sosial, seperti: sedemikian mudahnya masyarakat terpancing untuk melakukan tindakan anarkis, kekerasan dan amoral, sedemikian mudahnya masyarakat untuk berkonflik, semakin menipisnya nilai dan sikap tolong menolong, solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial, dan semakin renggangnya ikatan-ikatan sosial dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Berbagai fenomena tersebut diyakini memberikan andil terhadap terciptanya kondisi rentan pada daya tahan sosial masyarakat, yang mengarah pada menurunnya ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan akan semakin resistensinya daya tahan sosial masyarakat dan semakin rapuhnya ketahanan sosial suatu komunitas.

Dalam tulisan ini, konsep ketahanan sosial masyarakat mengacu pada hasil Diskusi Pakar tahun 2002 tentang, Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat, yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas) Jakarta. Hasil diskusi tersebut menggambarkan bahwa ketahanan sosial dapat dilihat dari perspektif luas dan sempit. Dalam pengertian luas, ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan hankam merupakan unsur pembentuk ketahanan nasional. Sedangkan dalam pengertian sempit ketahanan sosial dipandang sebagai kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Konsep ketahanan sosial masyarakat yang mengacu pada hasil Diskusi Pakar tersebut, dimaknai sebagai kemampuan dari komunitas dalam mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mengelilinginya. Suatu komunitas dipandang memiliki ketahanan sosial apabila: Pertama, mampu secara efektif melindungi anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme kerja yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Betke, 2002). Oleh karena itu, tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu komunitas akan ditentukan oleh efektif tidaknya komunitas tersebut dalam melindungi anggotanya, menanamkan investasi sosial dalam jaringan sosial, dan mengelola konflik dan kekerasan.

Pemahaman ketahanan sosial masyarakat lebih lanjut menegaskan bahwa, ketahanan

sosial masyarakat adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga mampu melindungi kelompok rentan dan kurang mampu, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam organisasi sosial, mencegah dan mampu mengelola konflik dan kekerasan, dan mampu melestarikan sumber daya alam dan sosial. Dalam konteks ini, modal sosial merupakan alat sekaligus potensi atau piranti sosial bagi lembaga dan komunitas untuk menuju suatu masyarakat yang memiliki ketahanan sosial yang tinggi. Dengan kata lain, ketahanan sosial masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah *out come* dari lembaga sosial atau komunitas, di mana modal sosial yang di dalamnya terdapat jaringan sebagai *software* bekerja.

Dengan demikian, konsep ketahanan sosial ini sangat erat kaitannya dengan modal sosial (*social capital*). Menurut Rochman Achwan (2002: 73) dalam makalahnya yang berjudul Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia: Beberapa Catatan Empiris, secara umum modal sosial (*social capital*) diartikan sebagai aspek dari organisasi sosial, seperti norma, jaringan sosial dan kepercayaan sosial yang mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama. Bentuk kongkrit modal sosial adalah kelompok sosial yang dibentuk sendiri oleh warga komuniti atau masyarakat. Sedangkan menurut Makmur Sunusi (2002: 94), modal sosial dapat didefinisikan sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat yang membuat orang dapat bekerja sama (*connectedness*) dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Narayan dan Woolcock (dalam Mu'man Nuryana, 2002: 6) mendefinisikan secara sederhana dan mudah dipahami tentang *social capital,* yakni norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang bertindak secara kolektif. Lebih lanjut Mu'man menjelaskan, dari berbagai hasil studi banyak ahli mengemukakan bahwa, *social capital* memberikan konstribusi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, *social capital* merupakan sebuah harta sosial yang patut dipelihara secara bijaksana, karena konstribusinya begitu baik bagi masyarakat.

Modal sosial secara sederhana dapat dimengerti dengan melalui pemahaman unsur-unsur yang terkait di dalamnya, seperti: kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), nilai (*value*), dan komitmen. Unsur-unsur yang terdapat dalam modal sosial dalam kerangka ketahanan sosial memiliki arti dan fungsi yang strategis dalam mewujudkan suatu tatanan sosial yang teratur serta harmonis (Zuhri Bahri, 2004: 8). Dengan kata lain, unsur-unsur modal sosial diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketahanan sosial masyarakat. Dengan begitu, derajat ketahanan sosial ditentukan oleh tinggi rendahnya stok modal sosial, sehingga secara konseptual dapat dikatakan bahwa, untuk menciptakan ketahanan sosial harus diciptakan keberfungsian modal sosial. Terkait hal tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memfasilitasi lembaga atau komunitas, agar modal sosial mereka dapat berfungsi dengan baik dan dinamis dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga menghasilkan suatu ketahanan sosial yang tangguh. Dengan kata lain, apabila modal sosial ini digalang dan diasah melalui lembaga sosial lokal, diharapkan ketahanan sosial masyarakat semakin hari semakin meningkat.

C. Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal

Keberadaan lembaga sosial ditentukan oleh sejauhmana lembaga tersebut dapat bertahan serta dapat meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Oleh karena itu, perlu upaya yang sistematis dalam melakukan penguatan (*empowering*) kelembagaan dengan cara memberdayakan lembaga sosial sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemberdayaan lembaga sosial pada dasarnya adalah upaya memberdayakan masyarakat. Dalam kaitan dengan dengan hal ini, Payne (dalam Isbandi Rukminto Adi, 2003: 54) mengemukakan bahwa, suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek

hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 77). Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan Wignyo Adiyoso (2009: 19) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan "*power*" (daya) kepada kelompok yang tidak berdaya/berkuasa, sehingga mereka menjadi "berdaya". Hal senada juga disampaikan Gunawan Sumodiningrat (2000), bahwa pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka pemberdayaan pada dasarnya merujuk pada penguatan daya (*empowering*), yaitu peningkatan kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*powerfull*). Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan lembaga sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan peran dan fungsi serta posisinya, sehingga dapat membawa masyarakat pada kondisi sosial yang lebih tertata secara proporsional. Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan lembaga tersebut berkembang dengan baik.

Membahas tentang pemberdayaan lembaga sosial lokal, muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial lokal?. Sebagaimana diketahui, di dalam kehidupan masyarakat biasanya akan muncul adanya berbagai wadah aktivitas hidup. Wadah sebagai tempat masyarakat beraktivitas dalam rangka hidup bersama (berkelompok) disebut lembaga atau institusi. Jadi lembaga inilah yang akan mengorganisasi norma pengatur perilaku anggota masyarakat pada suatu aktivitas hidup tertentu dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Seperti dikemukakan Paul B Horton (dalam Sugiyanto, 2002: 25), lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisir yang ikut serta dalam perilaku itu. Oleh sebab itu, lembaga selalu mengarah pada norma-norma atau aturan-aturan. Jadi lembaga sosial adalah wadah investasi dan internalisasi norma sosial yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Lembaga sosial adalah suatu unsur dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat yang terorganisir.

Secara teoritis, lembaga sosial terdiri dari lembaga keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut tentunya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama bagi anggota lembaga bersangkutan. Namun demikian, masing-masing lembaga tersebut tidak lepas dari dwi fungsi dasar, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan suatu fungsi yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga kehadiran dan tujuan lembaga diterima oleh masyarakat. Fungsi laten merupakan suatu fungsi yang tidak diharapkan atau ditolak oleh sebagian masyarakat, sebab lembaga memiliki tujuan yang terselubung.

Dalam perkembangannya, kemudian muncul istilah lembaga atau institusi lokal. Menurut Esman dan Uphoff (dalam Sugiyanto, 2002: 58), institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat, seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda. Institusi tersebut memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Sebagaimana pernyataan Purwo Santoso (dalam Sugiyanto, 2002: 58), bahwa ternyata institusi lokal mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal. Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu meng-

hasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

Secara empirik, lembaga sosial lokal yang ada dan berkembang di masyarakat pada kenyataannya ada yang bersifat formal dan informal. Ciri lembaga yang bersifat informal adalah terbentuk atas kehendak masyarakat bersangkutan, manajemennya lemah, dinamika aktivitas tidak teratur, terbentuk atas norma dan nilai yang dikembangkan atas dasar *trust* (kepercayaan), pengurus dipilih lembaga, bersifat monoton, dan menolak campur tangan pihak luar. Contoh, lembaga lumbung padi di perdesaan dan lembaga sinoman. Ciri lembaga sosial formal terbentuk atas campur tangan pihak luar (pemerintah), ada dasar hukum untuk membentuk lembaga secara legal, pengurus dipilih atas pertimbangan kebutuhan dan masa kepengurusannya jelas, struktur bersifat formal dan mudah dipengaruhi oleh pihak luar (hegemoni). Contoh Karang Taruna, Dasa Wisma, kelompok tani wanita.

Secara konkrit, lembaga sosial lokal yang dapat diperankan atau diberdayakan dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat adalah organisasi atau perkumpulan yang terdapat dalam suatu lingkungan komunitas, baik itu yang bersifat formal maupun informal. Kehadiran lembaga sosial lokal ini bukan atas kepentingan individu, tetapi atas kepentingan bersama, sehingga lembaga sosial lokal lama kelamaan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Oleh karena itu, dengan pemberdayaan lembaga sosial lokal, termasuk mengembangkan modal sosial yang terdapat di dalamnya, diharapkan ketahanan sosial masyarakat semakin hari semakin meningkat. Apabila modal sosial digalang dan diasah melalui lembaga sosial lokal, ketahanan sosial suatu masyarakat yang didambakan dapat terwujud.

D. Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial.

Ketahanan sosial suatu masyarakat dapat terwujud, apabila lembaga sosial lokal yang di dalamnya terdapat modal sosial diberdayakan, sehingga lembaga tersebut dapat bertahan serta dapat meningkatkan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan lembaga sosial lokal merupakan suatu upaya untuk memberdayakan peran dan fungsi lembaga tersebut, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keberfungsian masyarakat secara kelembagaan. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara bersama-sama dalam penanggulangan masalah. Tumbuhnya suatu tindakan kolektif (sinergi) dari berbagai lembaga sosial lokal yang ada melalui kerja sama (sistem jaringan), akan sangat berpengaruh terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dipandang memiliki keterkaitan dengan upaya penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, upaya pemberdayaan lembaga sosial lokal dilakukan di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Telangkah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa yang berada di ketinggian 125 meter dari permukaan laut ini memiliki luas 3.100 ha, yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan dan tanah kering, dan hanya 5.08 ha berupa tanah persawahan. Namun demikian, banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Banyak penduduk yang membuka lahan baru dengan membuka hutan untuk pertanian.

Berdasarkan monografi desa, penduduk Desa Telangkah sampai dengan bulan Februari 2012 berjumlah 2.552 jiwa terdiri dari 1.256 jiwa laki-laki dan 1.296 jiwa perempuan, dan terdiri dari 617 Kepala Keluarga. Dari jumlah penduduk tersebut, 1.820 jiwa (71,31 persen) dapat dikatakan sebagai usia produktif (15–56 tahun). Dari penduduk usia produktif tersebut, 1.709 jiwa (66,97 persen) telah tertampung dalam lapangan kerja, yang terbanyak adalah di bidang per-

tanian (21,40 persen), pertambangan (14,65 persen), dan swasta (12,30 persen).

Sedangkan ditinjau dari aspek pendidikan, secara umum memiliki tingkat pendidikan dasar (SD) dan menengah (SLTP dan SLTA), yakni 35,57 persen dan 43,92 persen. Meskipun demikian SDM yang dimiliki Desa Telangkah dapat dikatakan cukup baik, mengingat sudah ada penduduk yang mencapai tingkat pendidikan tinggi baik di akademi maupun perguruan tinggi, yakni 4,82 persen.

2. Sasaran Pemberdayaan

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan lembaga sosial lokal, maka yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah lembaga sosial di tingkat lokal, seperti organisasi sosial, keagamaan, adat, pemuda, wanita, dan lainnya. Peserta pemberdayaan merupakan perwakilan dari lembaga sosial yang dipilih oleh pihak aparat desa dan tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu dan memiliki komitmen untuk melakukan kegiatan dan mengatur personil serta administrasi. Jumlah peserta ditentukan sebanyak 30 orang.

Dari 30 orang peserta pemberdayaan, 6 orang berasal dari organisasi PKK, 4 orang dari Karang Taruna, dan 3 orang dari organisasi sosial. Kemudian yang termasuk tokoh masyarakat sebanyak 6 orang, BPD 1 orang, perangkat desa 2 orang, lembaga adat 1 orang, organisasi keagamaan 3 orang, dan kader posyandu 4 orang.

Hasil pendataan diketahui bahwa peserta pemberdayaan sebagian besar berusia antara 41–60 tahun (50 persen), kemudian terdapat 43,34 persen yang berusia antara 21–40 tahun, sedangkan yang berusia lebih dari 60 tahun ada 6,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pemberdayaan termasuk usia dewasa, dan hal ini berarti hanya sedikit kaum muda yang duduk dalam kepengurusan lembaga sosial lokal yang ada di desa Telangkah.

Dilihat dari pekerjaan peserta pemberdayaan sangat variatif. Terdapat separuh (50 persen) peserta yang bekerja di sektor swasta, petani (26,67 persen), buruh (13,33 persen), aparat desa 6,67 persen) dan satu orang sebagai PNS (3,33 persen). Sedangkan untuk tingkat pendidikan dapat dikatakan cukup memadai karena ada separuh (50 persen) yang berpendidikan SLTA, bahkan terdapat 16,67 persen yang berpendidikan D3 dan S1. Sementara itu yang berpendidikan SD terdapat 10 persen.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan

Tahap Persiapan: Dalam tahap ini, kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi antara Tim Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dengan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Katingan. Kegiatan ini selain untuk memperlancar terealisasikannya kegiatan, juga untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Langkah selanjutnya adalah menentukan peserta pemberdayaan sebanyak 30 orang, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, menentukan tim kerja atau panitya daerah (dua orang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan) yang akan membantu secara teknis pelaksanaan pemberdayaan demi kelancaran kegiatan. Selain itu, juga menentukan dua orang pendamping (PSM dan aparat Desa Telangkah) yang akan bertugas melaksanakan pendampingan, dan empat orang fasilitator yang bertugas memberikan pembekalan kepada para peserta pemberdayaan. Empat orang fasilitator tersebut, tiga orang dari Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan dan seorang dari Bappeda Kabupaten Katingan.

Dalam rangka pemantapan terhadap para fasilitator dan pendamping, Tim B2P3KS Yogyakarta mengadakan pertemuan dengan tujuan: menyamakan persepsi di antara para fasilitator tentang materi yang akan disampaikan, menentukan metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam memberikan pembekalan, menyusun jadwal kegiatan secara bersama-sama. Pemantapan terhadap pendamping dimak-

sudkan untuk mempersiapkan pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan, dan juga menentukan sistematika pelaporan yang akan dibuat.

Tahap Pelaksanaan: Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus membuka kegiatan pemberdayaan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Katingan. Dilanjutkan oleh Tim B2P3KS Yogyakarta yang menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. Kemudian, melaksanakan pengumpulan data awal dengan melakukan test (*pre-test*) kepada para peserta, untuk mengetahui pemahaman mereka tentang ketahanan sosial masyarakat.

Pembekalan kepada peserta dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana menjalin kerjasama dalam mengatasi atau menangani berbagai permasalahan sosial dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Namun, sebelum pembekalan dimulai terlebih dahulu dilakukan kegiatan Bina Suasana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana akrab antara fasilitator dengan peserta, dan juga antar peserta itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan peserta bersemangat dalam kegiatan ini, sehingga akan dengan mudah dan cepat menerima informasi-informasi baru yang akan membuka wawasan pengetahuan mereka. Selain itu, juga untuk menumbuhkan semangat bagi peserta untuk saling berbagi pendapat, mendengarkan masukan dari orang lain, sehingga secara tidak langsung peserta akan terbiasa dengan suasana seperti itu.

Dalam pembekalan ini, para fasilitator menyampaikan materi tentang: 1) Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 2) Partisipasi Masyarakat dalam Organisasi Sosial, 3) Pengendalian Konflik, dan 4) Kearifan Lokal dalam Mengelola Sumber Daya Alam dan Sosial. Kegiatan pembekalan awal difokuskan pada pemberian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Namun tidak dilupakan pula adanya diskusi untuk membahas materi-materi yang telah diberikan.

Review materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh para fasilitator. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan, apakah dapat dengan mudah diserap oleh peserta. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melihat sampai sejauhmana peserta memahami materi-materi tersebut.

Kegiatan berikutnya adalah para peserta dibagi menjadi empat kelompok atau divisi sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial masyarakat, yakni divisi perlindungan sosial, divisi partisipasi sosial, divisi konflik sosial, dan divisi kearifan lokal. Kemudian masing-masing divisi diminta untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungannya, dan selanjutnya memilih prioritas masalah sosial yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui pemberdayaan.

Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan untuk membentuk wadah atau forum, yang dipandu oleh petugas. Dalam kesempatan tersebut disepakati membentuk wadah atau forum yang mereka beri nama Forum Tansosmas Hapakat. Untuk mengefektifkan kinerja forum, dilakukan pemilihan pengurus secara demokratis, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan empat divisi (sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial).

Setelah forum terbentuk, selanjutnya menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja. Penyusunan program kerja tersebut meliputi empat indikator ketahanan sosial yang masing-masing divisi menentukan prioritas masalah yang akan ditangani untuk dapat dilaksanakan selama lima bulan ke depan. Rencana aksi tersebut disusun dalam suatu matrik program kerja yang meliputi kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana aksi “Forum Tansosmas Hapakat” untuk masing-masing divisi adalah sebagai berikut. Divisi Perlindungan Sosial, akan melaksanakan penanganan masalah kenakalan remaja, dengan penyuluhan masalah narkoba. Divisi Partisipasi Masyarakat, akan melaksanakan kegiatan dalam upaya membangkitkan/meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ke-

masyarakatan, seperti kerja bakti/gotong royong pembersihan jalan desa. Divisi pengendalian konflik, membantu aparat desa dalam menangani permasalahan lahan/ tanah. Divisi Kearifan Lokal, pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan memberikan keterampilan

Sebelum kegiatan pembekalan selesai/ berakhir, dilaksanakan pengumpulan data akhir dengan melakukan test (*post test*) kepada para peserta, untuk mengetahui pemahaman mereka tentang ketahanan sosial masyarakat, setelah mendapatkan pembekalan. Setelah selesai mengikuti kegiatan tes tersebut, kemudian masing-masing divisi mempresentasikan program kerjanya masing-masing. Untuk mendukung dan mendorong forum dalam mengimplementasikan program kerja yang telah disusun bersama tersebut, maka tim dari B2P3KS memberikan bantuan dana stimulan untuk tahap pertama sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan bagi kepentingan forum dan pengembangan program sesuai dengan tujuan yang dirumuskan bersama. Dengan kata lain, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan forum.

Monitoring: Kegiatan ini dilaksanakan setelah tiga bulan berjalan dari kegiatan pemberdayaan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan forum sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama (tiga bulan sebelumnya). Dengan demikian, kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan oleh masing-masing divisi. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana stimulan.

Kegiatan monitoring ini dilaksanakan oleh petugas/tim dari B2P3KS. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi terfokus (FGD), yaitu mengundang kembali para peserta pemberdayaan yang telah membentuk forum untuk melihat kembali rencana aksi (program kerja) yang telah mereka susun tiga bulan yang lalu. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan dana stimulan tahap kedua yang besarnya sama dengan bantuan tahap pertama, yaitu Rp 22.500.000,-. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tidak ada penggantian personil Forum Tansosmas Hapakat, baik tentang pengurus maupun anggota. Forum Tansosmas Hapakat mengadakan pertemuan secara berkala untuk membicarakan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi forum. Dalam setiap pertemuan, pendamping forum (PSM dan aparat desa) selalu hadir. Rencana aksi (program kerja) yang telah disepakati bersama telah dilaksanakan dengan baik. Namun, dari tiga program kerja yang telah direncanakan tersebut, hanya dua yang telah dilaksanakan, yakni kerja bakti pembersihan jalan desa dan pelatihan keterampilan menganyam rotan. Sedangkan kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja (masalah narkoba) belum terlaksana karena terkendala waktu (bersamaan dengan bulan puasa). Namun kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran. Ada penambahan rencana program kerja baru, yaitu membuat keramba ikan nila (dua keramba) dengan memanfaatkan air sungai yang melintasi Desa Telangkah. Bantuan dana stimulan tahap pertama (Rp 22.500.000,-) telah digunakan sesuai dengan rencana program.

Evaluasi: merupakan kegiatan penilaian terhadap kegiatan forum, agar diketahui secara jelas apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan. Selain itu, dengan kegiatan ini akan diketahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam mekanisme pengelolaan kegiatan.

Sama halnya kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi juga dilaksanakan oleh petugas/Tim dari B2P3KS setelah lima bulan kegiatan pemberdayaan dilakukan. Kegiatan ini juga merupakan tahap ter-

minasi yaitu "pemutusan hubungan" secara formal antara pemberi program (pelaksana pemberdayaan) yaitu Tim B2P3KS dengan komunitas sasaran (Forum Tansosmas). Selanjutnya, Tim B2P3KS menyerahkan "Forum Tansosmas Hapakat" kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Katingan untuk membina, memfasilitasi dan menjadikan mitra kerja dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayahnya.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir dapat diketahui bahwa, kinerja pengurus dan anggota Forum Tansosmas Hapakat dalam melaksanakan kegiatannya, cukup baik. Hal tersebut, selain karena rasa kebersamaan dan tanggungjawab pengurus dan anggota forum, juga karena keaktifan atau dukungan dari pendamping forum yang selalu memfasilitasi, membantu pemikiran dalam diskusi dan mengarahkan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk kegiatan yang dilakukan forum sudah dapat terealisir dengan baik, bahkan kegiatan keterampilan menganyam rotan (membuat tudung saji) telah memberikan hasil, karena sudah ada yang laku dijual. Dengan terlaksananya berbagai kegiatan yang sudah diprogramkan, forum dapat melakukan perbaikan peningkatan pelaksanaan program seperti penanganan keluarga miskin, rumah tidak layak huni, dan bantuan bagi lanjut usia terlantar.

E. Faktor Berpengaruh dalam Pemberdayaan Lembaga Sosial Lokal

Faktor Pendukung: Dukungan pemerintah daerah atau aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan; Keterlibatan fasilitator secara tidak langsung merupakan jejaring kerja dalam rangka mendukung dan mengembangkan keberlangsungan kegiatan Forum Tansosmas; Kepedulian dan partisipasi tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan forum Tansosmas; Respons positif masyarakat dengan mendukung keberadaan forum Tansosmas di wilayahnya.

Faktor Penghambat: Kurang aktifnya beberapa pengurus dan anggota dalam kegiatan forum Tansosmas, karena kesibukan mereka mencari nafkah (mencari tambahan penghasilan di luar kabupaten); Keterbatasan forum Tansosmas dalam menggali dana dari masyarakat, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang pada umumnya kurang mampu; Masih kurangnya kemampuan forum Tansosmas dalam menjalin kemitraan atau jejaring kerja dengan institusi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalian dana dari luar belum dapat terlaksana.

F. Rangkuman

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial cenderung semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan kemampuan pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga perlu memaksimalkan kemampuan dan potensi masyarakat sebagai salah satu alternatif.

Upaya memaksimalkan kemampuan dan potensi masyarakat melalui cara menyatukan potensi-potensi dengan cara membangun kerjasama antar lembaga sosial lokal yang ada di lokasi penelitian (Desa Telangkah). Terbangunnya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan kekuatan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk membangun kerjasama antar lembaga sosial lokal sebagai upaya mewujudkan masyarakat berketahanan sosial, maka dilaksanakan pemberdayaan dengan memberikan pembekalan terhadap 30 orang peserta yang merupakan perwakilan dari lembaga sosial lokal yang ada di desa Telangkah. Tujuan pembekalan adalah menyamakan persepsi di antara peserta, membangun komitmen di antara peserta, dan mewujudkan aksi bersama.

Setelah kegiatan pembekalan dan dilakukan *test* (*pre test* dan *post test*), diketahui bahwa pemahaman peserta pemberdayaan terhadap empat indikator ketahanan sosial masyarakat cukup signifikan, yang ditandai dengan disusun-

nya rencana aksi per divisi/indikator, yaitu divisi perlindungan sosial bagi kelompok PMKS, divisi partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial, divisi pengendalian konflik, dan divisi kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Dalam melaksanakan program kerjanya, telah berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

Kerjasama antar lembaga sosial lokal tersebut akan efektif dan memiliki kemampuan sosial untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial, apabila dibentuk suatu komunitas baru yang beranggotakan perwakilan lembaga sosial lokal yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dibentuklah Forum Tansosmas Hapakat yang memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan empat divisi (sesuai dengan empat indikator ketahanan sosial).

Terbentuknya "Forum Tansosmas Hapakat" mampu menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, yakni perlindungan sosial (penanganan masalah kenakalan remaja; dengan penyuluhan masalah narkoba); partisipasi masyarakat (melaksanakan kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti kerja bakti/gotong royong pembersihan jalan desa); pengendalian konflik (membantu aparat desa dalam menangani masalah lahan tanah); dan Kearifan lokal (pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dengan memberikan keterampilan).

Berdasarkan monitoring dan evalusi yang dilakukan Tim B2P3KS, maka rencana aksi atau program kerja yang disusun bersama telah dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Terlaksananya rencana aksi tersebut selain karena adanya komitmen semua anggota forum, juga karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah. Seperti dalam pelaksanakan pelatihan keterampilan menganyam rotan, Dinas Perindustrian Kabupaten menyediakan pelatih untuk membimbing para peserta. Demikian juga, dinas terkait memberikan bantuan bibit ikan nila untuk usaha keramba ikan nila. Sedangkan untuk kerja bakti pembersihan jalan desa selain melibatkan aparat desa juga melibatkan tokoh masyarakat, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa.

Meskipun pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah atau aparat pemerintah, dan juga adanya kepedulian tokoh masyarakat. Namun, tidak dipungkiri adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan forum dalam menggali dana dari masyarakat. Selain itu, belum mampu menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan dunia usaha, sehingga kerjasama dan penggalian dana dari luar belum terlaksana.

Mengingat Forum Tansosmas mampu menyusun rencana aksi (*action plan*) atau program kerja untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, maka forum tersebut dapat dijadikan mitra kerja lapangan oleh unit teknis dan Dinas Sosial Kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, agar forum memiliki kemampuan menggerakkan organisasi dan program kegiatan tetap berjalan atau eksis, maka perlu pemantapan bagi tenaga pendamping oleh unit teknis.

Pustaka Acuan

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.

Betke, Friedhelm, 2002. *Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru Dalam Bidang Statistik Sosial,* Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta : Pusbangtansosmas.

Ginanjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta: Dides.

Gunawan Sumodiningrat, 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Program Kegiatan*. Jakarta: Per Pod.

Isbandi Rukminto Adi, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan*

Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mu'man Nuryana, 2002. *Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Pusbangtansosmas.

Rochman Achwan, 2002. *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan Empiris.* Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta: Pusbangtansosmas.

Wignyo Adiyoso, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Zuhri Bahri, dkk, 2002. *Jaringan Strategis Pranata Sosial. Pengembangan Pola dan Penguatan Ketahanan Sosial.* Jakarta: Pusbangtansosmas.

Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Sumber lain :

Kompas, 30 September 2010, *Mereka Bersatu di Pengungsian.*

Jawa Pos, 27 Agustus 2012, *Musibah Agama Nodai Sampang.*

Kompas, 12 November 2012, *Bekri Berangsur Pulih, Konflik di Lampung Tengah. Tindakan Perseorangan.*

6

Evaluasi Program Asistensi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODK Berat)
Evaluation on Social Assistance Program for Severe Disability

Haryati Roebyantho dan Setyo Sumarno
Haryati Roebyantho, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jalan Dewi Sartika nomor 200 , Cawang, Jakarta Timur. Telp. (021) 8017146, fax: (021) 8017126; atijoewono@Gmail.com.
Setyo Sumarno, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jalan Dewi Sartika nomor 200 , Cawang, Jakarta Timur. Telp. (021) 8017146, fax: (021) 8017126, setyosumarno@rocketmail.com
Diterima 17 Juni 2013, disetujui 28 Agustus 2013

Abstract

The Ministry of Social Affairs has been imposing a policies to protect persons with severe disabilities in an effort to fulfill the rights to improve their social welfare and protection with Minister's Decission Number: 68/HUK/2010 on guidelines for the implementation of social security for people with severe disabilities. The goal of the policy was to fulfill basic needs of persons with severe disabilities and increase awareness of the family and community. Trial policy was implemented from 2006 to 2011. During the 5-year trial, the policy had been able to provide assistance to 17,000 people. However, studies have not been done on the impact of policies and programs. Therefore, the Center for Social Welfare Research did a quick research to know the success of the program. The research method was evaluative descriptive. Data collected through interviews, document analysis and focus group discussion. Respondents were determined from the cluster, consisting social service implementator; postal officials; surrogate parents; social guidance; Societal social workers (TKSM), in district and municipality/regence level. Respondents casted to evaluate the target figure program, such as surrogate parents of severe disabities; social guider; companion, community leaders and local postal officers in district, city/regence. The Analysis focused on communications policy implementation and the source and structure of organizatinl. The basic analysis of the program's impact are goal achievement, living need adequacy, and commitment growth of families and communities. It was found that the implementation of the policy has been less socialized at the executive level to lower level/ grassroots (village and policy beneficiaries). As a result, the knowledge of the policy reached only until the level of the city or regence implementator, though the implementation of the program has reached the target substancially. The policy impact is to improve the welfare of persons with severe disabilities and improve treatment and that therapy. On the other hand, there has been an increase in families and communities caring awareness for persons with severe disabilities. There has been a family need that has not been psychologically accomplished yet, namely assurance if there is a member of the family get sicked or pass away. Human resources in terms of competence and quality guidance does not refer the Social Welfare Regulatio Number 11 of 2009. It is recommended that is worth to create planned between Ministry of Social Affairs and Ministry of Health to provide a service in family-based therapy and home visit. Also, it needs a cordination between the Ministry of Social Affairs, Post Office, and local government to improve human resource development (social guidance and aid disbursment). Ministry of social affairs also ought to share with local governments for funding socialization program efforts to optimize objective performance, and a need to sharpen and refine the concept or criteria of persons with severe disabilities

Keywords:
Evaluation-Social Assistance Policy-Severe Disability

Abstrak

Kementerian Sosial mengeluarkan kebijaksanaan dalam upaya memberikan perlindungan dan kesempatan dalam pemeliharaan sosial bagi orang dengan kecacatan berat melalui Keputusan Menteri Sosial No 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSODK Berat. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ODK Berat dan meningkatnya kepedulian keluarga dan masyarakat. Ujicoba kebijakan tersebut dilaksanakan mulai tahun 2006–2011. Selama lima tahun ujicoba, telah mampu memberikan asistensi terhadap 17000 orang. Namun belum pernah dilakukan kajian tentang kebijakan dan dampak program tersebut. Oleh karena itu, Puslitbang Kessos melakukan *quick research* untuk mengetahui keberhasilan program. Penelitian bersifat deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok. Responden ditentukan berdasarkan kluster terdiri atas: Pelaksana di tingkat Dinas Sosial Provinsi, kabupaten/kota, petugas pos kabupaten/kota, wali ODK berat, pendamping provinsi, kabupaten/kota, TKSM. Responden dipilih untuk mengevaluasi sasaran program: wali ODK Berat, pendamping, tokoh masyarakat dan petugas pos kabupaten/kota, kecamatan. Analisis implementasi kebijakan fokus pada komunikasi, sumber dan struktur organisasi. Dasar analisis dampak program ditinjau dari pencapaian tujuan, pemenuhan kebutuhan hidup, tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat. Program JSODK Berat kurang disosialisasikan sampai di tingkat pelaksana *grassroot* (kelurahan, pendamping dan penerima manfaat). Akibatnya, pengetahuan tentang program hanya sampai di tataran pelaksana kabupaten. Implementasi program secara substansi sudah mencapai sasaran. Dampaknya kesejahteraan ODK berat meningkat

terutama dalam perawatan dan therapi. Di sisi lain, terdapat peningkatan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap ODK. Ada kebutuhan keluarga ODK secara psikologis belum terjangkau oleh program, yaitu jaminan dan perlindungan bagi ODK apabila keluarga sakit atau meninggal. Sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan kompetensi dan kualitas pendamping, belum mengacu pada Undang-undang No 11 tahun 2009. Rekomendasi sebagai dasar pilihan alternatif di antaranya diselenggarakan program terpadu antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian kesehatan dalam pelayanan terhadap ODK berbasis keluarga dan *home visit.* Koordinasi antara Kementerian Sosial dengan PT Pos, dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia (pendamping dan petugas penyalur bantuan). Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah untuk *sharing* dana sosialisasi program. Sebagai upaya mengoptimalkan implementasi program, perlu adanya penajaman konsep tentang kriteria ODK berat.

Kata kunci:
Evaluasi-Kebijakan Asistensi Sosial-ODK Berat

A. Kebijakan Asistensi Sosial bagi Penyandang Cacat Berat

Undang–undang Nomor 4 tahun 1997, pasal 5 dan 6[1], Undang-undang Nomer 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap penyandang Cacat mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pemeliharaan Kesejahteraan Sosial melalui sistem jaminan sosial dengan menerima pemberian bantuan agar terpenuhi segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengimplementasikan peraturan per Undang-Undangan tersebut di atas, dalam kebijakan tentang program asistensi Sosial bagi ODK berat dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSKOD Berat. Tujuan pokok Program adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ODK Berat sehingga taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar.

Upaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan Dasar ODK berat dan perlindungan bagi ODK Berat dilakukan sesuai pedoman kegiatan JSODK Berat tahun 2010 yang meliputi pengertian, tujuan, sasaran Program, tahapan pelaksanaan dan organisasi pelaksana, Tugas dan wewenang menjelaskan tentang tugas dan wewenang lembaga tingkat pusat, lembaga tingkat provinsi, lembaga tingkat kabupaten/kota, lembaga/non lembaga kecamatan, lembaga/non lembaga desa, kelurahan, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Implementasi kebijakan asistensi sosial bagi ODK berat telah dilaksanakan selama periode 2005–2011 dengan setiap tahun dilaksanakan revisi pedoman (sebagai hasil monitoring dan laporan pelaksanaan Program JSODK Berat). Selama 5 tahun ujicoba program JSODK Berat telah mampu memberikan asistensi terhadap 17000 orang JSODK Berat dengan memberikan bantuan langsung tunai setiap bulan sebesar Rp.300.000,-.

Oleh karena itu, Direktorat PRS-PACA ingin mengetahui implementasi dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 68/HUK/2010 tentang “Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSODK Berat dan dampak program JSODK terhadap keluarga dan masyarakat. Maka pada tahun 2012 PUSLITBANG KESSOS melakukan quick research untuk mengevaluasi program asistensi bagi ODK berat dengan fokus pada Impementasi Pedoman JSODK Berat 2010 dan evaluasi kebijakan asistensi bagi ODK Berat.

Hasil kajian diharapkan menjadi bahan masukan bagi Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat untuk pengembangan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial khususnya Program Jaminan Sosial bagi ODK berat, bahan perumusan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan asistensi bagi Orang dengan Kecacatan Berat (ODK Berat). Quick research ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan Obyek Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 68/HUK/2010 tentan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSKOD Berat.

Tahapan analisis mencermati implementasi kebijakan Kementerian Sosial tersebut di atas dan mengevaluasi pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif. Sebagaimana sifat quick survei, pengambilan sampel informan dilakukan dengan menentukan kluster.

Teknik pengumpulan data menggunakan: Wawancara terhadap informan atau keluarga penerima manfaat JSODK (isteri/suami dan anak); Observasi partisipatif, terhadap pemenuhan kebutuhan ODK, pemenuhan kebutuhan papan ODK; *Focus Group Disccusión* dilaksanakan terhadap pelaksana Program tingkat kabupaten (seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seksi Pelaksana program JSODK Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kab. Kulon Progo, pendamping program JSODK kab. Kulon Progo, TKSK) dan Tokoh masyarakat. Aspek penting yang menjadi bahan diskusi antara lain: Pemahaman visi dan misi Program JSODK Berat; Opini penting tentang proses Pelaksanaan Program JSODK Berat dari orang tua/wali, pelaksana, pendamping dalam mencapai tujuan; Faktor pendorong dan penghambat; Dokumentasi diperoleh dari berbagai literatur, laporan pelaksanaan program.

Analisis data meliputi dua aspek yakni: Implementasi Kementerian Sosial Nomor 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSODK Berat, fokus pada empat aspek yakni: komunikasi, sumber-sumber; sikap pelaksana; struktur birokrasi. Sedang Evaluasi kebijakan: 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSODK Berat untuk mengukur pencapaian tujuan Program JSODK Berat, mengukur dampak program khususnya pada pemenuhan kebutuhan hidup minimal ODK Berat dan tumbuhnya kepedulian Masyarakat terhadap ODK Berat.

B. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Kementerian Sosial No 68/HUK/2010

Sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat 4 aspek penilaian yang akan digunakan dalam menganalisis Implementasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian JSKOD Berat, yakni komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

Implementasi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 68/HUK/2010 tentang Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010. Hasil wawancara, diskusi kelompok dan studi dokumentasi menyimpulkan bahwa pemerintah daerah cq Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Kulonprogo sudah mensosialisasikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 68/HUK/2010 tentang "Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010" hanya sampai pada tataran pelaksana program JSODK provinsi dan kota/kabupaten. Sehingga pemahaman tentang tujuan program JSODK Berat, proses pelaksanaan program JSODK Berat dan manfaat program JSODK Berat hanya sampai pada tataran pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Artinya kebijakan program asistensi bagi JSODK berat kurang dikomunikasikan sampai tataran pelaksana kelurahan, pendamping program JSODK dan penerima manfaat. Akibatnya pelaksana pendataan JSODK (pelaksana kelurahan, pendamping) dan penerima manfaat tidak memiliki pengetahuan tentang isi buku pedoman program JSODK.

Apabila dikaitkan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 25 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di antaranya: merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga sosialisasi program JSODK Berat sampai pada tataran kecamatan dan kelurahan adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah. Seharusnya pembuat kebijakan (pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengalokasikan dana untuk penyuluhan dan sosialisasi program

JSODK Berat.

Akibat selanjutnya dengan tidak tersedianya dana sosialisasi Program JSODK Berat pada tingkat kabupaten/kota maka pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan kurang memahami dengan jelas dan rinci tentang tujaun program JSODK berat. Proses pelaksanaan program JSODK berat dan manfaaf program JSODK berat. Hal ini terbukti ketika dilakukan wawancara dan diskusi kelompok dengan aparat kelurahan, petugas pos Kecamatan dan TKSK di Kabupaten kulon Progo dan Kota Banjarmasin, memperoleh informasi bahwa mereka hanya mengetahui program JSODK berat tersebut adalah program bantuan langsung tunai dari pemerintah cq Dinas Sosial untuk keluarga yang memiliki anak atau keluarga yang menderita cacat. Bantuan diterima dari petugas POS setiap empat bulan sekali (penerima manfaat program JSODK Berat menerangkan sejak tahun 2011 menerima empat bulan sekali) .

Belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi program JSODK berat sampai ke tataran pelaksana kelurahan, penerima manfaat program JSODK berat, pendamping mengakibatkan pelaksana kurang konsistensi dalam mengimplementasikan tahapan JSODK berat. Sebagaimana terjadi di kabupaten Kulon Progo, pada saat pendataan calon penerima JSODK belum menggunakan Formulir 1. Pendamping (TKSM Kabupaten) mengumpulkan data dan foto tentang orang dengan kecacatan berat sesuai dengan kriteria program JSODK berat dari TKSK. TKSK memberikan penjelasan kepada calon penerima manfaat bahwa pendataan Orang dengan kecacatan berat ini dilakukan oleh Dinas Sosial untuk bantuan pada orang dengan kecacatan berat.

Berbeda dengan pemerintah daerah kota Banjarmasin, meskipun sosialisasi program JSODK Berat hanya sampai tataran kota, namun pelaksana pemerintah daerah lebih memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang program JSODK berat dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi ODK berat. Pengetahuan dan pemahaman tentang Program JSODK berat dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program berkaitan secara signifikan dengan konsistensi pelaksanaan program.

Belum optimalnya pelaksana program JSODK di tingkat Kementerian Sosial R.I mengkomunikasikan program JSODK Berat, maka masih ditemui kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Sosial nomor 68/HUK/2010 tentang “Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010. Khusus pada tataran pelaksana grassroot (tingkat kelurahan) dan *stakeholder* (penerima manfaat program JSODK Berat), banyak menghadapi kendala dalam permasalahan yang berkaitan dengan proses administrasi dan mekanisme pembagian tugas wewenang antara pelaksana pusat, dan pelaksana daerah yang berjalan satu arah.

Hambatan ini berkaitan erat dengan prosedur kerja antara pelaksana pusat dan daerah. Secara herarkhi struktur organisasi pelaksana program JSODK berat mencerminkan alur komunikasi satu arah artinya pedoman pelaksana program JSODK berat mengatur tugas dan wewenang pelaksana tingkat pusat, daerah sampai kelurahan. Hasil wawancara dengan pelaksana, permasalahan implementasi kebijakan sering terjadi seperti penentuan sasaran, penentuan kriteria sesuai quota daerah, dan penentuan pendamping. Kenyataannya pelaksana di tingkat kabupaten membutuhkan tindakan alternatif dalam mengimplementasikan program JSODK berat.

Pencapaian implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan akan dapat terlaksana apabila penyusun kebijakan Program JSODK berat juga mengkaitkan pelaksanaan program dikaitkan dengan Undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada bab III pasal (13 g) dan pasal 14 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Kesejahteraan sosial pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa seharusnya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat menyusun petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Teknis.

Pendamping berperan penting dalam implementasikan Pedoman program JSODK berat 2010. Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 32 mengatur tentang sumber daya penyelengga-

raan kesejahteraan sosial. Pasal 33, disebutkan bahwa sumberdaya manusia tersebut meliputi : tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial profesional; relawan sosial; dan penyuluh sosial.

Selain itu mereka harus memiliki kualifikasi antara lain: berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial; memiliki pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Pasal 34 mengemukakan bahwa selain memiliki tugas dan peran, sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berhak mendapatkan: pendidikan; pelatihan; promosi; tunjangan; dan/atau penghargaan.

Kenyataannya hasil wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa pendamping belum sesuai kualifikasinya misal : Kabupaten Kulonprogo pendamping berpendidikan SLTA, belum memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menangani ODK Berat, belum memiliki keterampilan pekerja sosial, memiliki wilayah kerja 12 kecamatan dan 69 ODK, mendapat insentif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peluang yang bersangkutan untuk mengikuti pembinaan dan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah belum ada, padahal Undang-undang Nomor 32 tahun disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan sosial, salah satunya dalam pembinaan (pemberian insentif dan peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan tentang ODK berat) terhadap pendamping. Berbeda dengan Kota Banjarmasin pendamping selain mendapat honor dari program JSODK berat juga mendapat insentif dari Pemerintah Daerah).

C. Evaluasi Program JSODK Berat

Tujuan evaluasi Program JSODK Berat dalam quick research ini adalah ingin mengetahui pencapaian tujuan program, ingin mendiskripsikan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup ODK Berat dan meningkatkan tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap ODK Berat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010. Dampak dari pelaksanaan Program JSODK Berat akan mendiskripsikan tentang manfaat program JSODK Berat bagi penerima manfaat (ODK Berat) dan keluarga. Juga akan diuraikan tentang pendapat masyarakat tentang manfaat program JSODK Berat beserta permasalahannya.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Jaminan Sosial ODK Berat, disebutkan bahwa inti pokok tujuan Program JSODK Berat adalah untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODK Berat. Tujuan yang ingin dicapai meningkatnya upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi ODK Berat dan mekanismenya sehingga ODK berat dapat terpenuhi hak dan pemenuhan kebutuhannya.

Penerima JSODK Berat di kabupaten Kulon Progo mengemukakan bahwa sebagian dana JSODK Berat untuk keperluan perawatan ODK Berat. Khusus yang masih balita dana dimanfaatkan untuk membeli susu dan buah-buahan untuk Jus. Manfaat untuk perawatan meliputi: beli obat, sewa kendaraan/beli bensin untuk ke rumah sakit, beli selang, beli pempress, membuatkan box, sarana aktivitas sehari-hari. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar penerima JSODK berat membutuhkan perawatan fisik (sesuai dengan jenis kecacatan, usia ODK berat) dan psikis (rasa aman, trauma).

Hasil observasi dan wawancara dengan wali dan pendamping/TKSK diketahui bahwa status wali ODK Berat berpengaruh terhadap perhatian dan perawatan. Artinya hampir sebagian besar ODK berat yang diasuh sendiri oleh orangtua nya, perawatan anak lebih diperhatikan daripada yang dirawat (wali ODK) adalah nenek atau kakek atau keluarga lainnya (kakak, adik, bibi, paman). Beberapa ODK dalam usia masih kanak-kanak selalu dibawa orangtuanya untuk therapi ke rumah sakit Umum atau Rumah sakit daerah.

Kasus penerima manfaat di kabupaten Kulon Progo, keterbatasan pemilikan sarana transportasi, ODK dibawa dengan kendaraan umum. Setiap kali menerima bantuan JSODK Berat mereka membawa ODK Berat therapy. Menurut wali di rumah sakit, selain mendapatkan therapy dan perawatan, wali diberi pengetahuan oleh perawat rumah sakit bagaimana membantu

ODK berat melaksanakan aktivitas. Mereka diberi keterampilan untuk memandikan, melatih gerakan fisik, keterampilan untuk mengganti selang (bagi yang menggunakan selang), memberi jely pada ODK Berat. Setelah wali memiliki keterampilan dalam perawatan ODK, biasanya pihak rumah sakit mengijinkan wali untuk merawat ODK berat di rumahnya. Wali diijinkan ke rumah sakit untuk konsultasi tanpa membawa ODK Berat (karena keterbatasan biaya untuk transportasi). Umumnya mereka dapat membeli obat atau alat untuk ODK. Konsultasi ke rumah sakit bisa dilakukan sebulan sekali.

Tokoh masyarakat menyebutkan bahwa dana bantuan Dana bantuan langsung tunai itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai kehidupan mereka, melainkan juga dipakai untuk biaya kesehatan, karena mereka belum masuk dalam program jamkesmas ataupun jamkesda. Biaya kesehatan itu kadangkala melebihi besarnya nilai BLT yang diterima. Sebagai penyandang cacat berat mereka sebenarnya butuh biaya kesehatan yang cukup besar setiap bulannya. Sehingga dapatlah disimpulkan secara garis besar, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, sandang dan papan tidak terlalu menjadi masalah. Umumnya keluarga dapat memenuhi.

Manfaat dana JSODK berat sebagian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (susu, snack, bakso) perawatan ODK Berat (obat ,Jeli, tabung). Sebagian besar Wali ODK berat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan medis dan psychologis. Kebutuhan psychologis yaitu kecemasan wali ODK (usia diatas 50 tahun, wali adalah kakek/nenek) tentang perawatan ODK Berat apabila mereka meninggal, keamanan ODK Berat wanita bila ditinggal sendiri di rumah. Serta kejelasan sampai kapan dana JSODK Berat diterima. Program JSODK Berat juga mampu meningkatkan pengetahuan keluarga dalam memberikan perawatan terhadap ODK Berat (wali menerima pelatihan keterampilan merawat ODK berat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari). Program JSODK Berat dapat menimbulkan kesadaran dari keluarga yang memiliki ODK Berat untuk tidak menyembunyikan lagi ODK berat dan mampu membuat keluarga untuk membawa ODK pergi ke rumah sakit (*therapy*).

Wali ODK Berat mengharapkan penerimaan dana setiap bulan agar kontinuitas perawatan ODK berat tidak mengalami kendala. Artinya dengan pemberian dana setiap 4 bulan sekali, menurut penerima dana JSODK Berat kurang efektif, karena tidak sesuai dengan tujuan program. Pemanfaatan dana tidak untuk kebutuhan ODK berat tetapi lebih prioritas untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan sekunder lainnya. Bagi penerima yang pemanfaatan untuk therapy, dikatakan tidak efektif karena pengobatan atau therapy tidak bisa terus menerus sesuai dengan kebutuhan ODK.

Kendala dalam penyaluran dana JSODK Berat adanya keterbatasan SDM Petugas pos (satu kecamatan dua orang petugas pos) dan tidak adanya insentif. Kondisi ini menyebabkan adanya beban tugas bagi petugas pos kecamatan. Uraian tugas dan wewenang lembaga pelaksana masih bersifat umum belum diuraikan mekanisme sesuai jenjang tugas. Belum terinci tanggung jawab antara tugas Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu perlu pedoman teknis di tingkat pelaksana kabupaten.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu secara garis besar dapatlah disimpulkan bahwa, pedoman pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat tahun 2012 di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kulonprogo merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 68/HUK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010. Pemahaman tentang Pedoman JSODK berat 2010,tataran pelaksana di tingkat kecamatan, hanya dimiliki pelaksana dinas/instansi sosial tingkat provinsi dan kabupaten. Belum adanya pemahaman pemerintah daerah Kulon Progo dalam mensosialisasikan Pedoman program JSODK Berat di tingkat kecamatan, kelurahan, TKSK, pendamping dan wali, menyebabkan implementasi Pedoman JSODK berat di tataran kecamatan sampai kelurahan kurang sesuai

dengan tujuan dan sasaran Program JSODK berat 2010.

Pemahaman tentang pemanfaan dana (pemenuhan kebutuhan dasar ODK Berat dan perawatan ODK) setiap daerah berbeda. Penyebabnya karena dalam pedoman belum disebutkan definisi operasional tentang pemenuhan kebutuhan dan perawatan. Upaya untuk menyatukan pemahaman dan memudahkan untuk mengukur manfaat dana JSODK perlu disusun petunjuk teknis untuk menjabarkan Pedoman tersebut sesuai dengan kondisi daerah. Pendamping berperan penting dalam implementasikan Pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (JSODK) berat 2010. Kenyataan kompetensi pendamping belum sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 32 ayat 1 (Kasus Kab. Kulon Progo 1 pendamping (PSM Kabupaten) bertanggung jawab atas 69 ODK berat dan memiliki luas wilayah kerja 12 kecamatan).

Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman Pemerintah Daerah tentang tanggung-jawab dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan diberikannya insentif, peluang untuk meningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan tentang ODK berat terhadap pendamping, melalui sharing dana.

Dampak pelaksanaan Program Jaminan Sosial ODK Berat telah mampu meningkatkan pengetahuan keluarga dalam memberikan perawatan terhadap ODK Berat (wali menerima pelatihan keterampilan merawat ODK berat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari). Program JSODK Berat mampu menimbulkan kesadaran keluarga yang memiliki ODK Berat untuk tidak menyembunyikan lagi ODK berat dan keluarga mau membawa ODK pergi ke Rumah sakit (therapy). Manfaat dana JSODK berat sebagian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (susu, snack, bakso) perawatan ODK Berat (obat ,Jeli, tabung). Kebutuhan psychologis yaitu kecemasan wali ODK (usia diatas 50 tahun, wali adalah kakek/nenek) tentang perawatan ODK Berat apabila mereka meninggal, keamanan ODK Berat wanita bila ditinggal sendiri di rumah. Serta kejelasan sampai kapan dana JSODK Berat diterima. Program JSODK Berat secara umum, membantu wali ODK Berat meningkatkan kesejahteraan ODK (pangan, papan) namun belum mampu memberikan perlindungan atau jaminan sosial (biaya therapy, perawatan kesehatan). Wali ODK Berat mengharapkan penerimaan dana setiap bulan agar kontinuitas perawatan ODK berat tidak mengalami kendala. Uraian tugas dan wewenang lembaga pelaksana masih bersifat umum belum diuraikan mekanisme sesuai jenjang tugas. Oleh sebab itu perlu pedoman teknis di tingkat pelaksana kabupaten.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapatlah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Kementerian Sosial Republik Indonesia cq Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (PRSPC). Untuk melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan pemberian JSODK Berat 2010, dengan penambahan: Definisi operasional tentang Jaminan Sosial atau asistensi Sosial. Definisi operasional tentang kebutuhan dasar hidup. Definisi operasional perawatan ODK Berat: therapy, biaya ke rumah sakit, biaya pembelian alat misal tabung, jely, pamppers, pembangunan sarana kegiatan sehari-hari ODK Berat. Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian JSODK Berat 2010" sebagai buku saku pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan pendamping. Revisi: Kriteria ODK Berat tentang usia. Tercantum berusia antara 2 s.d. 55 tahun. Bagaimana dengan usia dibawah dua tahun atau di atas 55 tahun. Sebaiknya usia tidak usah dicantumkan. Indikator monitoring tentang penyaluran dana senilai Rp 300.000 diterima per orang per bulan selama 12 bulan. Hasil wawancara dengan wali diketahui bahwa untuk tahun 2012 penerimaan diterima empat bulan sekali. Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan pada saat penyusunan LAKIP.

Kementerian Sosial Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial mengadakan MOU dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bersinergi membuat Program Pelayanan Terpadu antara Pelayanan Rehabilitasi Keliling dengan Puskes-

mas khusus untuk pelayanan Rehabilitasi bagi ODK berat dengan ketentuan sebagai berikut. Puskesmas dan Program Rehabilitasi Sosial Keliling (Pelayanan terpadu) menyediakan tenaga medis untuk melakukan pelayanan therapy bagi ODK berat di rumah ODK Berat. Puskesmas dan Program Rehabilitasi Sosial Keliling (Pelayanan terpadu), Menyediakan program pelayanan berbasis keluarga (*Family base*). Nama : Program Pelayanan terpadu bagi ODK Berat. Latar Belakang, Kebutuhan Pelayanan bagi ODK berat adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perawatan. Hasil kajian menginformasikan bahwa kebutuhan ODK berat (penerima JSODK Berat) adalah pemenuhan kebutuhan (makan: makanan tambahan seperti susu, makanan ringan/snack), buah-buahan, bakso) dan perawatan (beli pamppres, tabung, obat, jelly). Permasalahan ODK berat memerlukan biaya ke rumah sakit untuk therapy (terutama bagi ODK usia kanak-kanak yang mengalami masalah dalam perkembangan fisik), kenyataan sebagian besar dari mereka belum menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat, mereka tidak bisa meninggalkan rumah. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ODK Berat dan melindungi ODK berat menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Program Rehabilitasi keliling) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Puskesmas). Oleh karena itu. Perlu mensinergikan pelayanan terhadap ODK Berat dengan MOU dalam menyusun Program Pelayanan Terpadu. Tujuan Program: Meningkatkan pengetahuan keluarga ODK tentang Jenis kecacatan berat dan kebutuhannya; Meningkatkan keterampilan keluarga ODK tentang perawatan ODK berat; Meningkatkan kesadaran keluarga ODK dan masyarakat dalam memberikan perawatan, perlindungan dan jaminan sosial terhadap ODK (dengan pembentukan kelompok keluarga ODK Berat. Materi: Pengetahuan tentang jenis kecacatan Berat dan kebutuhannya; keterampilan dalam merawat ODK berat (memberikan obat, mengganti tabung, menggunakan jelly) ODK; Memberi pengetahuan kepada keluarga untuk memperhatikan dan melindungi ODK Berat. Metode: Ceramah dan diskusi; Kunjungan rumah (home visit); Pendekatan individu/perorangan (wali ODK berat) dan keluarga. Pelaksana: Petugas Rehabilitasi Sosial Keliling (Pekerja sosial, Petugas Therapy, Dokter dan perawat, Psikholog. Puskesmas: dokter, perawat. pendamping.

Kementerian Sosial RI mencermati kembali MOU dengan PT Pos Indonesia untuk merevisi beberapa item MOU yang berkaitan dengan: Jadwal penyaluran dana JSODK Berat dari per bulan menjadi empat bulan sekali, keterbatasan SDM petugas pos kecamatan dan insentif.

Pemerintah Daerah (Dinas Sosial Provinsi). *Latar Belakang:* Perencanaan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pemberian JSODK Berat 2010 hanya sampai di tingkat provinsi. Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Komunikasi harus dilakukan sedikitnya 3 kali apabila ingin pelaksana memahami program. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat menyusun perencanaan sosialisasi Pedoman JSODK Berat hanya sampai di tingkat Provinsi dengan peserta kabupaten/kota yang melaksanakan program. Sebenarnya setiap SKPD baik pusat ataupun daerah memiliki program penyuluhan. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan maka dilaksanakan sinergi program dengan bidang penyuluhan untuk melaksanakan sosialisasi. Tujuan: Kesatuan pemahaman dan pengetahuan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian JSODK Berat 2010. Materi: Pedoman Pelaksanaan Pemberian JSODK Berat 2010. Metode: Ceramah dan diskusi. Pelaksana: Pelaksana Program JSODK Berat Provinsi dan Penyuluh sosial Provinsi

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Sosial RI dalam merencanakan alternatif program perlindungan Bagi ODK terlantar. Latar Belakang: ODK Berat adalah penyandang cacat yang tidak bisa direhabilitasi, dalam kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain (orang tua/wali, nenek/kakek atau saudara). Program JSODK Berat saat ini baru mampu memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun untuk jaminan masa depan apabila wali meninggal/sakit dan perlindungan bagi ODK belum direncanakan. Kenyataan di lapangan sebagian

besar ODK dalam kondisi rawan terlantar, tidak terlindungi baik secara fisik maupun psikologis dari gangguan masyarakat (terutama remaja putri dan anak-anak). Prasarana dan sarana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap ODK Berat rawan terlantar oleh karena itu berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan didirikan Panti Khusus bagi ODK Berat Terlantar. Tujuan: Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi ODK Berat. Pelaksanaan: Mendirikan Panti Pelayanan ODK Berat, Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kementerian Sosial RI dengan Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam sharing dana: Latar belakang: Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 32 ayat 1 menyebutkan Sumber daya manusia terdiri atas: tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial profesional; relawan sosial; dan penyuluh sosial. Mereka harus memiliki kualifikasi: pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Sebagai SDM pelayanan sosial mereka mempunyai hak sebagai berikut: pendidikan; pelatihan; promosi; tunjangan; penghargaan.[2] Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah" pada Bab III pasal (13 g) dan Pasal 14 bahwa menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang bersifat pilihan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan potensi. Salah satu urusan wajib adalah melaksanakan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota.[3]

Disebutkan pula bahwa Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk pengisian jabatan tertentu yang memerlukan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli di bidang tertentu, pengalaman kerja tertentu di Kabupaten atau Kota, maka pembina kepegawaian tingkat Provinsi dan atau Pemerintah dapat memberikan fasilitasi.[4]

Permasalahannya, jumlah pendamping tidak sesuai dengan beban kerja (Kabupaten Kulon progo 1 Pendamping Kabupaten memiliki luas wilayah kerja 12 Kecamatan dengan penerima manfaat berjumlah 69 orang, sedang Kota Banjarmasin setiap kecamatan ada 1 Pendamping). Pendamping yang dipilih belum seluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pembinaan sumberdaya Manusia (pemberian insentif, pemberian Fasilitas kerja dan pemberian peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan) belum seluruhnya dimasukkan dalam perencanaan dan belum dialokasikan dana.

Mensikapi kondisi tersebut perlu adanya koordinasi beberapa SKPD di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam peningkatan kompetensi pendamping JSODK Berat sesuai beban kerja. Pelaksanaan Koordinasi: Di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia antara Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial cq Balai Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan Pendamping JSODK Berat. Materi pelatihan dan pendidikan pendamping program JSODK Berat antara lain: Pengetahuan tentang pelayanan sosial terhadap keluarga ODK Berat; Pengetahuan tentang jenis kecacatan dan kebutuhan pelayanannya; Pengetahuan tentang Metode Pekerjaan Sosial; Keterampilan membangun jaringan sosial.

Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembinaan pendamping dalam APBD. Pembinaan Pendamping antara lain: Peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan terhadap ODK berat baik di tingkat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/kota maupun lembaga swasta; Pemberian insentif sesuai beban kerja; dan Fasilitas pelayanan kepada penerima program JSODK Berat.

Pustaka Acuan

Carl Freidrich, dalam Winarno Budi, "*Teori dan Proses kebijakan publik"*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002.

Departemen Sosial RI, *Laporan Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat* Jakarta, Biro Hukum.

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2007, *Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Jaminan untuk Penyandang Cacat Berat*

Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial 2007, *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial.*

————————, 1998 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 1998 *Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,* Biro Hukum.

————————, 2004 *Data Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial* Tahun 2004, Jakarta, Pusdatin.

————————, 2007 Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004–2009.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2005.*

James P Lester dan Joseph steward, Public Policy: an evolutionary Approach,(second ed, Australia: Wadsworth, 2000).

Depertemen Sosial RI Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat "*Buku Pedoman Pemberian Bantuan dana jaminan Sosial bagi penyandang Cacat Berat, 2007.*

Dye Thomas Dye, *Understanding Public policy,* Englawood Cliff, nJ, printice –Hall, 2nd.ed. 1992.

Edi Suharto, 2001. *Menggugat Sistem jaminan Sosial Kita.* Republika.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, Ps 59 tentang *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat.*

Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Suharsini Arikunto & Cepi SAJ, 2008, *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara

Winarno Budi, 2002. *Teori dan Proses kebijakan publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 tentang *Sistem Jaminan Sosial***.**

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 147 ayat (1).

(Footnotes)

1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 5 menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan.

2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, Bab II pasal 32-34.

3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

7

Peranan Harga Diri sebagai Variabel Moderasi dalam Hubungan antara Depresi dan Keberfungsian Sosial Internal Remaja

The Role of Self-dignity as Moderating Variable in Relationship between Depression and Youths' Inner Social Functioning

Husmiati

Husmiati, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
Email: umi_yusuf2005@yahoo.co.id. Diterima 12 Agustus 2013, disetujui 16 Agustus 2013.

Abstract

The main purpose of this study is to examine the significant influence of self-dignity as moderating vairable in the relationship between depression and youth's inner social functioning. A total of 121 youths dropout from school who received social rehabilitation program at Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) in Cimahi, Indonesia, in 2012, were selected as respondents through purposive technique. Research instrument was modified from standardized intrument such as: youth depression scale was modified from the generalized contentment scale; Youth self-esteem scale was modified from the Rosenberg Self Esteem Scal; and the inner social functioning scale was modified from inner-interaction social functioning scale. The results of this study found that the youths' self-esteem was a significant role as moderating variable in relationship between youth depression and their inner social functioning. Therefore, the youths' self-dignity factor is very important in addressing the youth problems especially depression that can be improved as their inner social functioning.

Keywords:
Dropout Youths' Self-dignity-Depression-Inner Social Functioning

Abstrak

Tujuan utama penelitian adalah untuk menguji pengaruh peranan harga diri sebagai variabel moderasi dalam hubungan depresi dengan keberfungsian sosial internal remaja. Sebanyak 121 remaja putus persekolahan yang memperoleh pelayanan program rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), di Cimahi, Indonesia, 2012, dipilih secara *purposive* sebagai responden dalam penelitian ini. Alat ukur dalam penelitian ini terdiri dari: skala depresi dimodifikasi dari *generalized contentment scale*; skala harga diri dimodifikasi dari *The Rosenberg Self Esteem Scale*; dan skala keberfungsian sosial internal dimodifikasi dari *Inner-Interaction Social Functioning Scale*. Hasil penelitian menunjukkan harga diri memainkan peranan yang signifikan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara depresi dengan keberfungsiaan sosial internal remaja. Dengan demikian maka faktor harga diri remaja perlu mendapat perhatian serius dalam mengatasi masalah remaja, khususnya depresi, agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Kata Kunci:
Remaja Putus Sekolah-Harga Diri-Depresi-Keberfungsian Sosial Internal

A. Remaja dan Harga Diri

Pendidikan merupakan hak azasi dan kebutuhan manusia yang mendasar khususnya pada kelompok usia remaja. Terlepas dari peningkatan angka partisipasi anak yang menempuh pendidikan dasar, ternyata masih ada sekitar dua juta anak Indonesia yang tidak bersekolah. Dari angka itu, sekitar 15 persen adalah anak berusia 7 sampai 15 tahun. Sementara itu diperkirakan 1 juta anak per tahun mengalami putus sekolah (BPS, 2012). Pengertian remaja putus sekolah adalah seorang anak usia sekolah antara 7 sampai 21 tahun yang tidak bersekolah karena keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah.

Status putus sekolah dikalangan remaja diyakini merupakan satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan mereka mengalami depresi. Faktor perkembangan sebagai remaja yang sedang dalam proses pencarian identitas diri, ditambah dengan pengalaman putus sekolah semakin memperparah kondisi psikologis remaja dalam bentuk yang lazim dikenali sebagai depresi. Oleh sebab itu, upaya mendorong anak untuk tetap bersekolah dan mencegah meningkatnya jumlah remaja putus sekolah maka perlu dilakukan secara terpadu dan terencana. Hal ini karena mereka yang putus sekolah akan meningkatkan potensi resiko mereka menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan tidak sedikit dari mereka cenderung terlibat dengan permasalahan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan rentan terjangkit HIV/AIDS. Perubahan sosial dan budaya yang demikian cepat di Indonesia saat ini turut andil dalam meningkatkan resiko tersebut, terutama terhadap para remaja baik putra maupun putri.

Oleh sebab itu, remaja putus sekolah perlu diberikan pelayanan subsitusi berupa pelayanan pendidikan non formal bagi remaja. Pendidikan keterampilan hidup, pelatihan kejuruan dan pendidikan sebaya akan menjadi hal penting dalam rangka meraih kesejahteraan dan masa depan remaja di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan remaja putus sekolah dan dalam jangka panjang dapat memperbaiki kesejahteraan mereka adalah menyediakan pelayanan bagi remaja putus sekolah dalam bentuk program rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Hal ini dilakukan agar remaja memiliki harga diri, kepercayaan diri dan mampu hidup mandiri dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga melaksanakan fungsi sosial mereka secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, harga diri pada remaja putus sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk dalam mencegah depresi dan pada akhirnya meningkatkan keberfungsian sosial dalam diri mereka.

Permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah profil sosio-demografi remaja yang menjadi responden peneltian ini? Apakah variabel harga diri memainkan peranan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara depresi remaja dengan keberfungsian sosial internal remaja putus sekolah yang menerima program pelayanan dan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Remaja, Jika variabel harga diri tersebut memainkan peranan sebagai variabel moderasi, apakah peranan tersebut signifikan? Apakah variabel depresi secara sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap keberfungsian sosial internal remaja? Apakah variabel harga diri secara sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap keberfungsian sosial internal remaja? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara remaja putra dan remaja putri dalam hal harga diri, depresi dan keberfungsian internal remaja?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil sosio-demografi remaja yang menjadi responden penelitian ini, Untuk menganalisis peranan harga diri sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara depresi dengan keberfungsian sosial internal remaja putus sekolah, menganalisis pengaruh depresi terhadap keberfungsian sosial internal remaja, menganalisis pengaruh harga diri terhadap keberfungsian sosial internal remaja, dan Untuk menganalisis perbedaan depresi, harga diri, dan keberfungsian sosial internal remaja berdasarkan jenis kelamin

B. Remaja dan Keberfungsian Sosial Internal

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab timbulnya depresi pada remaja. Putus hubungan dengan pacar, kematian orangtua atau sahabat, kegagalan di sekolah, proses pendewasaan yang sedang terjadi seperti masalah hormonal, konflik dengan orang tua, dan sebagainya. Sebagian besar remaja yang menderita depresi adalah remaja dengan kepribadian tertentu, seperti remaja yang rendah diri atau remaja yang menuntut dirinya harus selalu sempurna. Depresi adalah perasaan yang sinonim dengan perasaan sedih, murung, kesal, tidak bahagia, dan menderita (Hawari, 2000). Orang umumnya menggunakan istilah depresi untuk merujuk pada keadaan atau suasana yang melibatkan kesedihan, rasa kesal, tidak bertenaga, dan mempunyai rasa harga diri rendah.

Pada umumnya harga diri adalah suatu kebutuhan psikologis yang sangat dominan dalam menentukan tingkahlaku manusia. Oleh karena itu penelitian terhadap harga diri sangat banyak dan beragam, yang meliputi penelitian terhadap anak-anak, remaja, orang dewasa maupun dunia kerja (Howe, 1984). Coopersmith (1967) misalnya menyatakan harga diri merupakan evolusi diri yang dibuat dan dipertahankan oleh seseorang, serta lahir dari hasil interaksi seseorang dan lingkungannya. Selain itu juga didapat dari harga, perlakuan dan penerimaan orang lain terhadap diri individu itu sendiri. Pendapat lain yakni dari Rosenberg (1965), menyatakan bahwa harga diri adalah penilaian individu itu sendiri. Individu yang mempunyai harga diri tinggi akan merasakan dirinya mempunyai sifat-sifat yang positif, dirinya dihargai dan dihormati, serta tidak merasa diri hina atas kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Individu yang mempunyai harga diri rendah cenderung menilai dirinya sendiri secara negatif, tidak menerima diri sendiri dan sering mengasingkan diri. Keadaan ini rentan dialami oleh remaja. Terutama remaja yang putus sekolah cenderung akan mengalami penurunan harga diri yang berpotensi timbulnya masalah baru yaitu depresi. Remaja yang mengalami depresi juga tidak dapat berfungsi sosial secara baik. Keberfungsian sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menyesuaikan diri dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Hal ini berkaitan erat dengan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga memberikan hasil yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Faul (1995) menyatakan keberfungsian sosial memiliki enam indikator yaitu, indikator positif (tingginya pencapaian, kepuasan dan pengharapan) dan indikator negatif (rendahnya tekanan, kekecewaan, dan ketidakberdayaan). Keberfungsian sosial seseorang dinilai optimal apabila aspek positif tersebut lebih kuat dibandingkan dengan aspek negatifnya pada saat pengukuran dilakukan. Kesempatan dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sehingga memungkinkan pencapaian keberfungsian sosial internal sebagaimana mestinya. Seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya melalui tiga cara:

1. Mampu menyelesaikan perannya dengan baik. Ia dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara kongkrit.
2. Memiliki tanggungjawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal-hal yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Memperoleh kepuasan diri dari penampilan dan tugas-tugasnya dan pelaksanaan tanggungjawabnya.

Dalam keadaan normal seseorang harusnya mampu melakukan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis sebagai manusia. Maslow dalam Ife (2001) menyatakan bahwa “terdapat lima tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan psikologis yang fundamental, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Berdasarkan hal tersebut maka setiap individu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya masih ada individu-individu yang mengalami masalah

dalam pemenuhan kebutuhan. Ketiga hal di atas menjadi pemicunya dan mengakibatkan pencapaian keberfungsian sosial yang diharapkan menjadi terganggu.

Florence Hollis dalam Loewenberg (1977) mengatakan: "*to enhance the social functioning of each client is alleviating them from stress and malfunctioning in their person situation system"* (hal.57)*.* Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberfungsian sosial seseorang, dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan dan menurunkan ketidakberfungsian yang terdapat dalam dirinya dan sistem yang berada di sekitarnya. Proses pembentukan keberfungsian sosial internal memerlukan waktu yang cukup lama, karena dibutuhkan adaptasi untuk mempertahankan interaksi dengan lingkungannya. Pengaruh internal memegang peranan yang sangat besar untuk menyesuaikan pengalaman yang diterima, dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan. Skidmore, Farley dan Thackeray (1991)) membuat segitiga keberfungsian sosial yang terdiri atas : "*feeling of self-worth, satisfaction with roles in life and positive relationships with others"* (hal.19). Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sosial internal seseorang tidak terlepas dari apa yang dirasakan oleh dirinya, aturan-aturan dan hubungan dengan sesamanya. Hal ini sangat berbeda dengan keberfungsian eksternal.

Secara umum segitiga keberfungsian sosial diutamakan pada pengungkapan perasaan individu sebagai pribadi yang berguna (*self-worth*). Hal ini difokuskan pada pembentukan kognisi seseorang untuk memaknai sebuah kejadian. Bila ia merasa sebagai orang yang berguna maka aspek-aspek positif keberfungsian sosial internalnya akan lebih menonjol dibandingkan dengan aspek-aspek negatifnya. Pendapat tersebut serupa dengan pernyataan Delgado yang dikutip oleh Loewenberg (1977) bahwa *supernatural beliefs tend to persist when they offer solutions to significant human problems. Because people who are uprooted are beset with intense stresses as they attempt to adapt to a strange land, they increase their reliance on spiritualism as a means of copyng with these stresses (p. 244).* Hal ini menggambarkan bahwa keberfungsian sosial internal terletak pada keyakinan supranatural untuk menyelesaikan segala masalah yang signifikan. Tekanan, ketidakberdayaan dan kekecewaan yang muncul merupakan bagian dari kelemahan mereka terhadap kekuatan internal tersebut. Individu beradaptasi memunculkan kemampuan mereka untuk mengatasi stres, kekecewaan dan ketidakberdayaan.

Sebagai rumusan, remaja yang karena sebab-sebab tertentu menjadi putus sekolah akan mengalami penurunan harga diri. Karena harga diri yang rendah menyebabkan remaja mengalami depresi. Oleh karena pengalaman dan masalah depresi maka remaja dapat mengalami ketidakberfungsian sosial secara optimal. Oleh sebab itu harga diri memainkan peranan penting dalam hubungan antara depresi dengan keberfungsian sosial remaja. Berdasarkan tinjauan bacaan dan rumusan di atas maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

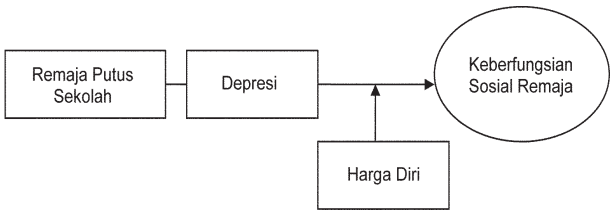

Diagram 1: Model Analisis Penelitian

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *cross sectional study* dengan menggunakan instrumen penelitian berbentuk angket. Variabel terikat adalah keberfungsian sosial internal remaja, dan variabel bebas adalah faktor-faktor sosio-demografi, depresi dan harga diri. Pemilihan responden menggunakan teknik penyampelan secara *purposive,* sebanyak 121 remaja putus sekolah yang sedang mengikuti program pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Cimahi, Jawa Barat. Instrumen penelitian merupakan angket terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, terdiri dari pertanyaan berkaitan dengan biodata. Bagian kedua, mengukur harga diri yang dimodifikasi dari *The Rosenberg Self Esteem Scale*. Skala ini terdiri dari 10 item yang bertujuan mengukur tingkat harga diri yang menggunakan skala

Likert. Bagian ketiga, untuk mengukur skala keberfungsian sosial internal yang dimodifikasi dari *Inner-Interaction Social Functioning Scale (*Faul & Hanekom, 1994). Bagian keempat, untuk mengukur depresi yang dimodifikasi dari *Generalized Contentment Scale* (Hudson,1993), yang terdiri dari 25 item yang mengukur depresi dan menggunakan skala Likert. Hasil uji coba alat ukur dilakukan terhadap remaja yang mempunyai karakteristik yang sama dan diperoleh tingkat reliabilitas alat ukur penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Nilai Koefisien Alpha Skala Depresi, Harga Diri dan Keberfungsian Sosial

Variabel-Variabel	Alpha
1. Skala Penghargan diri	0,87
2. Skala keberfungsian sosial dalam	0,82
3. Skala Kepuasan Hidup (depresi)	0,73

Reliabilitas alat ukur bagi Harga diri adalah tinggi yaitu alpha yaitu 0,87. Demikian juga alat ukur yang digunakan untuk mengukur Depresi yaitu alpha 0,82 dan dan tahap Keberfungsian sosial internal dengan alpa yaitu 0,73. Penelitian ini menggunakan bantuan 2 orang pekerja sosial sebagai enumerator. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti memberi pelatihan ringkas kepada enumerator tentang cara-cara menjalankan wawancara. Oleh karena responden merupakan remaja yang umumnya berpendidikan sekolah menengah dan beberapa tidak fasih dengan bahasa Indonesia karena umumnya menggunakan bahasa Sunda, maka enumerator diingatkan supaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mendengar dengan teliti apabila responden memberi dengan dialek daerah. Analisis Data, menggunakan perangkat lunak komputer yaitu SPSS for Windows version 19.0. Beberapa uji statistik deskriptif dan inferensial digunakan dalam analisis data. Ujian statistik deskriptif seperti mean, standard deviasi, distribusi frekuensi, dan persentase digunakan. Begitu pula uji statistik inferensial turut digunakan seperti uji t, dan analisis regresi ganda (*multiple regression analysis*). Satu model persamaan dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seperti berikut. Keberfungsian Sosial (KS) = Constant + Depresi (D) + Harga Diri (HD) + Interaksi antara Depresi dengan Harga Diri (D x HD)

D. Depresi dan Keberfungsian Sosial Internal Remaja

Profil latar belakang responden: Hasil analisis menunjukkan mayoritas responden berumur antara 18–20 tahun (68,6 persen), 17 tahun kebawah (19,8 persen), diikuti umur antara 21–23 tahun (11,6 persen). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa suku bangsa yang paling banyak adalah Sunda (83,5 persen), diikuti Jawa (11,6 persen), Bugis (3,3 persen), Madura (0,8 persen dan Batak (0,8 persen). Umumnya responden Sekolah Dasar (18,2 persen), Sekolah Menengah Pertama (39,7 persen) dan Sekolah Menengah Atas (42,1 persen).

Data pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa kelengkapan orang tua remaja; 95 (78,5 persen) kedua orang tua remaja masih lengkap dan hanya 22 (18,2 persen) yang bapaknya tidak ada. Penelitian ini juga mendapati mayoritas remaja tidak diasuh oleh orang tua mereka sendiri melainkan diasuh oleh keluarga dekat (46,3 persen) dan keluarga lain sebagai keluarga angkat (35,5 persen). Paling akhir, 60 (49,6 persen) remaja mengakui kekuatan pegangan nilai agama sedang, selebihnya kuat (27,3 persen) dan sangat kuat (19,8 persen).

Perbedaan depresi, Harga Diri dan Keberfungsian Sosial berdasarkan Jenis Kelamin, dalam tabel 3 menunjukkan perbedaan mean dan standar deviasi antara remaja laki-laki dan perempuan pada tahap depresi, harga diri dan keberfungsian sosial.

Hasil analisis data penelitian seperti dalam tabel 3 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tahap depresi dan harga diri dimana remaja laki-laki lebih tinggi berbanding remaja perempuan. Manakala dalam hal keberfungsian sosial, hasil analisis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Pengaruh Harga Diri dalam Hubungan Depresi dan Keberfungsian Sosial, Tujuan analisis pada bagian ini untuk melihat apakah harga diri memainkan peranan yang signifikan sebagai variabel moderator dalam hubungan

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Faktor-faktor Sosio-Demografik

Faktor-faktor Sosio-demografik	Jumlah	persen
Jenis kelamin (n=121)		
Laki-laki	55	45,5
Perempuan	66	54,5
Umur (n=121)		
17 tahun kebawah	24	19,8
18 – 20 tahun	83	68,6
21 – 23 tahun	14	11,6
Agama (n=121)		
Islam	121	100
Jenjang Pendidikan tertinggi (n=121)		
Sekolah Dasar	22	18,2
Sekolah Menengah Pertama	48	39,7
Sekolah Menengah Atas	51	42,1
Suku Bangsa (n=121)		
Jawa	14	11,6
Bugis	4	3,3
Sunda	101	83,5
Madura	1	0,8
Batak	1	0,8
Kelengkapan Orang tua (n=121)		
Kedua-duanya masih lengkap	95	78,5
Ayah sudah tidak ada, ibu ada	22	18,2
Ibu sudah tidak, ayah ada	2	1,7
Kedua-duanya tidak ada	2	1,7
Status wali / pengasuh saat ini (n=121)		
Orang tua sendiri	22	18,2
Keluarga dekat	56	46,3
Keluarga lain	43	35,5
Kekuatan pegangan nilai agama (n=121)		
Sangat kuat	24	19,8
Kuat	33	27,3
Sedang	60	49,6
Lemah	4	3,3

antara depresi dengan keberfungsian sosial remaja. Untuk memenuhi tujuan ini digunakan analisis *multiple regession.* Hasil analisis regresi berganda dengan metode *stepwise* diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.

Berdasarkan tabel 4, harga diri secara sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap keberfungsian sosial (Beta= 0,037 p > 0,05). Apabila variabel harga diri dimasukkan dalam analisis hubungan antara depresi dan keberfungsian sosial, maka hasilnya harga diri memberi berpengaruh secara signifikan (Beta= 0,066 p < 0,05). Manakala interaksi antara harga diri dan depresi juga menyumbang secara signifikan (Beta= 130, p = < 0,05). Dengan demikian berdasarkan hasil uji statitik di atas maka variabel harga diri memainkan peranan yang signifikan dalam hubungan antara depresi dan keberfungsian sosial internal remaja.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat depresi yang dialami remaja laki-laki lebih tinggi berbanding remaja perempuan. Padahal penelitian depresi secara konsisten mendapati remaja perempuan memiliki tahap depresi lebih tinggi berbanding dengan laki-laki (Gater et al., 1998; Nolen-Hoeksema, 1990). Selain itu, symptom depresi semakin meningkat pada usia remaja berbanding pada usia kanak-kanak (Cichetti & Toth, 1998; Petersen et al., 1993; Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994).

Situasi ini diduga karena remaja laki-laki memiliki ekspektasi yang lebih tinggi berkaitan dengan pendidikan sehingga ketika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka mengalami gangguan emosi berupa depresi. Dalam masyarakat yang masih menganut paham patrialki anak laki-laki dituntut memiliki kelebihan dalam berbagai hal berbanding anak perempuan terutama dalam pendidikan maupun pekerjaan kelak. Ekspektasi peran yang berlebihan bisa menyebabkan remaja laki-laki mengalami masalah ketika mereka harus mengalami masalah putus sekolah.

Tabel 3.
Depresi, Harga Diri dan Keberfungsian Sosial Remaja berdasarkan Jenis Kelamin

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Jumlah	Mean	SD	t	Sig
Depresi	Laki-laki	55	77,1	7,2	4,51	0,00
	Perempuan	66	66,7	7,8		
Harga diri	Laki-laki	55	43,1	3,1	2,23	0,00
	Perempuan	66	32,6	4,9		
Keberfungsian sosial	Laki-laki	55	124,9	10,7	0,744	0,45
	Perempuan	66	126,1	12,6		

Tabel 4.
Pengaruh Harga diri (HD) dalam hubungan Depresi (D) dengan Tahap Keberfungsian Sosial (KS)

Keberfungsian Sosial	Keberfungsian Sosial		
	Model 1	Model 2	
Harga diri		a	b
R^2	0,001	0,004	0,032
$R^{2\ Change}$	-	0,003	0,028
Sig. F Change	0,009	0,003	3,39
Durbin Watson	-	-	2,036
Constant	121,4	123,2	102,1
Beta [PD]	0,037	0,255	0,687
Beta [D]	-	0,066	0,562
Beta [PD x D]	-	-	0,130

Hasil penelitian juga mendapati tingkat pendidikan berkaitan dengan harga diri seseorang. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik cenderung memiliki harga diri yang tinggi. Penelitian-penelitian lain menunjukkan harga diri pada remaja laki-laki mengalami peningkatan sampai usia 14 tahun, setelah tahap usia ini sampai umur 16 tahun, masa transisi dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dapat menurunkan harga diri. Isu harga diri pada kelompok usia ini khususnya pada remaja laki-laki tidak selalu sejalan dengan streotipe karena anak laki-laki biasanya terus berkembang (Hensen, 2006). Kegagalan mencapai tingkat pendidikan tertinggi karena putus sekolah dapat menyebabkan seseorang kekurangan harga diri. Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa remaja yang putus sekolah mengalami depresi dan harga diri yang rendah.

Penelitian ini menunjukkan keberfungsian sosial remaja tidak berbeda secara signifikan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai usia, meskipun umum berpendapat bahwa usia 11 tahun dan 15 tahun paling riskan mengalami depresi (Nolen-Hoeksema & Girgus, 1994). Depresi dikalangan remaja tidak hanya karena rendahnya tingkat kompetensi diri melainkan juga karena tidak stabilnya prestasi belajar (Alva & de los Reyes, 1999; Dekovic, 1999; Greenberger, Chen, Tally, & Dong, 2000; Petersen et al.,1993). Faktor lain adalah berkaitan dengan faktor keluarga. Ketidaklengkapan orang tua dan konflik keluarga serta asuhan remaja merupakan faktor-faktor yang memperbesar resiko depresi di kalangan remaja (Formoso, Gonzales, & Aiken, 2000). Menurut Allgood-Merten et al., 1990) harga diri juga didapati sebagai faktor yang penting yang melindungi remaja dari depresi.

Hasil lain dari penelitian ini menegaskan bahwa depresi yang dialami remaja ternyata tidak mempengaruhi secara langsung terhadap keberfungsian sosial internal. Variabel harga diri berperan sebagai *moderating variable* dalam hubungan antara depresi dengan keberfungsian sosial remaja. Hal ini berarti bahwa remaja yang tinggi tingkat depresinya tidak otomatis keberfungsian sosial internalnya rendah. Hal ini sangat tergantung pula kepada faktor harga diri yang dimiliki seseorang, meskipun secara teoritik depresi dapat menurunkan harga diri, namun variabel ini dapat dinilai sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Lipschitz-Elhawi dan Itzhaky dan (2004) mengatakan beberapa sumber internal seperti harga diri sebagai kontributor substansial pada keberfungsian sosial remaja yang beresiko seperti kelompok remaja putus sekolah yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Rangkuman

Remaja yang putus sekolah bisa jadi mengalami penurunan harga diri, kemudian depresi dan selanjutnya berpengaruh kepada keberfungsian sosial, atau sebaliknya bisa jadi remaja putus sekolah mengalami depresi terlebih dahulu, kemudian mengalami penurunan harga diri yang selanjutnya berpengaruh kepada keberfungsian

sosial remaja. Oleh sebab itu maka diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat bagaimana ketiga variabel ini saling berhubungan satu sama lain khususnya pada penelitian dengan responden remaja.

Pustaka Acuan

Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P. M., & Hops, H. (1990). Sex differences and adolescent depression. *Journal of Abnormal Psychology, 99,* 55–63

Alva, S. A., & de los Reyes, R. (1999). Psychosocial stress, internalized symptoms, and the academic achievement of Hispanic adolescents. *Journal of Adolescent Research,14,* 343–358.

Cichetti, D., & Toth, S. L. (1998). The development of depression in children and adolescents. *American Psychologist,53,* 221–241.

Coopersmith, S. (1967). *The antecedents of self-esteem*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.

Dadang Hawari. (2000). *Manajemen stres, cemas dan depresi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universiti Indonesia.

Dekovic, M. (1999). Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. *Journal of Youth and Adolescence, 28,* 667–685.

Farley, O., Thackeray, W., Milton, G. & Skidmore, R.A. (1991). *Introduction to social work*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

Faul, A. (1995). *The inner-interaction scale of social functioning: A new assessment tool for social workers*. Auckland Park: Department of Social Work, African University.

Faul, A. & Hanekom, A.J. (1994). *Inner Interaction Scale of Social Functioning* (IISSF). Tallahassee: WALMYR Publishing Co.Inc.

Formoso, D., Gonzales, N. A., & Aiken, L. S. (2000). Family conflict and children's internalizing and externalizing behavior: Protective factors. *American Journal of Community Psychology, 28,* 175–199.

Gater, R., Tansella, M., Korten, A., Tiemens, B. G., Maureas, G., & Olatawura, M. O. (1998). Sex differences in the prevalence and detection of depressive and anxiety disorders in general health care settings: Report from the World Health Organization Collaborative Study on Psychological Problems. *Archives of General Psychiatry,*55, 405–413.

Greenberger, E., Chen, C., Tally, S. R., & Dong, Q. (2000).Family, peer, and individual correlates of depressive symptomatology among U. S. and Chinese adolescents. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68,* 209– 219.

Hensen, A. (2006). Restoring self-esteem in adolescent males. *Reclaiming Children and youth* 15:3, pp. 175-178 175

Howe, M.A. (1984). *The relationship of self-esteem and empathy in industrial managers*. Microfilm University Press.

Hudson, W.W. (1993). *Generalized contenment scale*. Tallahassee: WALMYR Publishing Co.inc.

Ife, Jim. (2001). *Human rights and social work*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Lipschitz-Elhawi, R. & Itzhaky, H. (2005). Social support, mastery, self-esteem and individual adjustment among at-risk youth. *Child & Youth Care Forum*, 34(5),

Lowenberg, F. M. (1977). *Fundamentals of social intervention: Core concept and skills for social work practice*. New York: Columbia University Press.

Nolen-Hoeksema, S. (1990). *Sex differences in depression.* Stanford, CA: Stanford University Press.

Nolen-Hoeksema, S., & Girgus, J. S. (1994). The emergence of gender differences in depression during adolescence. *Psychological Bulletin, 115,* 424–443.

Petersen, A. C., Compas, B. E., Brooks-Gunn, J., Stemmler, M., Ez, S., & Grant, K. E. (1993). Depression in adolescence. *American Psychologist, 48,* 155–168.

Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-esteem*. New Jersey: Princeton: University Press.

8

Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Pascabencana
Social Policy Forecasting on Post-disaster Risk Reduction Management

Gunanto Surjono
Gunanto Surjono, Peneliti Utama B2P3KS, Badiklit Kesos, Kementerian Sosial.
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta, telpon (0274) 337256. E-mail gunsuryo@yahoo.com.
Diterima 3 September 2013, disetujui 16 Septemebr 2013.

Abstract

The reconstruction of disaster victim are very often ended when phenomenon of natural disaster ebbing away. But when the victim fell recontructed, actually the problem is starting, especially on how the ex-victims get economic resources to live on both entrepreneurship and job. The productivity of natural and human need to be revitalized to support the continuity of ex-victims and people in disaster prone area. The management of social policy on disaster risk reduction is united programs from several stakeholders, such as local and central government, corporations, and people in disaster prone area to revitalize economic resources for ex-victims and people, rehabilate infrastructure related to having disaster preparation, even to grow a new economic alternative based on natural disaster threat. By using interview with experts on disaster management, observation on disaster prone areas, and document analysis the research has been able to set an alternative forecasting of social policy on the management of pot-disaster risk management.

Keywords:
Social Policy-Risk Reduction-Post Disaster

Abstract

Pemulihan korban bencana, sering berhenti pada pemulihan kerugian jiwa, raga, dan harta korban setelah terjadinya bencana alam. Padahal, ketika korban pulih dari akibat bencana, permasalahan lain pascabencana yang mengikuti justru mulai, seperti upaya memulihkan sumber ekonomi bagi mantan korban, baik dalam bidang usaha maupun pekerjaan. Produktivitas alam dan manusia korban bencana membutuhkan revitalisasi ulang dalam rangka menopang keberlangsungan kehidupan korban dan masyarakat di daerah rawan bencana. Menejemen pengurangan resiko pascabencana merupakan gabungan kepentingan pemangku, seperti pemerintah daerah dan pusat, pengusaha, masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka merevitalisasi ekonomi bagi korban dan masyarakat di daerah rawan bencana, bahkan menumbuhkan alternatif ekonomi baru berbasis bencana alam. Melalui metode wawancara dengan beberapa ahli di bidang menejemen pengurangan resiko bencana, observasi langsung di daerah rawan bencana, dan analisis dokumen, penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan alternatif tentang kebijakan sosial dalam rangka pengurangan resiko pascabencana.

Kata Kunci:
Kebijakan Sosial-Pengurangan Resiko-Pascabencana

A. Menejemen Penguranggan Resiko Akibat Bencana Alam

Di negara maju, dampak ekonomi pascabencana sudah dipersiapkan secara matang dengan program yang dikenal dengan istilah *disaster reducing risk management (*Margareta WahIstrom, 2013: 7), yang dirancang atas dasar pengalaman bahwa dampak ikutan dari bencana alam ternyata membawa resiko kerusakan ekonomi yang membutuhkan biaya yang tidak kalah besarnya dengan biaya yang dibutuhkan bagi rehabilitasi korban bencana alam. Di negara-negara maju, program usaha pengurangan resiko ekonomi akibat bencana alam jelas-jelas menumbuhkan pencetusan ekonomi baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja yang semula mengalami banyak kekacauan akibat bencana alam dalam skala besar (nasional), terutama dalam memulihkan sumber kehidupan (kerja dan usaha) bagi korban bencana alam.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai daerah yang rawan bencana (*disaster prone*), program tersebut belum dilakukan secara jelas kecuali usaha spontanitas dan sporadik dari kalangan usaha yang memang sejak dini sudah sadar bahwa usahanya, yang berkedudukan di wilayah rawan bencana (Quarentelli, E.L., 1998: 268), perlu usaha kerja sama lintas sektoral antara pemerintah dan swasta, untuk mempertahankan dan menumbuhkan usaha yang berkaitan dengan pengurangan resiko ekonomi akibat dampak ikutan bencana alam, karena di balik usaha tersebut tergantung nasib tenaga kerja (dan dampak ikutan usaha yang berkaitan) yang terancam kelangsungan pekerjaannya karena ada bencana alam.

Menurut prakiraan PBB, resiko dampak ikutan bencana alam terhadap sektor ekonomi telah membengkak sebesar 50 persen (berkisar 25 milyar rupiah) untuk program dampak lanjutan bencana alam terhadap sektor ekonomi, karena kejadian bencana alam semakin lama semakin sering dan meningkat kualitas perusakannya. Sebagai contoh, dampak lanjutan bencana gempa bumi di Jepang 2011, telah menurunkan pendapatan pabrik mobil raksasa Toyota sebesar 115 milyar rupiah, khusus hanya di daerah terdampak gempa. Pabrik mobil yang mengerahkan tenaga kerja lebih dari 100.000 orang tersebut hanya berhasil memulihkan kembali 14.2 persen dari tenaga kerjanya yang bisa meneruskan kerja dan usahanya berkaitan dengan keberadaan Pabrik Mobil Toyota tersebut, sisanya mengalami kebangkrutan total akibat bencana alam gempa bumi. Dengan adanya program sosial *reducing disaster risk management*, kualitas kehidupan ekonomi korban pascabencana dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dibandingkan kehidupan korban sebelum bencana alam terjadi. Sebagai contoh di negara-negara maju dan berkembang, kecuali Meksiko dan China, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus yang diperuntukkan bagi pengurangan resiko ekonomi akibat bencana alam, seperti yang dideskripsikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel1
Alokasi Dana Pengurangan Resiko Pasca Bencana Alam

Negara	Jenis Bencana	Tahun	Alokasi Dana
Amerika	Banjir-Angin Ribut	2010	31 milyar
Inggris	Cuaca Ekstrim	2009	7 milyar
Perancis	Cuaca Ekstrim	2010	11 milyar
Spanyol	Cuaca Ekstrim	2010	13 milyar
Jerman	Cuaca Ekstrim	2010	17 milyar
Selandia Baru	Gempa Bumi	2011	12 milyar
Rusia	Cuaca Ekstrim	2010	20 milyar
Jepang	Gempa Bumi-Tsunami	2012	22 milyar
Meksiko	Angin Ribut	2009	9 milyar
China	Banjir	2011	8 milyar

Sumber: Hasil Kompilasi dari MMI Time (2008-2013)

Resiko ekonomi akibat bencana membutuhkan biaya besar dibandingkan kebutuhan pemulihan (rehabilitation) korban dan harta bendanya. Sebuah usaha atau lapangan pekerjaan yang hancur sering membawa dampak berurutan kait mengkait. Sebagai contoh, ketika sebuah usaha rusak akibat bencana alam, pekerja ahli dan terampil secara otomatis akan segera mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan pendapatan lebih baik, dari pada harus menunggu pemulihan usaha di tempat mereka semula bekerja yang memakan waktu lama. Ketika pekerja utamanya pergi dari perusahaan yang rusak akibat bencana, kelangsungan produksi sebuah usaha akan menurun dan terancam berhenti. Ketika produksi menurun, sistem ketersediaan

barang-barang di pasaran guncang. Hubungan antara pembuat produk, agen, dan konsumen terganggu, sehingga reputasi perusahaan bersangkutan sebagai penyedia barang bagi masyarakat konsumen hancur. Pengalaman di negara maju, kehancuran suatu usaha dan tempat pekerjaan akibat bencana alam akan mengalami proses pemulihan yang panjang dan sulit dibandingkan dengan kerusakan usaha akibat resesi atau pukulan persaingan usaha secara umum.

B. Penggunaan Model Pendekatan

Alternatif penyusunan kebijakan pengurangan resiko pascabencana pada prinsipnya disusun berbasiskan pengkajian empirik terjadinya bencana alam dan kebutuhan pemulihan kembali kehidupan mantan korban dan masyarakat di daerah rawan bencana. Dalam konteks program alternatif pengurangan resiko pascabencana di Indonesia, rancangan kebijakan tersebut disusun dari hasil obsevasi di daerah-daerah tempat rawan (*prone*) kejadian bencana dalam berskala nasional (menjadi perhatian nasional). Implementasi penelitian dilakukan dengan teknik sebagai berikut.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi di daerah-daerah yang pernah terjadi bencana berskala nasional di Indonesia, seperti NAD (Tsunami), Sumatera Barat (Gempa Bumi), Bengkulu (Gempa Bumi), Lampung (Gempa bumi), Jawa Barat (Tanah Longsor), DIY (Erupsi Gunung Berapi), Jawa Timur (Banjir), Bali (Banjir), NTT (Kekeringan), Papua (Banir). Pengayaan data dilakukan melalui observasi langsung di daerah yang menjadi lokasi penelitian. Sumber data diperoleh dari informan di masing-masing daerah bencana yang mengetahui dan menangani langsung bencana alam.

Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, hasil dari inventarisasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi terdampak, populasi korban, dan jumlah sumber alam dan ekonomi usaha riil di daerah bencana. Analisis biaya pengurangan resiko pascabencana disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan berbagai sektor tersebut dirasiokan dengan populasi potensi korban.

C. Siklus Ekonomi Pengurangan Resiko Pascabencana

Kebutuhan pengurangan resiko ekonomi akibat bencana dapat dimulai dengan usaha asuransi terhadap kondisi usaha, termasuk pekerjanya, untuk dimasukkan dalam polis asuransi bencana alam. Asuransi pascabencana juga termasuk asuransi usaha pertanian, sebagai kelompok usaha yang juga rawan terhadap gangguan gempa. Polis asuransi bencana berbeda dengan polis asuransi usaha dan pekerjanya pada umumnya. Polis asuransi bencana hanya khusus menjamin resiko akibat bencana, sedang polis asuransi umum menjamin kerusakan usaha dan pekerjanya akibat faktor bukan bencana alam, tetapi asuransi terhadap resiko tertentu sesuai yang diperjanjikan dalam polis.

Kebutuhan lain setelah asuransi resiko bencana adalah kredit pemulihan usaha akibat bencana alam. Kredit usaha yang berkaitan dengan resiko bencana juga bukan merupakan kredit usaha pada umumnya, tetapi kredit berbunga khusus (rendah) dan bermisi sosial yang memang secara khusus diperuntukan bagi usaha-usaha yang terancam berhenti semata-mata akibat bencana. Penguatan bangunan fisik rumah perorangan dan usaha yang tahan terhadap gangguan bencana. Perancangan ulang bangunan usaha dan pabrik yang berorientasi pada bentuk ramah lingkungan, dikenal dengan istilah bangunan hijau (*green house*). Penguatan instalasi sarana dan prasarana (jaringan listrik dan komunikasi) yang tahan terhadap gangguan bencana alam.

Kebijakan merancang ulang bangunan fisik, instalasi, sarana dan prasarana, orientasi bagi terjaganya keserasian lingkungan alam tersebut semata-mata ditujukan untuk satuan usaha agar tetap tahan dari hantaman bencana (*resilient*) dari aspek bangunan fisiknya, tetap berlangsung dan tahan berproduksi meskipun ada gangguan bencana (*sustainable*), tetap mampu bersaing di pasaran dalam membuat produk usahanya (*competitive*), dan yang paling penting adalah tetap terlindungi kualitas hidup usaha dan potensi korban dalam payung asuransi bencana alam, sehingga bencana alam kemudian dipan-

dang oleh masyarakat sebagai peristiwa alam rutin yang tidak perlu dirisaukan bagi kondisi kehidupan mereka.

D. Merancang Kebijakan Sosial Pengurangan Resiko Bencana Alam di Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang termasuk rawan bencana alam (*natural disaster prone*) sangat membutuhkan kebijakan sosial yang mengkhususkan pada kondisi pascapemulihan korban, terutama dalam menjaga agar kualitas hidup korban dari ketersediaan lapangan kerja pascabencana dapat tetap terjaga. Sebab, walaupun korban dapat dipulihkan dari kerugian (jiwa, raga, harta benda) akibat bencana, ketersediaan lapangan kerja dan usaha sebagai penopang hidup pascabencana di kemudian hari, kalau tidak ada program pengurangan resiko pascabencana, dapat dipertanyakan. Apabila kebijakan program sosial belum jelas-jelas diadakan, kualitas hidup korban pascapemulihan terancam memburuk lagi akibat tidak tersedianya lapangan kerja dan usaha, padahal untuk bangkit kembali secara swadaya tanpa intervensi pemerintah, sektor usaha dan lapangan pekerjaan yang hancur akibat bencana alam sulit untuk tumbuh kembali. Sebagai contoh, beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan alokasi dana pengurangan resiko ekonomi pascabencana adalah seperti yang tersaji dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2
Prakiraan Kebutuhan Dana Pengurangan Resiko Pascabencana Alam

Daerah	Jenis Bencana	Tahun	Prakiraan Alokasi Dana
NAD	Tsunami	2004	37 milyar
Sumatera Barat	Gempa Bumi	2006	28 milyar
Bengkulu	Gempa Bumi	2007	12 milyar
Lampung	Banjir	2012	9 milyar
Jawa Barat	Tanah Longsor	2012	6 milyar
DIY	Erupsi Merapi	2011	17 milyar
Jawa Timur	Banjir	2010	6 milyar
Bali	Banjir	2011	4 milyar
NTT	Kekeringan	2011	8 milyar
Papua	Banjir	2011	11 milyar

Sumber: Bappeda Masing-masing Provinsi (2013)

Gambaran yang tersaji dalam tabel 2 di atas adalah prakiraan kebutuhan alokasi anggaran yang idealnya disediakan oleh pemerintah, swasta sektor usaha, dan masyarakat mengacu pada berbagai bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, yang telah diprediksi kebutuhannya oleh badan-badan pemangku kepentingan daerah khususnya bidang pengurangan resiko ekonomi pascabencana. Dalam menghadapi resiko kehidupan pascabencana, di Indonesia belum dilakukan sebuah kebijakan khusus yang dirancang dengan cermat tentang permasalahan, kebutuhan, dan pihak-pihak yang mampu berperan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjamin terjaganya kualitas hidup korban pasca pemulihan, sebab korban membutuhkan kesinambungan sumber kehidupan yang hancur akibat pukulan bencana alam, baik dari aspek usaha maupun tempat kerja. Di negara-negara maju yang sudah memiliki pengalaman membangun sebuah kebijakan sosial pengurangan resiko pascabencana, pemerintah (pusat dan daerah) yang selalu memprakarsai kebijakan tersebut semata-mata demi terjaminnya kondisi dan kualitas hidup korban. Oleh karena korban pada kenyataannya selalu tergantung adanya lapangan usaha dan pekerjaan, maka usaha dan lapangan pekerjaan yang menjadi sandaran hidup korban di daerah rawan bencana menjadi penekanan sendiri dalam kebijakan sosial pengurangan resiko ekonomi pascabencana.

E. Merancang Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dalam Pengurangan Resiko Pascabencana

Mengacu pada pengalaman di negara-negara maju, pemrakarsa utama dalam merancang menejemen pengurangan resiko pascabencana adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga dalam negara yang secara politis memiliki otoritas, kompetensi, *previlege*, dan jangkauan koordinasi yang kuat dan luas dalam menyelenggarakan sebuah program, dalam konteks ini adalah program sosial menejemen pengurangan resiko ekonomi pascabencana. Pemerintah, pusat dan daerah, dapat berfungsi sebagai pemancing gagasan dan penyediaan dana, serta memetakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur tahan

gempa. Kedua adalah sektor usahawan swasta, yang berfungsi sebagai lembaga bagian sumber nafkah dan pendapatan ekonomi korban bencana alam, dan sebagai lembaga yang paling mengetahui resiko dan dampak ketika terjadi bencana alam. Lembaga usaha swasta masing-masing dapat membuat peta kebutuhan kondisi fisik bangunan usahanya agar tahan terhadap bencana, tidak menyumbang terjadinya bencana, dan potensi korban yang membutuhkan perlindungan melalui asuransi yang preminya harus ditanggung oleh perusahaan. Ketiga adalah masyarakat umum di daerah rawan bencana (*disaster hazard areas*), untuk memahami dan mendukung segala kebijakan dan model usaha dan kegiatan yang berorientasi pada pengurangan resiko ekonomi pascabencana alam.

Pemahaman dan sinergi antara ketiga pihak, pemerintah, usahawan, dan masyarakat di daerah rawan bencana tersebut diperlukan karena kebijakan dan model pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berorientasi pada penanggulangan bencana alam kadang-kadang sangat berbeda dengan pembangunan umum, sehingga kemungkinan kepentingan hak masyarakat umum terganggu sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah meluruskan aliran sungai berpotensi banjir sering mengganggu kemapanan hak dasar lahan pertanian dan permukiman milik penduduk. Alih permukiman warga yang rentan terhadap bencana letusan gunung berapi dan tanah longsor sering mengganggu kemapanan hidup masyarakat yang semula sudah terpola hidup, makan, mencari nafkah, dan bergaul di daerah yang kemudian dinilai rawan bencana alam. Semua realisasi dan implementasi kegiatan program pengurangan resiko bencana, apabila tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat di lingkungan daerah rawan bencana, akan sering memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat umum.

F. Menyambut Bencana dan Tumbuhnya Ekonomi Baru

Apabila dicermati sekilas, mungkin mengherankan mengapa kebijakan sosial program penanggulangan bencana alam justru akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, sebab biasanya bencana alam justru menghancurkan kegiatan ekonomi. Akan tetapi apabila dicermati secara mendalam, dua kemungkinan yang semula bertolak belakang tersebut (bencana dan ekonomi) sebenarnya secara logis dapat dipersandingkan. Kesiagaan akan kemungkinan datangnya bencana alam akan menumbuhkan sektor usaha pembuatan konstruksi bangunan yang tahan bencana (banjir dan gempa), juga akan memancing usaha konstruksi bangunan yang berwawasan lingkungan (hijau), misalnya pembuatan bangunan yang tidak mempercepat pemanasan global sehingga cuaca ekstrim dapat dihindari. Pembuatan struktur bangunan usaha yang proses pembuatan produknya tidak mengeluarkan emisi zat perusak lingkungan. Menejemen pengurangan resiko ekonomi pascabencana juga menumbuhkan usaha asuransi korban bencana yang model santunannya berbeda dengan asuransi-asuransi umum (kesehatan, kecelakaan, kebutuhan pendidikan, kepailitan usaha).

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur berorientasi bencana alam juga menumbuhkan gairah ekonomi baru dalam bentuk usaha konstruksi infrastruktur (jalan, komunikasi, perlistrikan, lingkungan). Apabila program sosial kegiatan ekonomi berorientasi bencana alam tersebut dilakukan dengan baik, koordinatif, dan tanpa kebocoran, niscaya peristiwa bencana akan dirasakan oleh pemerintah, usahawan, pekerja, dan masyarakat umum sebagai peristiwa rutin, karena bangunan dan lingkungan fisik sudah dirancang tahan bencana, kelangsungan pekerjaan dan usaha masyarakat sudah dijamin ganti ruginya oleh asuransi.

Hasil program pengurangan resiko pascabencana secara utopis dapat diungkapkan sebagai “tidak ada rasa kekhawatiran akan kerugian dan penderitaan” karena bencana, walaupun apabila orang disuruh memilih memang sebaiknya bencana alam tidak terjadi. Model kebijakan sosial menejemen pengurangan resiko ekonomi pascabencana dalam tahap implementasi di masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda, tergantung jenis bencana alam yang mengancam masing-masing daerah bersangkutan. Daerah bersiko banjir akan ber-

beda dengan daerah beresiko tsunami, angin ribut, tanah longsor, dan kekeringan. Di samping jenis bencananya, kualitas ancamannya juga membedakan antara daerah satu dan daerah lainnya akan program yang mesti dilakukan dalam rangka pengurangan resiko (ekonomi) pascabencana.

G. Prakiraan Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Apabila rancangan kebijakan sosial tersebut dapat direalisasikan,di samping angkatan kerja produktif terdampak bencana dapat dipulihkan ke bidang kerja semula, angkatan kerja baru terkait dengan kegiatan pengurangan resiko bencana, seperti pembangunan infrastruktur, mengubah ruang usaha atau pabrik berorientasi ramah lingkungan (*Green Plant*), penumbuhan lembaga asuransi dampak bencana bagi sektor usaha dan masyarakat potensi korban. Dari hasil pencermatan di daerah-daerah rawan bencana yang menjadi sampel penelitian, didukung dengan analisis dokumen MPRP, menghasilkan prakiraan penyerapan tenaga kerja seperti yang tersaji dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Prakiraan Penyerapan Tenaga Kerja Pengurangan Resiko Pascabencana

Daerah	Jenis Bencana	Tahun	Prakiraan Penyerapan Tenaga Kerja Baru
NAD	Tsunami	2004	4.900
Sumatera Barat	Gempa Bumi	2006	3.115
Bengkulu	Gempa Bumi	2007	1.299
Lampung	Banjir	2012	1.879
Jawa Barat	Tanah Longsor	2012	1.116
DIY	Erupsi Merapi	2011	1.723
Jawa Timur	Banjir	2010	2.119
Bali	Banjir	2011	997
NTT	Kekeringan	2011	3.323
Papua	Banjir	2011	1.990

Kemampuan penyerapan tenaga kerja baru berbasis bencana tersebut dimungkinkan apabila kegiatan pembangunan infrastruktur siaga bencana dan lokasi pabrik/industri berwawasan lingkungan (*Green Plant*) dilakukan secara padat karya, dalam arti memanfaatkan sedapat mungkin sumber daya manusia setempat di daerah rawan bencana. Pelibatan sumber daya setempat di samping dapat memberi ruang gerak ekonomi bagi masyarakat setempat juga memberi pemahaman baru tentang bagaimana masyarakat harus membangun lingkungan mereka berorientasi pada bencana alam yang sering terjadi di daerahnya. Dari prakiraan tersebut apabila tiap tenaga kerja menanggung satu keluarga, dampak dari tumbuhnya sumber ekonomi dapat meluas secara eksponensial bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

H. Rangkuman

Pengurangan resiko pascabencana pada intinya merupakan upaya dari pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas hidup orang yang rentan menjadi korba bencana alam, bahkan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan masa sebelum terjadinya bencana. Pengurangan resiko tersebut mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana, penciptaaan sumber ekonomi baru berbasis bencana, penumbuhan lembaga asuransi yang mampu melindungi masyarakat rentan korban menghadapi bencana menyikapi bencana sebagai peristiwa rutin belaka, karena jaminan hidup terinstitusionalisasi dalam siaga bencana yang memadai dan profesional. Direkomendasikan, agar pemangku kepentingan mendukung kegiatan yang berorientasi pada pengurangan resiko pascabencana, bekerja bersinergi, dalam koordinasi, dan terfokus. Tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi baru berbasis MPRP bencana juga harus disikapi dengan pengecualian kewajiban pajak, dalam arti pajak usaha yang memiliki prospek berkaitan erat dengan pengurangan resiko ekonomi pascabencana harus dilakukan berbeda (diperingan atau dikecualikan) dengan pajak usaha lain pada umumnya.

Pustaka Acuan

Dyness, R.R. 1994. *Community Emergency Planning: False Assumtion and Appropriate Analogies*. California: International Journal of Mass Emergency Disaster.

Maskrey, A. 1999. *Disaster Mitigation: A Community Based Approach*. Oxford: Oxford University Press.

Mac Intire, D.A. 2000. *Sustainability and Invulnerability Development*. Canbera: Australian Journal of Emergency Management.

Mitchell, T and Wilkinson, E. 2012. *Disaster Risk Management in Post 2012. Policy Frameworks: Forging more Resilient Future*. London: Oversea Institute.

Quarentelli, E.L. 1998. *Mayor Criteria for Judging Disaster Planning and Their Applicability in Developing Societies*. Delaware: University of Delaware.

Schwartz, Eril. 2006. *A Needless Tool of Natural Disaster*. New York: UNO.

Wahlstrom, Margareta. 2013. *Counting Economic Losses from Disaster*. Jakarta: Gramedia.

Wisner, B. et al. 2004. *At Risk: Natural Hazards, People Vulnerability and Disaster*. London: Routledge.

UNISDR. 2006. *Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives*. Geneva: United Nations Internasional Strategy for Disaster Reduction.